

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, serta Laporan Perubahan Ekuitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah. Format Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas serta Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan melakukan konversi/penyesuaian realisasi APBD dalam format berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;



- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023.



1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Sumba Barat disajikan dengan sistematika terdiri atas tujuh bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja APBD
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 4.4. Penerapan Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah.



- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan
 keuangan pemerintah daerah:
- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Neraca
 - 5.4. Laporan Operasional
 - 5.5. Laporan Arus Kas
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup
- Lampiran - Lampiran



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat, yaitu (minimal) :

- a. Jumlah penduduk miskin sebesar 27,47 %.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,98 %.
- c. *Gini Ratio* sebesar 0,334
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 63,83 %
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 1,03 %
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,81% Provinsi NTT
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp2.416.96 Miliar;

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun



memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023 (%)	Tahun 2022 (%)	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	27,47	28,39	(0,92)
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	37,06	37,78	(0,72)
3	Provinsi (%)	20,05	20,99	(0,94)
4	Nasional (%)	9,57	10,14	(0,57)
5	Peringkat Provinsi	4	4	0
6	Peringkat Nasional	29	28	1

Sumber Dokumen: BPS Kab. Sumba Barat

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2023 sebesar 27,47% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 28,39%. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan sebesar 0,92% hingga menjadi 27,47%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumba Barat masih diatas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	5,53	6,77	(1,24)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	3,63	3,96	(0,33)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,71	(0,15)
4.	Peringkat Provinsi	4	4	0



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
5	Peringkat Nasional	28	18	10

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	1,50	2,16	(0,66)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,93	1,05	(0,12)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	(0,04)
4.	Peringkat Provinsi	5	4	1
5	Peringkat Nasional	32	16	16

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari :

- 1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- 2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- 3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 adalah sebesar 2,98%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/ Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,98	1,74	1,24
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,54	3,77	(0,23)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	6,49	(0,63)
4	Peringkat Provinsi	13	20	(7)
5	Peringkat Nasional	-	-	0

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,98%,



sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,74 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Namun demikian TPT Kabupaten Sumba Barat masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,54% dan Nasional sebesar 5,86 %.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 belum dihitung sehingga menggunakan pencapaian *Gini Ratio* Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 *Gini Ratio* Kabupaten Sumba Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,296	0,288	0,008
2	Tingkat Provinsi	0,34	0,346	(0,006)
3	Tingkat Nasional	0,381	0,384	(0,003)
3	Peringkat Provinsi	17	20	(3)
4	Peringkat Nasional			0

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Sumba Barat



Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,34 Angka ini kurang (0,006) poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,346 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 adalah sebesar 64.43 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	66,92	65,90	0,78
2	Provinsi	65,9	65,28	0,62
3	Indonesia/Nasional	72,91	72,29	0,62
4	Peringkat Provinsi	12	12	0
5	Peringkat Nasional	0,00	0,00	0

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sumba Barat

Tabel 7 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Komponen IPM	IPM (Persen)		
	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (Tahun)	67,15	67,47	67,77



Komponen IPM	IPM (Persen)		
	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,12	13,15	13,26
Rata-rata Lamanya Sekolah (Tahun)	6,84	6,85	6,92
Pengeluaran Rill Perkapita (Ribu Rp)	7.307	7.627	7.993
Indeks Pembangunan Manusia	65,28	65,90	66,68
Komponen Indeks Pembangunan Manusia			

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sumba Barat

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2023 adalah sebesar 66,68 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 65,90 poin mengalami kenaikan sebesar 0,78 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 66,68 tahun pada Tahun 2023, lebih lama dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 13,26 tahun lebih lama dibandingkan dengan harapan lama sekolah tahun sebelumnya. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp7.993,00 atau meningkat Rp366,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Sumba Barat pada saat ini sebesar 66,68% pada Tahun 2023, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,78%, pada tahun 2022 sebesar 65,90%

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor



produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2021.

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota

No	Uraian	Kabupaten Sumba Barat			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (ADHK) (Miliar Rupiah)	1.437,37	1.452,22	Angka Belum rilis	Angka Belum rilis	Angka Belum rilis
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-10,2	-1,8	-	-	-
3	Peringkat Provinsi	18	18	-	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Sumba Barat

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi :

- 1) Inflasi ringan (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya persentasenyapun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- 2) Inflasi sedang (*Gallopning Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- 3) Inflasi berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.



- 4) Hiper inflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 mengikuti inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 0,39% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9 Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	-	-	-
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0,39	0,81	-0,42
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	5,51	-2,9
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Sumba Barat

Tingkat inflasi di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 mengikuti inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,39%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,81% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Namun demikian inflasi Kabupaten Sumba Barat masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 2,61%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Sumba Barat

Struktur perekonomian Kabupaten Sumba Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 PDRB seri 2020 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam jutaan rupiah

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (Persen)		
	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.93	28.07	28.67
B. Pertambangan dan Penggalian	1.05	1.06	1.04
C. Industri Pengolahan	1.83	1.79	1.81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01
F. Konstruksi	6.29	6.62	6.56



Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (Persen)		
	2020	2021	2022
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.65	17.61	18.27
H. Transportasi dan Pergudangan	1.94	1.98	2.02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.35	0.35	0.43
J. Informasi dan Komunikasi	4.93	4.87	4.62
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.45	5.74	5.91
L. Real Estat	2.50	2.44	2.51
M. Jasa Perusahaan	0.14	0.12	0.12
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18.10	15.66	14.91
O. Jasa Pendidikan	10.58	10.38	9.91
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.64	1.79	1.72
Q. Jasa lainnya	1.54	1.45	1.42
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Barat

2.2. Kebijakan Keuangan

Otonomi Daerah mempunyai makna adanya pelimpahan kewenangan yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan manfaat anggaran Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada Tahun Anggaran 2023 telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selisih antara pendapatan dengan belanja menyebabkan timbulnya surplus atau defisit anggaran, untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus yang terjadi, maka dialokasikan dalam anggaran pembiayaan daerah.



Kebijakan Umum belanja daerah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan publik dan penataan perangkat serta sarana prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan. Belanja daerah harus dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan program dan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023.

Dalam struktur APBD penganggaran Tahun Anggaran 2023 telah diatur *mandatory spending* yang bertujuan untuk mengurangi masalah sosial dan ekonomi daerah dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp179.964.223.282,00 atau 22,04% dari total belanja daerah sebesar Rp816.522.055.441,00 yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp160.332.359.042,00; dan diluar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang pendidikan sebesar Rp19.631.864.240,00 yaitu Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan sebesar Rp3.590.662.240,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp12.464.809.100,00, Kecamatan Loli sebesar Rp409.440.000,00, Kecamatan Wanukaka sebesar Rp386.000.000,00, Kecamatan Lamboya sebesar Rp390.800.000,00, Kecamatan Laboya Barat sebesar Rp338.798.400,00, Kecamatan Tanarighu sebesar Rp363.720.000,00, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.687.634.500,00.
- 2) Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah penerimaan sebesar Rp 398.303.398.806,00 terdiri dari :
 - Penerimaan DAU sebesar Rp393.087.240.000,00
 - Penerimaan Dana Bagi Hasil sebesar Rp5.216.158.806,00
 - b. Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp39.608.161.500,00 atau 10 % dari DTU dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana Alokasi Umum sebesar Rp39.209.116.300,00
 - Dana Bagi Hasil sebesar Rp.399.045.200,00



- 3) Realisasi Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp212.734.251.661,00 terdiri dari :
- Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp26.628.288.453,00
 - Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp47.685.204.516,00
 - Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp137.251.355.339,00
 - Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.169.403.353,00

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja maupun pada tingkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :

- Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai satu kesatuan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang komprehensif dan memberikan tanggungjawab yang besar kepada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dipersiapkan.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bekerjasama untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah.
- Meningkatnya Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023.
- Tercapainya realisasi berdasarkan *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023.



2.4 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD-P TA 2023 Kabupaten Sumba Barat

1. *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Sumba Barat meliputi hal-hal sebagai berikut.

a). *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional PAUD Negeri, Negeri/Inpres, SMP Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat, juga berdampak kepada tenaga pendidik meliputi guru dan jumlah peserta didik.

Tabel 11 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)
A.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	160.332.359.042,00	149.808.786.162,00	93,44	-10.523.572.880,00
	1) BELANJA OPERASI	133.752.201.895,00	124.794.262.607,00	93,30	-8.957.939.288,00
	Belanja Pegawai	77.418.237.182,00	74.939.948.746,00	96,80	-2.478.288.436,00



Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Per 31 Desember 2023

Catatan atas Laporan Keuangan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)
	Belanja Barang dan Jasa	51.008.752.113,00	48.063.168.861,00	94,23	-2.945.583.252,00
	Belanja Hibah	5.325.212.600,00	1.791.145.000,00	33,64	-3.534.067.600,00
	2) BELANJA MODAL	26.580.157.147,00	25.014.523.555,00	94,11	-1.565.633.592,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.608.139.488,00	3.805.643.264,00	82,59	-802.496.224,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.012.288.677,00	20.388.499.958,00	97,03	-623.788.719,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	959.728.982,00	820.380.333,00	85,48	-139.348.649,00
B.	BELANJA DI LUAR DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ANTARA LAIN :	19.631.864.240,00	19.001.912.719,00	96,79	-629.951.521,00
	1) DINAS PARIWISATA , EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN	3.590.662.240,00	3.317.011.661,00	92,38	-273.650.579,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.390.912.240,00	3.182.427.061,00	93,85	-208.485.179,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.034.199.940,00	1.959.619.480,00	96,33	-74.580.460,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	249.999.800,00	205.239.600,00	82,10	-44.760.200,00
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	907.212.500,00	833.892.981,00	91,92	-73.319.519,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	199.500.000,00	183.675.000,00	92,07	-15.825.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	199.750.000,00	134.584.600,00	67,38	-65.165.400,00
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	199.750.000,00	134.584.600,00	67,38	-65.165.400,00
	2) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.464.809.100,00	12.329.697.708,00	98,92	-135.111.392,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	12.464.809.100,00	12.329.697.708,00	98,92	-135.111.392,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	117.599.000,00	94.085.000,00	80,00	-23.514.000,00
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	-
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.500.000,00	14.069.000,00	18,88	-60.431.000,00
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	95.550.000,00	95.545.000,00	99,99	-5.000,00
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	90.660.400,00	90.390.400,00	99,70	-270.000,00



NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	296.390.300,00	285.719.800,00	96,40	-10.670.500,00
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	49.800.000,00	49.800.000,00	100,00	0,00
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.140.309.400,00	11.108.088.508,00	99,71	-32.220.892,00
	Pengembangan Literasi Berkbasis Inklusi Sosial	100.000.000,00	92.000.000,00	92,00	-8.000.000,00
3)	KECAMATAN WANUKAKA	386.000.000,00	385.250.000,00	99,81	-750.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	386.000.000,00	385.250.000,00	99,81	-750.000,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	386.000.000,00	385.250.000,00	99,81	-750.000,00
4)	KECAMATAN LAMBOYA	390.800.000,00	379.650.000,00	97,15	-11.150.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	390.800.000,00	379.650.000,00	97,15	-11.150.000,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	390.800.000,00	379.650.000,00	97,15	-11.150.000,00
5)	KECAMATAN LABOYA BARAT	338.798.400,00	333.050.000,00	98,30	-5.748.400,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	338.798.400,00	333.050.000,00	98,30	-5.748.400,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	338.798.400,00	333.050.000,00	98,30	-5.748.400,00
6)	KECAMATAN LOLI	409.440.000,00	405.314.000,00	98,99	-4.126.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	409.440.000,00	405.314.000,00	98,99	-4.126.000,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	409.440.000,00	405.314.000,00	98,99	-4.126.000,00
7)	KECAMATAN TANA RIGHU	363.720.000,00	362.199.000,00	99,58	-1.521.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	363.720.000,00	362.199.000,00	99,58	-1.521.000,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	363.720.000,00	362.199.000,00	99,58	-1.521.000,00
8)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.687.634.500,00	1.489.740.350,00	88,27	-197.894.150,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.687.634.500,00	1.489.740.350,00	88,27	-197.894.150,00



NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.687.634.500,00	1.489.740.350,00	88,27	-197.894.150,00
C.	Anggaran Fungsional Pendidikan (A+B)	179.964.223.282,00	168.810.698.881,00	93,80	-11.153.524.401,00
D.	Total Belanja Daerah	816.522.055.441,00	785.796.094.430,00	96,24	-30.725.961.011,00
E.	Rasio anggaran Pendidikan (C : D) x 100 %	22,04	21,48		

Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp168.810.698.881,00 atau 21,48% dari total belanja daerah sebesar Rp785.796.094.430,00 yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp149.808.786.162,00; dan diluar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang pendidikan sebesar diluar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang pendidikan sebesar Rp19.001.912.719,00 yaitu Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan sebesar Rp3.3187.011.661,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp12.329.697.708,00, Kecamatan Loli sebesar Rp405.869.000,00, Kecamatan Wanukaka sebesar Rp385.250.000,00, Kecamatan Lamboya sebesar Rp379.650.000,00, Kecamatan Laboya Barat sebesar Rp333.050.000,00 , Kecamatan Tanarighu sebesar Rp362.199.000,00, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.489.740.350,00

b). *Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Sumba Barat.



Tabel 12 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

NO	Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	Total Belanja Daerah	816.522.055.441,00	785.796.094.430,00	96,24	(30.725.961.011,00)
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa	99.358.199.500,00	99.358.199.500,00	100,00	0,00
	a) Belanja Bagi Hasil	399.045.200,00	399.045.200,00	100,00	0,00
	b) Bantuan Keuangan	98.959.154.300,00	98.959.154.300,00	100,00	0,00
3	Selisih (1 - 2)	717.163.855.941,00	686.437.894.930,00	95,72	(30.725.961.011,00)
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayan Publik (40% x Selisih)	30,71	31,54		12,27

NO	Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	Belanja Modal	216.421.587.126,00	212.734.251.661,00	98,30	(3.687.335.465,00)
	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan dan Mesin	28.279.975.368,00	26.628.288.453,00	94,16	(1.651.686.915,00)
	Bangunan dan Gedung	48.381.640.641,00	47.685.204.516,00	98,56	(696.436.125,00)
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.420.242.135,00	137.251.355.339,00	99,16	(1.168.886.796,00)
	Aset Tetap Lainnya	1.339.728.982,00	1.169.403.353,00	87,29	(170.325.629,00)
	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan	3.795.792.400,00	3.711.798.222,00	97,79	(83.994.178,00)
	Jumlah 1 (a + b)	220.217.379.526,00	216.446.049.883,00	98,29	(3.771.329.643,00)
2	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 2	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1 + 2)	220.267.379.526,00	216.496.049.883,00	98,29	(3.771.329.643,00)

Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp216.496.049.883,00 untuk belanja infrastruktur daerah Kabupaten Sumba Barat yang terdiri dari: Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp26.628.288.453,00, Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp47.685.204.516,00, Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi



sebesar Rp137.251.355.339,00, Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.169.403.353,00, Belanja pemeliharaan sebesar Rp3.711.798.222,00, Belanja hibah sebesar Rp50.000.000,00.

c). *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD Waikabubak dan Puskesmas, pembangunan gedung baru RSUD Waikabubak, rehabilitasi dan renovasi gedung puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD Waikabubak dan Puskesmas.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional di RSUD Waikabubak, RS Tingkat D Hobakalla, Puskesmas di Kabupaten Sumba Barat, Puskesmas pembantu, Poliklinik Desa, Pos Kesehatan Desa. Juga berdampak kepada tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan, dan petugas kesehatan lainnya yang berada di Kabupaten Sumba Barat .

Tabel 13 Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

NO	Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	BERTAMBAH (BERKURANG)
A.	Belanja pada Dinas Kesehatan, RSUD dan Rumah Sakit Pratama	143.634.889.680,00	139.152.597.963,00	96,88	(4.482.291.717)
	Belanja Operasi	115.775.756.561,00	111.812.797.979,00	96,58	3.962.958.582)
	Belanja Pegawai	38.331.723.987,00	36.764.441.940,00	95,91	(1.567.282.047,00)
	Belanja Barang dan Jasa	77.444.032.574,00	75.048.356.039,00	96,91	2.395.676.535,00)
	Belanja Modal	27.859.133.119,00	27.339.799.984,00	98,14	(519.333.135,00)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.221.786.669,00	15.704.913.234,00	96,81	(516.873.435,00)



NO	Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	BERTAMBAH (BERKURANG)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.393.346.450,00	11.392.604.750,00	99,99	(741.700,00)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	244.000.000,00	242.282.000,00	99,30	(1.718.000,00)
B.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain :	6.831.051.200,00	6.158.837.063,00	90,16	(672.214.137,00)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.831.051.200,00	6.158.837.063,00	90,16	(672.214.137,00)
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.831.051.200,00	6.158.837.063,00	90,16	(672.214.137,00)
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	61.459.200,00	60.549.600,00	98,52	(909.600,00)
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	56.989.700,00	44.828.650,00	78,66	(12.161.050,00)
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	38.499.900,00	36.009.900,00	93,53	(2.490.000,00)
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	38.499.700,00	38.499.700,00	100,00	-
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.233.614.200,00	2.132.023.238,00	95,45	(101.590.962,00)
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	397.719.400,00	396.519.400,00	99,70	(1.200.000,00)
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35.658.100,00	26.680.000,00	74,82	(8.978.100,00)
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100.879.500,00	68.515.000,00	67,92	(32.364.500,00)
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.823.731.700,00	3.311.212.075,00	86,60	(512.519.625,00)
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	43.999.800,00	43.999.500,00	100,00	(300,00)
C.	Anggaran Kesehatan (A+B)	150.465.940.880,00	145.311.435.026,00	96,57	(5.154.505.854,00)
D.	Total Belanja Daerah	816.522.055.441,00	785.796.094.430,00	96,24	(30.725.961.011,00)



NO	Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	BERTAMBAH (BERKURANG)
E.	Gaji dan Tunjangan ASN	169.743.125.927,00	166.342.323.970,00	98,00	(3.400.801.957,00)
F	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (D - E)	646.778.929.514,00	619.453.770.460,00	95,78	(27.325.159.054,00)
G.	Rasio anggaran Kesehatan (C : F) x 100 %	23,26	23,46		

Realisasi Anggaran Kesehatan sebesar Rp145.311.435.026,00 atau 23,46% dari total belanja daerah sebesar Rp785.796.094.430,00 dikurangi Gaji ASN sebesar Rp166.342.323.970,00 yang dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan, RSUD, dan Rumah Sakit Pratama sebesar Rp139.152.597.963,00, dan diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk program pembinaan keluarga berencana (KB) sebesar Rp6.158.837.063,00.

d). *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa. Adapun capaian dari *mandatory spending* ADD di wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah alokasi dana desa yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat desa, membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 14 *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
1	Total Belanja Daerah	816.522.055.441,00	785.796.094.430,00
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa	99.358.198.500,00	99.358.199.500,00
	a) Belanja Bagi Hasil	399.045.200,00	399.045.200,00
	b) Bantuan Keuangan	98.959.153.300,00	98.959.154.300,00
	a. ADD	39.209.115.300,00	39.209.116.300,00



	b. DANA DESA	59.750.038.000,00	59.750.038.000 ,00
3	Selisih (1 - 2)	717.163.856.941,00	686.437.894.930 ,00

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam APBD Induk dan Perubahan TA 2023 Kabupaten Sumba Barat dialokasikan sebesar Rp99.358.199.500,00, meliputi Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp399.045.200,00 dan Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa sebesar Rp98.959.154.300,00 yang terdiri dari, ADD sebesar Rp39.209.116.300,00 serta Dana Desa sebesar Rp59.750.038.000,00.

e). **Mandatory Spending Fungsi Penanganan Dampak Inflasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2023. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi adalah memberikan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi di wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Tabel 15 Penganggaran Penanggulangan Stunting

NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = (5:4x100)	7 = (5 - 4)	8
1	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS, RSUD WAIKABUBAK, RS PRATAMA HOBAKALA		70.601.446.864,00	66.675.231.690,00	94,44	(3.926.215.174,00)	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.562.041.500,00	10.463.249.751,00	99,06	(98.791.749,00)	
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.562.041.500,00	10.463.249.751,00	99,06	(98.791.749,00)	
		Pembangunan Puskesmas	735.000,00	735.000,00	100,00	0,00	DINKES
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	797.399.900,00	785.242.300,00	98,48	(12.157.600,00)	DINKES
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.456.790.800,00	7.456.790.800,00	100,00	0,00	DINKES
		Pengadaan Obat, Vaksin	323.758.000,00	315.570.200,00	97,47	(8.187.800,00)	DINKES



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.845.254.300,00	1.785.084.501,00	96,74	(60.169.799,00)	DINKES
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	138.103.500,00	119.826.950,00	86,77	(18.276.550,00)	DINKES
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.774.826.098,00	42.807.426.042,00	93,52	(2.967.400.056,00)	
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.533.030.363,00	21.249.836.036,00	98,68	(283.194.327,00)	
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	10.588.158.750,00	10.588.158.750,00	100,00	0,00	RSUD
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.995.646.869,00	6.995.646.869,00	100,00	0,00	RSUD
		Pengadaan Obat, Vaksin	3.000.000.000,00	2.997.014.796,00	99,90	(2.985.204,00)	RSUD
		Pengadaan Obat, Vaksin	829.134.560,00	601.081.221,00	72,50	(228.053.339,00)	RS HOBA-KALLA
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	120.090.184,00	67.934.400,00	56,57	(52.155.784,00)	RS HOBA-KALLA
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota	23.123.970.935,00	20.504.960.199,00	88,67	(2.619.010.736,00)	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	476.218.000,00	420.415.000,00	88,28	(55.803.000,00)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	216.500.000,00	108.000.000,00	49,88	(108.500.000,00)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.637.700,00	89.037.700,00	88,47	(11.600.000,00)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.178.473.600,00	2.023.842.900,00	92,90	(154.630.700,00)	DINKES



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	181.650.000,00	162.225.000,00	89,31	(19.425.000,00)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19.425.000,00	7.800.000,00	40,15	(11.625.000,00)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	79.098.800,00	76.328.800,00	96,50	(2.770.000,00)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	86.750.000,00	86.450.000,00	99,65	(300.000,00)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	99.800.000,00	99.800.000,00	100,00	0,00	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	49.998.700,00	44.298.700,00	88,60	(5.700.000,00)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	245.325.000,00	180.674.600,00	73,65	(64.650.400,00)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.000.000,00	48.722.250,00	97,44	(1.277.750,00)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	83.765.000,00	24.075.000,00	28,74	(59.690.000,00)	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	257.500.500,00	152.070.500,00	59,06	(105.430.000,00)	DINKES
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	876.545.900,00	808.955.900,00	92,29	(67.590.000,00)	DINKES
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	672.839.100,00	557.639.100,00	82,88	(115.200.000,00)	DINKES
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6.225.746.200,00	6.176.372.663,00	99,21	(49.373.537,00)	DINKES
		Operasional Pelayanan Puskesmas	8.296.842.015,00	7.207.829.955,00	86,87	(1.089.012.060,00)	DINKES
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	49.429.100,00	38.388.180,00	77,66	(11.040.920,00)	DINKES
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	315.200.000,00	274.748.725,00	87,17	(40.451.275,00)	DINKES
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	72.860.000,00	56.325.000,00	77,31	(16.535.000,00)	DINKES



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	316.575.320,00	230.585.455,00	72,84	(85.989.865,00)	RS HOBA-KALLA
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	563.926.400,00	458.335.953,00	81,28	(105.590.447,00)	RS HOBA-KALLA
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.608.864.600,00	1.172.038.818,00	72,85	(436.825.782,00)	RS HOBA-KALLA
		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	179.726.300,00	176.676.300,00	98,30	(3.050.000,00)	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	179.726.300,00	176.676.300,00	98,30	(3.050.000,00)	DINKES
		Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	938.098.500,00	875.953.507,00	93,38	(62.144.993,00)	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	938.098.500,00	875.953.507,00	93,38	(62.144.993,00)	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.108.526.666,00	2.934.488.377,00	94,40	(174.038.289,00)	
		Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.108.526.666,00	2.934.488.377,00	94,40	(174.038.289,00)	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.277.038.300,00	2.150.472.840,00	94,44	(126.565.460,00)	DINKES
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	831.488.366,00	784.015.537,00	94,29	(47.472.829,00)	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.984.575.200,00	9.501.221.680,00	95,16	(483.353.520,00)	



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.687.750.800,00	9.252.165.000,00	95,50	(435.585.800,00)	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	8.651.500.000,00	8.493.000.000,00	98,17	(158.500.000,00)	RSUD
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.036.250.800,00	759.165.000,00	73,26	(277.085.800,00)	RS HOBA-KALLA
		Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	296.824.400,00	249.056.680,00	83,91	(47.767.720,00)	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	249.238.000,00	238.346.680,00	95,63	(10.891.320,00)	DINKES
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.586.400,00	10.710.000,00	22,51	(36.876.400,00)	RS HOBA-KALLA
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	214.009.100,00	202.291.380,00	94,52	(11.717.720,00)	
		Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	214.009.100,00	202.291.380,00	94,52	(11.717.720,00)	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObat Tradisional (UMOT)	100.000.000,00	95.702.900,00	95,70	(4.297.100,00)	DINKES



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	114.009.100,00	106.588.480,00	93,49	(7.420.620,00)	DINKES
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	957.468.300,00	766.554.460,00	80,06	(190.913.840,00)	
		Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab./Kota	680.573.000,00	501.654.060,00	73,71	(178.918.940,00)	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	680.573.000,00	501.654.060,00	73,71	(178.918.940,00)	DINKES
		Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.324.800,00	145.470.400,00	94,26	(8.854.400,00)	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	154.324.800,00	145.470.400,00	94,26	(8.854.400,00)	DINKES
		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.570.500,00	119.430.000,00	97,44	(3.140.500,00)	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	122.570.500,00	119.430.000,00	97,44	(3.140.500,00)	DINKES
2	DINAS PENDIDIKAN		6.072.686.743,00	5.683.949.467,00	93,60	(388.737.276,00)	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	6.072.686.743,00	5.683.949.467,00	93,60	(388.737.276,00)	



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2.435.512.207,00	2.351.897.367,00	96,57	(83.614.840,00)	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	112.275.343,00	35.932.603,00	32,00	(76.342.740,00)	DPKO
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.266.303.431,00	2.259.031.331,00	99,68	(7.272.100,00)	DPKO
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	56.933.433,00	56.933.433,00	100,00	-	DPKO
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.692.957.136,00	2.671.101.400,00	99,19	(21.855.736,00)	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	878.865.000,00	878.826.200,00	100,00	(38.800,00)	DPKO
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.708.863.436,00	1.689.665.900,00	98,88	(19.197.536,00)	DPKO
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	105.228.700,00	102.609.300,00	97,51	(2.619.400,00)	DPKO
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	944.217.400,00	660.950.700,00	70,00	(283.266.700,00)	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	944.217.400,00	660.950.700,00	70,00	(283.266.700,00)	DPKO
3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, P3A		10.086.551.900,00	9.124.228.220,00	90,46	(962.323.680,00)	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	458.869.600,00	399.435.470,00	87,05	(59.434.130,00)	
		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	288.522.800,00	240.468.970,00	83,34	(48.053.830,00)	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	187.547.800,00	169.373.970,00	90,31	(18.173.830,00)	
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	100.975.000,00	71.095.000,00	70,41	(29.880.000,00)	



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	170.346.800,00	158.966.500,00	93,32	(11.380.300,00)	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	149.999.500,00	146.941.500,00	97,96	(3.058.000,00)	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.347.300,00	12.025.000,00	59,10	(8.322.300,00)	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	611.810.500,00	511.600.685,00	83,62	(100.209.815,00)	
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	198.996.200,00	174.939.640,00	87,91	(24.056.560,00)	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	57.765.300,00	53.146.760,00	92,00	(4.618.540,00)	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	141.230.900,00	121.792.880,00	86,24	(19.438.020,00)	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	208.360.000,00	202.106.345,00	97,00	(6.253.655,00)	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	208.360.000,00	202.106.345,00	97,00	(6.253.655,00)	



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204.454.300,00	134.554.700,00	65,81	(69.899.600,00)	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.913.400,00	13.650.900,00	27,35	(36.262.500,00)	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	154.540.900,00	120.903.800,00	78,23	(33.637.100,00)	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	477.958.900,00	443.339.250,00	92,76	(34.619.650,00)	
		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	349.714.100,00	334.525.950,00	95,66	(15.188.150,00)	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	349.714.100,00	334.525.950,00	95,66	(15.188.150,00)	
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	128.244.800,00	108.813.300,00	84,85	(19.431.500,00)	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab./Kota	65.720.000,00	52.877.400,00	80,46	(12.842.600,00)	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab./Kota	62.524.800,00	55.935.900,00	89,46	(6.588.900,00)	



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	89.798.200,00	82.480.700,00	91,85	(7.317.500,00)	
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	89.798.200,00	82.480.700,00	91,85	(7.317.500,00)	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	89.798.200,00	82.480.700,00	91,85	(7.317.500,00)	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.617.063.500,00	1.528.535.052,00	94,53	(88.528.448,00)	
		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.410.726.300,00	1.329.724.420,00	94,26	(81.001.880,00)	
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	1.213.390.000,00	1.198.229.100,00	98,75	(15.160.900,00)	
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	38.436.300,00	34.470.500,00	89,68	(3.965.800,00)	
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	158.900.000,00	97.024.820,00	61,06	(61.875.180,00)	
		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab./Kota	206.337.200,00	198.810.632,00	96,35	(7.526.568,00)	



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	78.185.400,00	75.322.400,00	96,34	(2.863.000,00)	
		Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	50.697.000,00	47.867.000,00	94,42	(2.830.000,00)	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	37.773.100,00	37.623.100,00	99,60	(150.000,00)	
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	39.681.700,00	37.998.132,00	95,76	(1.683.568,00)	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.831.051.200,00	6.158.837.063,00	90,16	(672.214.137,00)	
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	156.948.800,00	141.388.150,00	90,09	(15.560.650,00)	
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	61.459.200,00	60.549.600,00	98,52	(909.600,00)	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	56.989.700,00	44.828.650,00	78,66	(12.161.050,00)	
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	38.499.900,00	36.009.900,00	93,53	(2.490.000,00)	
		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.669.833.300,00	2.567.042.338,00	96,15	(102.790.962,00)	
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	38.499.700,00	38.499.700,00	100,00	0,00	



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.233.614.200,00	2.132.023.238,00	95,45	(101.590.962,00)	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	397.719.400,00	396.519.400,00	99,70	(1.200.000,00)	
		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	136.537.600,00	95.195.000,00	69,72	(41.342.600,00)	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35.658.100,00	26.680.000,00	74,82	(8.978.100,00)	
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100.879.500,00	68.515.000,00	67,92	(32.364.500,00)	
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.867.731.500,00	3.355.211.575,00	86,75	(512.519.925,00)	
		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.823.731.700,00	3.311.212.075,00	86,60	(512.519.625,00)	
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	43.999.800,00	43.999.500,00	100,00	(300,00)	
4	DINAS SOSIAL		1.546.145.300,00	1.438.184.277,00	93,02	(107.961.023,00)	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	289.191.900,00	282.594.917,00	97,72	(6.596.983,00)	
		Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	43.837.800,00	41.287.800,00	94,18	(2.550.000,00)	



NO	OPD	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	43.837.800,00	41.287.800,00	94,18	(2.550.000,00)	
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	245.354.100,00	241.307.117,00	98,35	(4.046.983,00)	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	124.500.000,00	124.171.300,00	99,74	(328.700,00)	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.854.100,00	15.204.100,00	80,64	(3.650.000,00)	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	102.000.000,00	101.931.717,00	99,93	(68.283,00)	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.256.953.400,00	1.155.589.360,00	91,94	(101.364.040,00)	
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.256.953.400,00	1.155.589.360,00	91,94	(101.364.040,00)	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	377.780.200,00	351.830.320,00	93,13	(25.949.880,00)	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	316.000.000,00	280.239.140,00	88,68	(35.760.860,00)	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	563.173.200,00	523.519.900,00	92,96	(39.653.300,00)	
		TOTAL	1.546.145.300,00	1.438.184.277,00	93,02	(107.961.023,00)	



Tabel 16 Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Masyarakat

NO	LOKASI		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6 = (5:4x100)	7 = (5 - 4)	8
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		406.497.500,00	360.830.700,00	88,77	(45.666.800,00)	
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	57.003.200,00	56.123.200,00	98,46	(880.000,00)	
		Sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	17.153.500,00	16.383.500,00	95,51	(770.000,00)	DISTAN-KP
		Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	29.850.000,00	29.740.000,00	99,63	(110.000,00)	DISTAN-KP
		Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	9.999.700,00	9.999.700,00	100,00	-	DISTAN-KP
		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	340.008.000,00	295.221.200,00	86,83	(44.786.800,00)	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	340.008.000,00	295.221.200,00	86,83	(44.786.800,00)	DISTAN-KP
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	9.486.300,00	9.486.300,00	100,00	0,00	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	9.486.300,00	9.486.300,00	100,00	0,00	DISTAN-KP
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		394.841.000,00	393.447.000,00	99,65	(1.394.000,00)	
		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab./Kota	394.841.000,00	393.447.000,00	99,65	(1.394.000,00)	



NO	LOKASI		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN					
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	394.841.000,00	393.447.000,00	99,65	(1.394.000,00)	DISTAN-KP
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		15.277.200,00	15.277.200,00	100,00	0,00	
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	15.277.200,00	15.277.200,00	100,00	0,00	
		Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15.277.200,00	15.277.200,00	100,00	0,00	DISTAN-KP
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		2.255.515.800,00	2.149.013.314,00	95,28	(106.502.486,00)	
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.255.515.800,00	2.149.013.314,00	95,28	(106.502.486,00)	
		Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.255.515.800,00	2.149.013.314,00	95,28	(106.502.486,00)	DISTAN-KP
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		2.264.038.340,00	2.245.656.551,00	99,19	(18.381.789,00)	
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	446.920.640,00	430.173.593,00	96,25	(16.747.047,00)	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	346.922.740,00	330.287.590,00	95,20	(16.635.150,00)	DISTAN-KP
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	99.997.900,00	99.886.003,00	99,89	(111.897,00)	PETERNAKAN



NO	LOKASI		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN					
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	1.817.117.700,00	1.815.482.958,00	99,91	(1.634.742,00)	
		Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	DISTAN-KP
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00	DISTAN-KP
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00	DISTAN-KP
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	881.268.000,00	881.268.000,00	100,00	0,00	DISTAN-KP
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	95.849.700,00	94.214.958,00	98,29	(1.634.742,00)	PETERNAKAN
	TOTAL		5.336.169.840,00	5.164.224.765,00	96,78	(171.945.075,00)	



Tabel 17 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	$5 = (4:3 \times 100)$	$6 = (4 - 3)$	7
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.805.089.300	6.656.388.041	97,81	(148.701.259)	
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.255.515.800	2.149.013.314	95,28	(106.502.486)	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.255.515.800	2.149.013.314	95,28	(106.502.486)	DISTAN - KP
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab./Kota	1.798.586.000	1.798.586.000	100,00	0,00	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.798.586.000	1.798.586.000	100,00	0,00	PETERNAKAN
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.586.689.600	1.568.741.638	98,87	(17.947.962)	
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	1.586.689.600	1.568.741.638	98,87	(17.947.962)	PETERNAKAN
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.164.297.900	1.140.047.089	97,92	(24.250.811)	
	Sub kegiatan Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	798.877.100	788.462.100	98,70	(10.415.000)	PETERNAKAN
	Sub kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	265.424.800	251.840.099	94,88	(13.584.701)	PETERNAKAN
	Sub kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	99.996.000	99.744.890	99,75	(251.110)	PETERNAKAN
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.379.556.240	2.360.117.323	99,18	(19.438.917)	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	446.920.640	430.173.593	96,25	(16.747.047)	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	346.922.740	330.287.590	95,20	(16.635.150)	DISTAN - KP
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	99.997.900	99.886.003	99,89	(111.897)	PETERNAKAN
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	1.817.117.700	1.815.482.958	99,91	(1.634.742)	
	Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	200.000.000	200.000.000	100,00	0,00	DISTAN - KP
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	240.000.000	240.000.000	100,00	0,00	DISTAN - KP
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	400.000.000	400.000.000	100,00	0,00	DISTAN - KP
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	881.268.000	881.268.000	100,00	0,00	DISTAN - KP
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	95.849.700	94.214.958	98,29	(1.634.742)	PETERNAKAN
	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	115.517.900	114.460.772	99,08	(1.057.128)	
	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	115.517.900	114.460.772	99,08	(1.057.128)	PETERNAKAN
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	548.690.500	481.597.268	87,77	(67.093.232)	DINAS PETRENAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	449.491.100	390.984.720	86,98	(58.506.380)	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	149.504.500	135.934.500	90,92	(13.570.000)	PETERNAKAN



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.988.000	119.156.823	79,44	(30.831.177)	PETERNAKAN
	Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	149.998.600	135.893.397	90,60	(14.105.203)	PETERNAKAN
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	49.201.100	49.201.100	100,00	0,00	
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	49.201.100	49.201.100	100,00	0,00	PETERNAKAN
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	49.998.300	41.411.448	82,83	(8.586.852)	
	Sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	49.998.300	41.411.448	82,83	(8.586.852)	PETERNAKAN
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	559.981.600	481.314.590	85,95	(78.667.010)	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	434.991.200	356.614.490	81,98	(78.376.710)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	24.995.000	24.645.000	98,60	(350.000)	PERIKANAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	379.998.700	328.961.990	86,57	(51.036.710)	PERIKANAN
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	29.997.500	3.007.500	10,03	(26.990.000)	PERIKANAN
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	124.990.400	124.700.100	99,77	(290.300)	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	74.993.300	74.993.300	100,00	0,00	
	Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	49.997.100	49.706.800	99,42	(290.300)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.544.903.030	1.482.861.733	95,98	(62.041.297)	DINAS PERIKANAN



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.959.000	8.669.000	57,95	(6.290.000)	
	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	14.959.000	8.669.000	57,95	(6.290.000)	PERIKANAN
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	174.999.550	161.879.550	92,50	(13.120.000)	
	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	124.999.550	111.879.550	89,50	(13.120.000)	PERIKANAN
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000	50.000.000	100,00	0,00	PERIKANAN
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.518.800	8.103.800	85,13	(1.415.000)	
	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.518.800	8.103.800	85,13	(1.415.000)	PERIKANAN
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.345.425.680	1.304.209.383	96,94	(41.216.297)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.999.500	75.591.000	75,59	(24.408.500)	PERIKANAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.245.426.180	1.228.618.383	98,65	(16.807.797)	
6	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	202.879.500	202.751.750	99,94	(127.750)	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	202.879.500	202.751.750	99,94	(127.750)	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	202.879.500	202.751.750	99,94	(127.750)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	319.852.600	302.028.600	94,43	(17.824.000)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.995.800	56.362.800	93,94	(3.633.000)	
	Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	59.995.800	56.362.800	93,94	(3.633.000)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	86.007.000	81.301.000	94,53	(4.706.000)	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	86.007.000	81.301.000	94,53	(4.706.000)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	173.849.800	164.364.800	94,54	(9.485.000)	
	Sub kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	173.849.800	164.364.800	94,54	(9.485.000)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	758.863.200	748.239.347	98,60	(10.623.853)	
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	758.863.200	748.239.347	98,60	(10.623.853)	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.591.900	72.291.900	99,59	(300.000)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Sub kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	426.859.100	426.401.100	99,89	(458.000)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	109.795.000	99.929.147	91,01	(9.865.853)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	Sub kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	48.713.000	48.713.000	100,00	0,00	
	Sub kegiatan Pelatihan Transmigrasi	100.904.200	100.904.200	100,00	0,00	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	340.175.700	340.172.650	100,00	(3.050)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	340.175.700	340.172.650	100,00	(3.050)	
	Sub kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	93.719.900	93.719.900	100,00	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	246.455.800	246.452.750	100,00	(3.050)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.070.649.256	10.064.470.982	99,94	(6.178.274)	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	10.070.649.256	10.064.470.982	99,94	(6.178.274)	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	85.499.179	85.425.779	99,91	(73.400)	PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	9.635.150.077	9.629.107.745	99,94	(6.042.332)	PUPR
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	350.000.000	349.937.458	99,98	(62.542)	PUPR
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.812.375.456	14.445.829.404	91,36	(1.366.546.052)	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.812.375.456	14.445.829.404	91,36	(1.366.546.052)	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	483.448.000	378.352.120	78,26	(105.095.880)	PUPR
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM	373.885.056	373.883.990	100,00	(1.066)	PUPR
	Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.440.787.100	5.440.753.100	100,00	(34.000)	PUPR
	Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.858.427.800	5.029.330.268	85,85	(829.097.532)	PUPR
	Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan	870.625.900	567.965.900	65,24	(302.660.000)	PUPR
	Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	551.500.600	551.189.600	99,94	(311.000)	PUPR
	Perluasan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan	977.214.000	977.214.000	100,00	0,00	PUPR
	Perluasan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	300.000.000	299.487.000	99,83	(513.000)	PUPR
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	49.999.000	49.989.000	99,98	(10.000)	PUPR
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	493.988.000	365.599.826	74,01	(128.388.174)	PUPR
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	231.250.000	231.238.800	100,00	(11.200)	PUPR
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	181.250.000	180.825.800	99,77	(424.200)	PUPR
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.935.005.100	6.934.835.100	100,00	(170.000)	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./Kota	6.935.005.100	6.934.835.100	100,00	(170.000)	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	6.885.600.000	6.885.475.000	100,00	(125.000)	PUPR
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	49.405.100	49.360.100	99,91	(45.000)	PUPR



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
13	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	797.663.250	769.743.970	96,50	(27.919.280)	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	323.000.950	307.391.390	95,17	(15.609.560)	
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	323.000.950	307.391.390	95,17	(15.609.560)	PERKIMTAN
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	211.176.300	205.472.040	97,30	(5.704.260)	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	36.650.000	35.881.000	97,90	(769.000)	PERKIMTAN
	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	174.526.300	169.591.040	97,17	(4.935.260)	PERKIMTAN
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	263.486.000	256.880.540	97,49	(6.605.460)	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	80.736.000	79.281.200	98,20	(1.454.800)	PERKIMTAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	60.000.000	56.198.940	93,66	(3.801.060)	PERKIMTAN
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	122.750.000	121.400.400	98,90	(1.349.600)	PERKIMTAN
14	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	417.600.000	415.568.400	99,51	(2.031.600)	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	417.600.000	415.568.400	99,51	(2.031.600)	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	385.800.000	384.343.400	99,62	(1.456.600)	PERKIMTAN
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	31.800.000	31.225.000	98,19	(575.000)	PERKIMTAN



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
15	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	60.981.180.080	56.908.992.653	93,32	(4.072.187.427)	
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	29.238.115.541	27.228.478.136	93,13	(2.009.637.405)	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	543.977.960	543.977.960	100,00	0,00	DPKO
	Pembangunan RuangGuru/Kepala Sekolah/TU	644.700.460	636.675.461	98,76	(8.024.999)	DPKO
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	112.275.343	35.932.603	32,00	(76.342.740)	DPKO
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	257.685.965	25.479.100	9,89	(232.206.865)	DPKO
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.266.303.431	2.259.031.331	99,68	(7.272.100)	DPKO
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	837.635.905	829.635.905	99,04	(8.000.000)	DPKO
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.686.785.176	4.684.511.625	99,95	(2.273.551)	DPKO
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	422.131.780	407.448.357	96,52	(14.683.423)	DPKO
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	267.518.095	264.475.102	98,86	(3.042.993)	DPKO
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.127.368.856	1.114.694.838	98,88	(12.674.018)	DPKO
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah	56.933.433	56.933.433	100,00	0,00	DPKO
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	626.819.227	621.523.750	99,16	(5.295.477)	DPKO
	Pengadaan Mebel Sekolah	149.850.000	149.850.000	100,00	0,00	DPKO
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	750.000.000	750.000.000	100,00	0,00	DPKO
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	338.574.500	292.801.191	86,48	(45.773.309)	DPKO



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000	300.000.000	100,00	0,00	DPKO
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	474.400.300	445.383.242	93,88	(29.017.058)	DPKO
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	436.855.000	296.057.637	67,77	(140.797.363)	DPKO
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	11.564.808.145	10.236.883.173	88,52	(1.327.924.972)	DPKO
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	76.535.000	66.477.282	86,86	(10.057.718)	DPKO
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.296.956.965	3.210.706.146	97,38	(86.250.819)	DPKO
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.828.929.139	21.320.859.945	93,39	(1.508.069.194)	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	878.865.000	878.826.200	100,00	(38.800)	DPKO
	Pembangunan Laboratorium	5.323.696.800	5.281.315.500	99,20	(42.381.300)	DPKO
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	1.431.318.100	1.431.230.042	99,99	(88.058)	DPKO
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.708.863.436	1.689.665.900	98,88	(19.197.536)	DPKO
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	544.180.100	544.180.100	100,00	0,00	DPKO
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	304.134.700	304.134.700	100,00	0,00	DPKO
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	105.228.700	102.609.300	97,51	(2.619.400)	DPKO
	Pengadaan Mebel Sekolah	449.514.600	449.514.600	100,00	0,00	DPKO
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.907.521.102	9.045.778.901	91,30	(861.742.201)	DPKO
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	430.984.900	364.010.088	84,46	(66.974.812)	DPKO
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	450.295.001	418.375.000	92,91	(31.920.001)	DPKO



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	502.338.800	355.689.114	70,81	(146.649.686)	DPKO
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	791.987.900	455.530.500	57,52	(336.457.400)	DPKO
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.291.644.400	7.857.262.429	94,76	(434.381.971)	
	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	787.275.400	768.805.400	97,65	(18.470.000)	DPKO
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	944.217.400	660.950.700	70,00	(283.266.700)	DPKO
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	178.000.000	178.000.000	100,00	0,00	DPKO
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5.621.178.000	5.532.213.850	98,42	(88.964.150)	DPKO
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	49.800.000	41.050.000	82,43	(8.750.000)	DPKO
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	203.507.200	174.238.199	85,62	(29.269.001)	DPKO
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	507.666.400	502.004.280	98,88	(5.662.120)	DPKO
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	143.710.000	111.912.350	77,87	(31.797.650)	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	143.710.000	111.912.350	77,87	(31.797.650)	DPKO
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	478.781.000	390.479.793	81,56	(88.301.207)	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	478.781.000	390.479.793	81,56	(88.301.207)	DPKO
16	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	611.810.500	511.600.685	83,62	(100.209.815)	
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	198.996.200	174.939.640	87,91	(24.056.560)	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	57.765.300	53.146.760	92,00	(4.618.540)	DINAS DP5A
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	141.230.900	121.792.880	86,24	(19.438.020)	DINAS DP5A
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	208.360.000	202.106.345	97,00	(6.253.655)	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	208.360.000	202.106.345	97,00	(6.253.655)	DINAS DP5A
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204.454.300	134.554.700	65,81	(69.899.600)	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.913.400	13.650.900	27,35	(36.262.500)	DINAS DP5A
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	154.540.900	120.903.800	78,23	(33.637.100)	DINAS DP5A
17	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	477.958.900	443.339.250	92,76	(34.619.650)	
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	349.714.100	334.525.950	95,66	(15.188.150)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	349.714.100	334.525.950	95,66	(15.188.150)	DINAS DP5A
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	128.244.800	108.813.300	84,85	(19.431.500)	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.720.000	52.877.400	80,46	(12.842.600)	DINAS DP5A



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.524.800	55.935.900	89,46	(6.588.900)	DINAS DP5A
18	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	89.798.200	82.480.700	91,85	(7.317.500)	
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	89.798.200	82.480.700	91,85	(7.317.500)	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	89.798.200	82.480.700	91,85	(7.317.500)	DINAS DP5A
19	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.831.051.200	6.158.837.063	90,16	(672.214.137)	
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	156.948.800	141.388.150	90,09	(15.560.650)	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	61.459.200	60.549.600	98,52	(909.600)	DINAS DP5A
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	56.989.700	44.828.650	78,66	(12.161.050)	DINAS DP5A
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	38.499.900	36.009.900	93,53	(2.490.000)	DINAS DP5A
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.669.833.300	2.567.042.338	96,15	(102.790.962)	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	38.499.700	38.499.700	100,00	0,00	DINAS DP5A
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.233.614.200	2.132.023.238	95,45	(101.590.962)	DINAS DP5A
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	397.719.400	396.519.400	99,70	(1.200.000)	DINAS DP5A



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	136.537.600	95.195.000	69,72	(41.342.600)	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35.658.100	26.680.000	74,82	(8.978.100)	DINAS DP5A
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100.879.500	68.515.000	67,92	(32.364.500)	DINAS DP5A
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.867.731.500	3.355.211.575	86,75	(512.519.925)	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.823.731.700	3.311.212.075	86,60	(512.519.625)	DINAS DP5A
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	43.999.800	43.999.500	100,00	(300)	DINAS DP5A
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	289.191.900	282.594.917	97,72	(6.596.983)	
	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	43.837.800	41.287.800	94,18	(2.550.000)	
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	43.837.800	41.287.800	94,18	(2.550.000)	DINAS SOSIAL
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	245.354.100	241.307.117	98,35	(4.046.983)	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	124.500.000	124.171.300	99,74	(328.700)	DINAS SOSIAL
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.854.100	15.204.100	80,64	(3.650.000)	DINAS SOSIAL
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	102.000.000	101.931.717	99,93	(68.283)	DINAS SOSIAL
21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.266.953.400	1.155.589.360	91,21	(111.364.040)	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.266.953.400	1.155.589.360	91,21	(111.364.040)	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	387.780.200	351.830.320	90,73	(35.949.880)	DINAS SOSIAL
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	316.000.000	280.239.140	88,68	(35.760.860)	DINAS SOSIAL
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	563.173.200	523.519.900	92,96	(39.653.300)	DINAS SOSIAL
	TOTAL	118.041.228.912	111.229.353.786	94,23	(6.811.875.126)	

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Dampak Inflasi dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Sumba Barat dialokasikan senilai Rp199.315.172.205,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp211.684.229.559,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Penanggulangan Stunting sebesar Rp82.921.593.654,00 dari anggaran sebesar Rp88.306.830.807,00
2. Realisasi Belanja Ketahanan Pangan sebesar Rp5.164.224.765,00 dari anggaran sebesar Rp5.336.169.840,00
3. Realisasi Belanja Kemiskinan Ekstrim sebesar Rp111.229.353.786,00 dari anggaran sebesar Rp118.041.228.912,00

f). *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023. Alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 paling sedikit 1 % dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat memiliki kegiatan berupa Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Sumba Barat memiliki 1 Inspektur, 5 Inspektur Pembantu dan 16 auditor yang melakukan tugas pengawasan.

Tabel 18 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	816.522.055.441,00	785.796.094.430,00	96,24
A	INSPEKTORAT			
1	BELANJA OPERASI	6.600.188.352,00	6.120.133.467,00	92,73
	a. Belanja Pegawai	2.106.734.257,00	2.105.654.623,00	100,23
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.499.454.095,00	4.014.478.844,00	89,22
2	BELANJA MODAL	337.260.300,00	334.739.100,00	99,25
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin'	138.660.300,00	135.939.100,00	98,18
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.800.000,00	198.800.000,00	100,00
	Total Belanja Inspektorat	6.943.648.652,00	6.454.872.567,00	93,04
	Fungsi Pengawasan	3.740.455.555,00	3.411.709.751,00	91,21
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.229.730.555,00	3.039.632.251,00	94,11
	1) Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	1.288.612.555	1.187.110.681,00	92,12
	2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	326.500.000	321.525.000,00	98,48
	3) Review Laporan Kinerja	212.385.000	187.931.300,00	88,49
	4) Review Laporan Keuangan	121.710.000	121.710.000,00	100,00



No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	5) Pengawasan Desa	351.000.000	330.550.000,00	94,17
	6) Kerjasama Pengawasan Internal	301.320.000,00	274.120.000,00	90,97
	7) Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	628.203.000,00	616.685.270,00	98,17
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	262.090.000,00	219.900.000,00	83,90
	1) Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah	71.560.000,00	71.560.000,00	100,00
	2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	190.530.000,00	148.340.000,00	77,86
	Pendampingan dan Asistensi	248.635.000,00	152.177.500,00	61,21
	1) Pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	53.900.000,00	53.900.000,00	100,00
	2) koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	194.735.000,00	98.277.500,00	50,47
	Alokasi Belanja APIP pada Pagu INSPEKTORAT	0,85	0,82	

Mandatory spending fungsi pengawasan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan terdapat pada Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD TA 2023 Kabupaten Sumba Barat dialokasikan senilai sebesar 0,82%. Realisasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Sumba Barat dialokasikan senilai Rp6.600.188.352,00 dan realisasi belanja fungsi pengawasan senilai Rp6.120.133.467,00.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA APBD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja APBD

Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya kenaikan dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya dimana berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Oleh karena itu, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dengan realisasi pendapatan Dana Insentif Fiskal tersebut sebesar Rp30.066.851.000,00 atau 100 % dari target sebesar Rp30.066.851.000,00.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp791.690.893.700,00, terealisasi sebesar Rp799.010.701.167,26 atau 100,92%.

Sedangkan realisasi belanja secara keseluruhan sebesar Rp785.796.094.430,00 atau 96,24% dari anggaran sebesar Rp816.522.055.441,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp473.703.643.269,00 atau 94,70% dari anggaran sebesar Rp500.193.754.815,00.
- Belanja Modal terealisasi sebesar Rp212.734.251.661,00 atau 98,30% dari anggaran sebesar Rp216.421.587.126,00



- Belanja Tak Terduga, terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp548.515.000,00.
- Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp99.358.199.500,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp99.358.198.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, terealisasi sebesar Rp399.045.200,00 atau 100 %.
 2. Alokasi Dana Desa terealisasi sebesar Rp39.209.116.300,00 atau 100,00 % ;dan
 3. Dana Desa terealisasi sebesar Rp59.750.038.000,00 atau 100,00%, yang terdiri dari desa-desa yang tersebar pada :
 - 1) Kecamatan Tana Righu sebesar Rp16.258.523.000,00
 - 2) Kecamatan Loli sebesar Rp 8.435.503.000,00
 - 3) Kecamatan Wanokaka sebesar Rp12.378.161.000,00
 - 4) Kecamatan Lamboya sebesar Rp10.619.094.000,00
 - 5) Kecamatan Kota Waikabubak sebesar Rp 7.350.352.000,00
 - 6) Kecamatan Laboya Barat sebesar Rp 4.708.405.000,00

3.2. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 antara lain :

- Kurangnya pemahaman bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan pengurus barang perangkat daerah/unit kerja tentang pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal pencatatan akuntansi dan penatausahaan serta pengelolaan aset perangkat daerah/unit kerja.
- Adanya perubahan regulasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aplikasi yang digunakan untuk penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.
- Dalam penatausahaan dan pelaporan aset masih dilakukan secara manual dengan menggunakan *Microsoft Excel* dan belum menggunakan aplikasi, sehingga pelaporan barang dan aset menjadi terlambat dilaporkan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang terdiri dari 37 Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyajikan saldo Akun-Akun Tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK-RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional.



Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual. Dengan demikian Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi aturan-aturan, dan praktek yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, secara ringkas sebagai berikut:

1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- Pendapatan-LRA;
- Belanja;



- Transfer;
- Surplus atau defisit;
- Penerimaan pembiayaan;
- Pengeluaran pembiayaan;
- Pembiayaan neto; dan
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

2) LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut :

- Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu;
- Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA);
- Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
- Lain-lain; dan
- Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.

3) NERACA

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- kas dan setara kas;
- investasi jangka pendek;
- piutang;
- persediaan;
- investasi jangka panjang;
- aset tetap;
- kewajiban jangka pendek;
- kewajiban jangka panjang;
- ekuitas.



4) LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO;
- b. Beban;
- c. Surplus/Defisit dari Operasi;
- d. Kegiatan Non Operasional;
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f. Pos Luar Biasa;
- g. Surplus/Defisit-LO.

5) LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

6) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Struktur dan isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya (jika ada);
- Koreksi nilai piutang (jika ada);
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap (jika ada);
- Selisih revaluasi nilai aset lainnya (jika ada);
- Koreksi nilai beban dibayar dimuka (jika ada);
- Selisih revaluasi investasi non permanen (jika ada);
- Selisih revaluasi investasi permanen (jika ada);
- Koreksi nilai dana cadangan (jika ada);
- Koreksi nilai utang (jika ada);
- Lain-lain;



- Kewajiban untuk dikonsolidasikan (khusus untuk Laporan Perubahan Ekuitas Perangkat Daerah/Unit Kerja);
- Ekuitas akhir.

7) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



B. KEBIJAKAN AKUN :

1) KAS DAN SETARA KAS :

➤ RUANG LINGKUP

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.

➤ PENGAKUAN

1. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

➤ PENGUKURAN

1. Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal.

➤ PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain:
 - Saldo Kas di Kas Daerah;
 - Saldo Kas di Bendahara Penerimaan;
 - Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
 - Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) milik Pemerintah Daerah; dan
 - Saldo kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2) PIUTANG

➤ PENGAKUAN

1. Pengakuan Piutang berdasarkan pungutan;
2. Pencatatan pengakuan piutang pada prinsipnya dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut:



- a. pengakuan piutang dicatat (bertambah) pada setiap kali timbulnya hak tagih pemda berdasarkan peraturan/dokumen yang sah, dan berkurang pada setiap kali diterima pembayarannya; atau
 - b. pengakuan piutang hanya dicatat sekali pada akhir tahun saja, yaitu sebesar selisih kurang antara jumlah keseluruhan hak tagih pemda berdasarkan peraturan/dokumen yang sah selama tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah pembayarannya yang telah diterima selama tahun yang bersangkutan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.

➤ **PENGUKURAN**

1. Pengukuran piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan
2. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
3. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d. Kualitas Piutang Macet.

➤ **PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH**

1. Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);



- c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

➤ **PEMBERHENTIAN PENGAKUAN**

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

➤ **PENGUNGKAPAN**

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;



- c. penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

3) PERSEDIAAN

➤ PENGAKUAN

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan/atau saldo administrasi dimana pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual dan periodik.

➤ PENGUKURAN

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- a. Metode Perpetual
- b. Metode Periodik

➤ PENILAIAN

Penilaian persediaan menggunakan metode *FIFO (First In First Out)*. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

➤ PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

4) INVESTASI

➤ PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi

➤ PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



A) INVESTASI JANGKA PENDEK

➤ PENGAKUAN

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, Bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

➤ PENGUKURAN

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

➤ PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi jangka pendek;
- c. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

B) INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

➤ PENGAKUAN

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.



➤ **PENGUKURAN**

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

➤ **Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang**

1. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
 - a. Metode biaya
 - b. Metode ekuitas
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
2. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

5) ASET TETAP

➤ **PENGAKUAN ASET TETAP**

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;



- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
dan
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

➤ **Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin.
- b. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

➤ **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

➤ **PENILAIAN AWAL ASET TETAP**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



➤ **PEROLEHAN SECARA GABUNGAN**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

➤ **ASET TETAP DIGUNAKAN BERSAMA**

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

➤ **ASET PERJANJIAN KERJASAMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM**

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

➤ **PERTUKARAN ASET (*EXCHANGE OF ASSETS*)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

➤ **ASET DONASI**

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.



➤ **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)**

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki; dan
- b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

➤ **PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

➤ **PENYUSUTAN**

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yaitu menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Rumusan tersebut adalah :



$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusut}}{\text{Masa manfaat}}$$

- **PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)**

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP**

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.
- **Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- **PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**
 1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.



➤ **PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

➤ **PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

Suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomis dimasa depan, ataupun sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6) DANA CADANGAN

➤ **PENAKUAN**

Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

➤ **PENGUKURAN**

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

➤ **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non lancar.



7) ASET LAINNYA

➤ PENGAKUAN

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau penguasaannya berpindah.

➤ PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
5. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan



dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

6. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

➤ **PENGUNGKAPAN**

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
4. Informasi lainnya yang penting.

8) KEWAJIBAN

➤ **PENGAKUAN**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

➤ **PENGUKURAN**

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

➤ **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;



- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - i. Pengurangan pinjaman;
 - ii. Modifikasi persyaratan utang;
 - iii. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - iv. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - f. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - g. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
2. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

9) EKUITAS

➤ DEFINISI

- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

10) PENDAPATAN-LRA

➤ PENGAKUAN

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.



- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/Perangkat Daerah/Unit Kerja dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

➤ **PENGUKURAN**

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

➤ **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

11) PENDAPATAN-LO

➤ **PENGAKUAN**

Secara umum pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau



- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

➤ **PENGUKURAN**

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

➤ **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

12) BELANJA

➤ **PENGAKUAN**

1. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - c. Khusus pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah diakui saat terbitnya SP2B.
 - d. Khusus pengeluaran untuk BLUD diakui saat terbitnya SP2B.
2. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Lain-Lain PAD yang sah.



➤ **PENGUKURAN**

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

➤ **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

13) BEBAN

➤ **PENGAKUAN**

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:



- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.



➤ **PENGUKURAN**

Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak).

➤ **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional; dan
 - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

14) TRANSFER

➤ **PENGAKUAN**

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

➤ **PENGUKURAN**

Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai



ketentuan perundang-undangan dan tercantum dalam dokumen penerimaan dan pengeluaran yang sah.

➤ **PENILAIAN**

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pengukuran transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

➤ **PENGUNGKAPAN**

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.



- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

15) PEMBIAYAAN

➤ PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

➤ PENGUKURAN

1. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan.
2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

➤ AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara



realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

➤ **PENGUNGKAPAN**

1. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
 - a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

16) BANTUAN SOSIAL

➤ **PENGAKUAN**

1. Belanja Bantuan Sosial diakui pada saat :
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan Belanja Bantuan Sosial pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

➤ **PENGUKURAN**

1. Metode pencatatan Belanja Bantuan Sosial dilakukan dengan:
 - a. Metode Perpetual
 - b. Metode Periodik

➤ **PENILAIAN**

1. Penilaian Belanja Bantuan Sosial menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai Belanja Bantuan Sosial akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.



➤ **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Belanja Bantuan Sosial disajikan sebagai pengeluaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dan sebagai beban pada Laporan Operasional.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. Belanja Bantuan Sosial seperti barang atau jasa terkait dengan kejelasan peruntukannya.
 - b. Jenis, jumlah, dan nilai Belanja Bantuan Sosial tidak dicantumkan dalam neraca cukup dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

17) KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

➤ **KOREKSI KESALAHAN**

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

➤ **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.



➤ **PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI**

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

➤ **OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan, dengan demikian operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.

➤ **PERISTIWA LUAR BIASA**

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
3. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
4. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

A. PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp799.010.701.167,26	Rp693.256.410.308,83

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp799.010.701.167,26 atau 100,92% dari target sebesar Rp791.690.893.700,00 atau lebih dari target sebesar Rp7.319.807.467,26 dan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp693.256.410.308,83 mengalami kenaikan sebesar Rp105.754.290.858,43 atau 15,25%. Rincian realisasi pendapatan per komponen sebagai berikut:

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Daerah	Rp	Rp		Rp
1 Pendapatan Asli Daerah	70.593.142.736,00	81.724.634.874,26	115,77	70.445.311.938,83
2 Pendapatan Transfer	712.755.905.589,00	708.623.533.110,00	99,42	599.403.659.304,00
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.341.845.375,00	8.662.533.183,00	103,84	23.407.439.066,00
Jumlah	791.690.893.700,00	799.010.701.167,26	100,92	693.256.410.308,83

Realisasi masing-masing pos pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut

A.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp81.724.634.874,26	Rp70.445.311.938,83

Jumlah sebesar Rp81.724.634.874,26 merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama Tahun Anggaran 2023 dari target sebesar Rp70.593.142.736,00 atau 115,77% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp70.445.311.938,83 mengalami kenaikan sebesar Rp11.279.322.935,43 atau 16,01% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 19 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1)	Pendapatan Pajak Daerah	28.670.000.000,00	36.570.235.607,20	127,56	27.074.133.196,50
2)	Pendapatan Retribusi Daerah	3.634.118.765,00	2.904.987.957,56	79,94	2.721.500.962,00
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.717.087.368,00	8.717.087.368,00	100,00	4.531.104.366,00
4)	Lain-lain PAD yang Sah	29.571.936.603,00	33.532.323.941,50	113,39	36.118.573.414,33
	Jumlah	70.593.142.736,00	81.724.634.874,26	115,77	70.445.311.938,83

Uraian lebih lanjut dari pendapatan asli daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
	<u>Rp36.570.235.607,20</u>	<u>Rp27.074.133.196,50</u>

Jumlah sebesar Rp36.570.235.607,20 merupakan realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2023 dari target sebesar Rp28.670.000.000,00 atau 127,56% dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.074.133.196,50 mengalami kenaikan sebesar Rp9.496.102.410,70 atau 35,07 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Pajak Daerah	Rp	Rp		Rp
1) Pajak Hotel	20.500.000.000,00	24.679.466.388,50	120,39	17.647.023.965,00
2) Pajak Restoran	1.700.000.000,00	2.038.304.371,00	119,90	1.749.444.644,50
3) Pajak Hiburan	20.000.000,00	14.829.200,00	74,15	19.079.500,00
4) Pajak Reklame	50.000.000,00	47.582.539,00	95,17	50.371.962,00
5) Pajak Penerangan Jalan	2.200.000.000,00	2.439.482.525,00	110,89	2.237.396.106,00



Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Rp	Rp		Rp
6) Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.300.000.000,00	1.450.370.398,00	111,57	1.323.344.568,00
7) Pajak Bumi dan bangunanPerdesaan dan Perkotaan	1.200.000.000,00	828.727.920,00	69,06	952.408.071,00
8) BPHTB	1.700.000.000,00	5.071.472.265,70	298,32	3.095.064.380,00
Jumlah	28.670.000.000,00	36.570.235.607,20	127,56	27.074.133.196,50

Hal-hal yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- Pajak Hotel mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena terjadi peningkatan kunjungan tamu dan penggunaan fasilitas hotel serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik dari pemerintah maupun non pemerintah.
- Pajak Restoran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena meningkatnya pengguna jasa rumah makan, warung, tenda bakso, dan makan minum dalam rangka kegiatan rapat/pelatihan.
- Pajak Hiburan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena kurangnya kunjungan masyarakat dan terdapat obyek-obyek hiburan yang tidak beroperasi.
- Pajak Reklame mengalami penurunan disebabkan kurang pemasangan iklan dari CV, Toko, rumah makan, dan iklan tertentu lainnya di Kabupaten Sumba Barat.
- Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya pemakaian pulsa listrik yang meningkat, pemasangan listrik baru dan pemasangan lampu jalan dalam Kota Waikabubak.
- Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya penambahan penggunaan bahan baku bangunan seperti pasir, sirtu, tanah, dan batu-batuan oleh pihak ketiga dalam menyelesaikan pembangunan fisik sesuai kontrak kerja.



- g) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta kurang optimalnya petugas pajak dalam melakukan penagihan dan pemungutan.
- h) BPHTB mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena meningkatnya pembelian tanah oleh investor dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

A.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp2.904.987.957,56	Rp2.721.500.962,00

Jumlah sebesar Rp2.904.987.957,56 merupakan realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 dari target sebesar Rp3.634.118.765,00 atau 79,94% dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.721.500.962,00 mengalami kenaikan sebesar Rp183.486.995,56 atau 6,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	2.423.987.700,00	1.931.008.500,00	79,66	1.652.132.500,00
Pelayanan Kesehatan	1.899.045.200,00	1.471.787.500,00	77,50	1.529.327.500,00
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	55.800.000,00	22.500.000,00	40,32	8.820.000,00
Pelayanan Pasar	148.292.500,00	100.831.000,00	67,99	113.085.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	169.250.000,00	206.985.000,00	122,30	900.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	151.600.000,00	128.905.000,00	85,03	0,00
Retribusi Jasa Usaha	1.056.185.000,00	708.498.400,00	67,08	912.732.850,00
Pemakaian Kekayaan Daerah	899.072.000,00	610.785.400,00	67,94	857.432.850,00
Terminal	24.638.000,00	26.963.000,00	109,44	28.100.000,00
Rumah Potong Hewan	9.600.000,00	13.900.000,00	144,79	3.100.000,00



Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Penjualan Produksi Usaha Daerah	122.875.000,00	56.850.000,00	46,27	24.100.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	153.946.065,00	265.481.057,56	172,45	156.635.612,00
Izin Mendirikan Bangunan	126.275.649,00	241.601.057,56	191,33	146.375.612,00
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	27.670.416,00	23.880.000,00	86,30	10.260.000,00
Jumlah	3.634.118.765,00	2.904.987.957,56	79,94	2.721.500.962,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 terbagi dalam beberapa Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi Pendapatan Retribusi per OPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	OPD	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	25.352.250,00
2)	Dinas Kesehatan	1.500.000.000,00	1.477.189.100,00	98,28	1.565.154.300,00
3)	RS Pratama Hobakalla	4.600.000,00	5.160.000,00	112,17	4.680.000,00
4)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.275.649,00	252.851.057,56	178,98	171.575.612,00
5)	Dinas Lingkungan Hidup	151.600.000,00	128.905.000,00	85,03	0,00
6)	Dinas Perhubungan	662.488.000,00	402.848.000,00	60,81	450.620.000,00
7)	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.000.000,00	27.300.000,00	101,11	54.100.000,00
8)	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan	396.216.000,00	268.186.000,00	67,69	182.886.000,00
9)	Dinas Peternakan	84.691.000,00	43.745.000,00	51,65	6.713.000,00
10)	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	248.132.500,00	267.771.000,00	107,91	241.109.000,00
11)	Sekretariat Daerah	27.670.416,00	23.880.000,00	86,30	10.260.000,00
12)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	390.445.200,00	0,00	0,00	0,00
13)	Badan Pendapatan Daerah	0,00	7.152.800,00	0,00	9.050.800,00
	Jumlah	3.634.118.765,00	2.904.987.957,56	79,94%	2.721.500.962,00



Hal-hal yang mempengaruhi kenaikan/penurunan pendapatan retribusi adalah sebagai berikut:

- (a) Pelayanan Kesehatan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena berkurangnya kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (b) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan pemetaan lokasi parkir kendaraan yang memadai serta adanya peningkatan kapasitas dari petugas parkir.
- (c) Pelayanan Pasar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena belum optimalnya pemanfaatan lokasi Pasar oleh para pedagang.
- (d) Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena:
 - Kurangnya kesadaran para pengelola Truk Mandaelu untuk melakukan penyetoran sesuai perjanjian kerjasama dengan Pihak Koperasi Suar Mandaelu dan terdapatnya beberapa truk yang rusak serta tidak dapat beroperasi lagi.
 - Masih terdapat tunggakan sewa rumah dinas, sewa ruko Jl. Ahmad Yani dan Ruko Padaeweta yang belum dilunasi, serta adanya beberapa bangunan ruko yang tidak dapat dimanfaatkan oleh karena dalam kondisi rusak.
- (e) Rumah Potong Hewan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya disebabkan meningkatnya jumlah pemanfaatan pemotongan hewan pada RPH-R Waikabubak.
- (f) Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami kenaikan karena adanya setoran biaya penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan tingkat kesuburan perairan (pakan alami) yang tinggi serta tingkat rasio pakan (FCR) yang tinggi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.



- (g) Terminal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena kurangnya penggunaan terminal Weekarou sehingga mempengaruhi setoran retribusi terminal kota pada Dinas Perhubungan.
- (h) Izin Mendirikan Bangunan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena kemudahan pelayanan perizinan menggunakan *sistem online* dan masyarakat yang membangun gedung/rumah baru bertambah.
- (i) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena bertambahnya sumber retribusi yakni hotel yang memperpanjang izin penjualan minuman beralkohol.

A.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil	Tahun 2023	Tahun 2022
Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	Rp8.717.087.368,00	Rp4.531.104.366,00

Jumlah sebesar Rp8.717.087.368,00 merupakan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 atau 100% dari target sebesar Rp8.717.087.368,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.531.104.366,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.185.983.002,00 atau 92,38 % untuk lebih jelasnya dapat diinformasikan bahwa Bagian Laba Bank NTT mengalami kenaikan berdasarkan hasil RUPS.

Tabel 22 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bagian Laba Bank NTT	8.717.087.368,00	8.717.087.368,00	100,00	4.531.104.366,00
Jumlah	8.717.087.368,00	8.717.087.368,00	100,00	4.531.104.366,00



A.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain-Lain PAD yang Sah	Rp33.532.323.941,50	Rp36.118.573.414,33

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp33.532.323.941,50 dari target sebesar Rp29.571.936.603,00 atau 113,39% dan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36.118.573.414,33 mengalami penurunan sebesar Rp2.586.249.472,83 atau 7,16 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	0,00	24.765.000,00
Hasil penjualan aset lainnya-Aset gedung bangunan	0,00	0,00	0,00	24.765.000,00
Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00
Hasil sewa BMD	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Jas Giro	1.081.757.194,00	779.012.607,41	72,01	1.194.984.726,91
Jasa Giro Kas Daerah	1.030.456.813,00	737.962.605,51	71,62	1.030.456.813,20
Jasa Giro pada Kas dibendahara	47.724.237,00	41.050.001,90	86,01	46.296.534,18
Jasa Giro BOS	3.576.144,00	0,00	0,00	3.576.144,53
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	114.655.235,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	636.900.000,00	904.024.593,90	141,94	764.050.277,33
Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara	636.900.000,00	904.024.593,90	141,94	764.050.277,33
Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain	750.000,00	3.258.284,60	434,44	11.079.878,43



Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain	750.000,00	3.258.284,60	434,44	11.079.878,43
Denda atas Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan	52.400.000,00	140.037.948,81	267,25	100.387.299,15
Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	52.400.000,00	140.037.948,81	267,25	100.387.299,15
Pendapatan Denda Pajak	35.715.150,00	72.310.599,44	202,46	43.237.491,12
Denda Pajak Hotel	25.000.000,00	58.447.716,00	233,79	16.323.950,00
Denda Pajak Restoran	5.000.000,00	4.723.238,00	94,46	7.019.966,00
Denda Pajak Reklame	30.650,00	30.650,00	100,00	161.624,00
Denda Pajak Hiburan	184.500,00	413.370,00	224,05	100.000,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	1.970.845,44	0,00	5.861,00
Denda PBB Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000,00	6.180.030,00	123,60	18.996.090,12
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	500.000,00	544.750,00	108,95	630.000,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	100.759.349,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan barang dan jasa	0,00	0,00	0,00	100.759.349,00
Pendapatan dari Pengembalian	764.414.259,00	578.398.977,63	75,67	98.040.200,00
Pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	139.540.450,00	181.693.410,63	130,21	98.040.200,00
Pengembalian kelebihan perjalanan dinas biasa	624.873.809,00	396.705.567,00	63,49	0,00
Pendapatan dari Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	6.926.845.375,00



Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan	0,00	0,00	0,00	6.926.845.375,00
Pendapatan BLUD	27.000.000.000,00	31.029.280.929,71	114,92	26.854.423.817,39
JUMLAH	29.571.936.603,00	33.532.323.941,50	113,39	36.118.573.414,33

Hal-hal yang menyebabkan kenaikan/penurunan Lain-lain PAD yang sah adalah :

- (a) Penerimaan Jasa Giro mengalami penurunan karena sangat tergantung pada suku bunga giro yang ditetapkan oleh bank, banyaknya uang yang disimpan di bank dan telah dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Umum Kas Daerah setiap hari kerja berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Bank NTT dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- (b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya tingkat kesadaran dari oknum dalam melakukan penyetoran berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas temuan BPK, BPKP, Inspektorat Kabupaten.
- (c) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sangat dipengaruhi oleh terjadinya kelebihan setor/kelebihan bayar sisa UP/GU/TU/LS oleh bendahara pengeluaran, kelebihan pembayaran pajak daerah, dan retribusi daerah oleh wajib pajak.
- (d) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami kenaikan karena pihak ketiga telah melakukan penyetoran denda keterlambatan pada tahun sebelumnya.
- (e) Pendapatan Denda Pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah belum tepat waktu sesuai tanggal pelaporan pajak.
- (f) Pendapatan dari Pengembalian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya pengembalian hutang atas kelebihan pembayaran gaji kepada ASN yang telah pensiun, meninggal dunia, dan mutasi ke kabupaten/provinsi oleh pihak PT. Taspen serta adanya



kesadaran dari oknum untuk menyetorkan kembali terkait dengan kelebihan atas biaya perjalanan.

- (g) Pendapatan BLUD mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya disebabkan jumlah kunjungan pada poli rawat jalan mengalami peningkatan, adanya penambahan Sewa lahan ATM dan bertambahnya sarana dan prasarana parkir dengan dilakukan Kerjasama dengan pihak ketiga dari PT.Angkasa Pura serta SDM kesehatan dalam menunjang pelayanan pemeriksaan Kesehatan.

A.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp708.623.533.110,00	Rp599.403.659.304,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp708.623.533.110,00 atau 99,42 % dari anggaran sebesar Rp712.755.905.589,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp599.403.659.304,00 mengalami kenaikan sebesar Rp109.219.873.806,00 atau 18,22 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
A.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	685.894.432.592,00	686.755.118.145,00	100,13	581.946.277.276,00
A.2.1.a.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.119.876.000,00	5.216.158.806,00	126,61	10.384.414.115,00
	Bagi Hasil dari PPh 21	1.826.127.000,00	1.826.127.000,00	100,00	2.090.713.429,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	74.577.000,00	74.577.000,00	100,00	275.777.783,00
	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	129.424.000,00	129.424.000,00	100,00	7.124.497,00
	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	455.735.000,00	1.295.421.806,00	284,25	5.885.611.834,00
	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.595.520.000,00	1.595.520.000,00	100,00	1.958.311.000,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	37.247.000,00	45.245.400,00	121,47	117.514.000,00
	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara – Royalti	1.246.000,00	1.246.000,00	100,00	45.654.722,00
	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara – Landrent	0,00	0,00	0,00	3.650.850,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak bumi	0,00	248.597.600,00	100,00	0,00
A.2.1.a.2	Dana Alokasi Umum	376.548.697.968,00	393.087.240.000,00	104,39	370.784.608.355,00



No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
A.2.1.a.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	152.448.362.074,00	150.844.638.101,00	98,95	94.551.942.749,00
	- Paud	920.057.700,00	920.057.700,00	100,00	0,00
	- SD	12.073.435.305,00	12.173.045.305,00	100,83	10.630.104.719,00
	- SMP	7.877.647.720,00	7.984.987.220,00	101,36	12.186.830.233,00
	- Perpustakaan Daerah	10.861.288.808,00	10.861.288.808,00	100,00	306.983.376,00
	- Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.467.666.000,00	1.256.896.400,00	85,64	0,00
	- Pelayanan Kefarmasian	13.669.471.191,00	0,00	0,00	3.246.004.835,00
	-Reguler KB	950.201.000,00	1.669.426.000,00	175,69	2.064.607.000,00
	DAK Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00	840.000.000,00
	DAK Bidang Jalan Reguler	65.896.280.620,00	0,00	0,00	6.901.715.886,00
	DAK Bidang Infra Struktur Sanitasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	794.085.000,00	0,00	0,00	4.305.789.368,00
	DAK Bidang Sanitasi-reguler	6.828.648.000,00	0,00	0,00	5.243.800.000,00
	DAK Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	6.828.100.000,00	0,00	0,00
	DAK Bidang Pertanian	5.816.741.500,00	5.398.051.500,00	92,80	7.183.837.960,00
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	2.758.651.650,00
	DAK Bidang Jalan Penugasan	0,00	65.896.280.620,00	0,00	20.827.893.811,00
	DAK Bidang Irigasi-penugasan	8.666.366.230,00	8.766.216.279,00	101,15	4.383.633.445,00
	DAK Bidang Air Minum-Reguler	8.309.127.000,00	0,00	0,00	5.517.090.466,00
	DAK Bidang Transportasi Perdesaan	8.317.346.000,00	8.314.845.000,00	99,97	8.155.000.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	11.748.578.669,00	0,00	0,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	0,00	717.737.600,00	0,00	0,00
	DAK Fisik Bidang Air Minum/Penugasan	0,00	8.309.127.000,00	0,00	0,00
A.2.1.a.4	Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	62.960.607.550,00	47.790.192.238,00	75,90	21.414.155.057,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.309.350.000,00	19.203.378.548,00	75,87	0,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	297.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Operasional KB	0,00	0,00	0,00	1.860.854.000,00
	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00	0,00	5.548.333.002,00
	BOP Pendidikan Kesetaraan	144.740.000,00	0,00	0,00	0,00
	TPG PNSD	10.783.123.000,00	10.783.120.000,00	99,99	9.057.125.200,00



No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Tamsil Guru PNSD	1.738.500.000,00	1.676.750.000,00	96,45	1.150.749.555,00
	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	421.925.000,00	821.925.000,00	194,80	55.602.800,00
	BOP PAUD	3.357.780.000,00	0,00	0,00	3.379.850.000,00
	Fasilitasi Penanaman Modal	257.289.350,00	257.289.350,00	100,00	151.040.500,00
	BOKKB-BOK	16.395.643.000,00	10.793.822.600,00	65,83	0,00
	BOKKB-Jaminan Persalinan	3.823.732.000,00	3.822.881.540,00	99,98	0,00
	PK2UKM	431.025.200,00	431.025.200,00	100,00	210.600.000,00
A.2.1.b	Dana Penyesuaian	30.066.851.000,00	30.066.851.000,00	100,00	13.804.604.000,00
	Dana Insentif Daerah	30.066.851.000,00	30.066.851.000,00	100,00	13.804.604.000,00
A.2.1.c	Dana Keistimewaan	59.750.038.000,00	59.750.038.000,00	100,00	71.006.553.000,00
	Dana Desa	59.750.038.000,00	59.750.038.000,00	100,00	71.006.553.000,00
A.2.2	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	26.861.472.997,00	21.868.414.965,00	81,41	17.457.382.028,00
A.2.2.a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.861.472.997,00	21.868.414.965,00	81,41	17.457.382.028,00
	Bagi Hasil dari PKB	6.747.146.066,00	6.277.267.609,00	93,04	3.977.315.546,00
	Bagi Hasil dari BBN-KB	4.984.367.818,00	2.214.614.086,00	44,43	658.886.984,00
	Bagi Hasil dari PBB-KB	11.546.137.772,00	3.665.050.731,00	31,74	2.871.911.051,00
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	6.258.720,00	0,00	0,00	3.249.249,00
	Bagi Hasil Pajak Rokok	3.577.562.621,00	9.711.482.539,00	271,46	9.946.019.198,00
	JUMLAH	712.755.905.589,00	708.623.533.110,00	99,42	599.403.659.304,00

A.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp8.662.533.183,00	Rp23.407.439.066,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp8.662.533.183,00 atau 103,84% dari anggaran sebesar Rp8.341.845.375,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp23.407.439.066,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.744.905.883,00 atau 62,99 %. Adapun realisasi sebesar Rp8.662.533.183,00 terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah sebesar Rp300.000.000,00 yaitu CSR Bank NTT pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Sumbangan Pihak Ketiga Sebesar Rp114.116.500,00 dengan rincian :



- a. Sumbangan Pihak Ketiga pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp102.795.000,00, dan merupakan setoran dari pendaftaran turnamen pacuan kuda Bupati Cup.
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga dari Sekretariat Daerah sebesar Rp11.321.500,00.
3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp8.248.416.683,00 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 25 Lain-lain Pendapatan yang sah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
A.3.1	Pendapatan Hibah	415.000.000,00	414.116.500,00	99,79	5.058.045.500,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	4.913.724.500,00
	Pendapatan Hibah CSR	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
	Sumbangan Pihak Ketiga	115.000.000,00	114.116.500,00	99,23	144.321.000,00
A.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	7.926.845.375,00	8.248.416.683,00	104,06	18.349.393.566,00
	Pendapatan HIBAH Dana Bos	0,00	0,00	0,00	18.347.623.366,00
	- BOS SD	0,00	0,00	0,00	9.634.073.276,00
	- BOS SMP	0,00	0,00	0,00	8.713.550.090,00
	Pendapatan atas pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	1.770.200,00
	- FKTP	7.926.845.375,00	8.248.416.683,00	104,06	0,00
	JUMLAH	8.341.845.375,00	8.662.533.183,00	103,84	23.407.439.066,00



B. BELANJA DAERAH

BELANJA	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp785.796.094.430,00	Rp687.968.631.961,49

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp785.796.094.430,00 atau 96,24 % dari anggaran sebesar Rp816.522.055.441,00 dan jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp687.968.631.961,49 mengalami kenaikan sebesar Rp97.827.462.468,51 atau 14,22 %. Komposisi Belanja Daerah Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

Tabel 26 Tabel Rincian Belanja Daerah

Belanja Daerah		Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		Rp	Rp		Rp
1	Belanja Operasi	500.193.754.815,00	473.703.643.269,00	94,70	435.668.745.344,49
2	Belanja Modal	216.421.587.126,00	212.734.251.661,00	98,30	142.909.584.239,00
3	Belanja Tidak Terduga	548.515.000,00	0,00	0,00	234.000.000,00
4	Belanja Transfer	99.358.198.500,00	99.358.199.500,00	100,00	109.156.302.378,00
	Jumlah	816.522.055.441,00	785.796.094.430,00	96,24	687.968.631.961,49

Rincian realisasi belanja per komponen sebagai berikut :

B.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp473.703.643.269,00	Rp435.668.745.344,49

Jumlah sebesar Rp473.703.643.269,00 merupakan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2023 dari anggaran sebesar Rp500.193.754.815,00 atau 94,70%, terdiri dari:

Tabel 27 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI APBD	REALISASI BOS	REALISASI BLUD	REALISASI JKN	TOTAL REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	199.333.312.928,00	192.996.337.815,00	0,00	999.689.201,00	0,00	193.996.027.016,00	97,32
2	Belanja Barang dan Jasa	289.179.829.287,00	228.711.858.105,00	15.875.031.577,00	27.089.407.971,00	0,00	271.676.297.653,00	93,95



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI APBD	REALISASI BOS	REALISASI BLUD	REALISASI JKN	TOTAL REALISASI	%
3	Belanja Hibah	10.150.212.600,00	6.616.118.600,00	0,00	0,00	0,00	6.616.118.600,00	65,18
4	Belanja Bantuan Sosial	1.530.400.000,00	1.415.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.415.200.000,00	92,47
	Jumlah	500.193.754.815,00	429.739.514.520,00	15.875.031.577,00	28.089.097.172,00	0,00	473.703.643.269,00	94,70

Uraian lebih lanjut dari masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut:

B.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp193.996.027.016,00

Rp181.407.753.146,00

Realiasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp193.996.027.016,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Belanja Pegawai Per SKPD

No	Nama SKPD	Realisasi
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp 74.939.948.746,00
2	Dinas Kesehatan	Rp 24.843.768.084,00
3	RSUD Waikabubak	Rp 11.902.573.856,00
4	RS Kelas D Pratama Hobakalla	Rp 18.100.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 3.354.631.178,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp 1.758.585.980,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 2.200.698.506,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 1.197.089.361,00
9	Dinas Sosial	Rp 1.483.226.133,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 2.041.364.440,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 1.659.490.231,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 1.152.156.682,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 1.664.095.855,00
14	Dinas Perhubungan	Rp 1.806.008.162,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Rp 1.290.530.948,00
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Rp 2.115.922.966,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 1.313.010.450,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 1.488.421.202,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 994.798.959,00
20	Dinas Perikanan	Rp 1.629.875.621,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp 6.007.788.805,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 2.117.071.343,00
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp 1.332.542.841,00
24	Sekretariat Daerah	Rp 7.256.948.552,00



No	Nama SKPD	Realisasi
25	Inspektorat Kabupaten	Rp 2.105.654.623,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.711.556.360,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 1.873.918.165,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	Rp 4.189.925.340,00
29	Sekretariat DPRD	Rp 13.769.304.676,00
30	Kecamatan Loli	Rp 3.399.576.247,00
31	Kecamatan Kota Waikabubak	Rp 3.817.143.488,00
32	Kecamatan Wanokaka	Rp 823.542.163,00
33	Kecamatan Lamboya	Rp 1.070.477.484,00
34	Kecamatan Laboya Barat	Rp 888.277.719,00
35	Kecamatan Tana Righu	Rp 1.092.838.471,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 983.489.781,00
37	Badan Pendapatan Daerah	Rp 2.701.673.598,00
	Jumlah	Rp193.996.027.016,00

Belanja Pegawai Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp193.996.027.016,00 dari anggaran sebesar Rp199.333.312.928,00 atau 97,32 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp181.407.753.146,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.588.273.870,00 atau 6,94%, hal ini disebabkan karena adanya tambahan penerimaan PPPK.

Rincian belanja pegawai sebagai berikut :

Tabel 29 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
1	2	3	4	5
Gaji dan Tunjangan ASN	169.743.125.927,00	166.342.323.970,00	98,00	152.073.807.079,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	12.472.078.120,00	11.988.404.796,00	96,12	12.513.055.844,00
Tambahan penghasilan berdasarkan perimbangan obyektif lainnya ASN	15.027.414.413,00	13.793.321.760,00	91,79	13.674.209.812,00
Belanja gaji dan tunjangan Kdh/WKDH	340.164.468,00	332.527.289,00	97,75	288.827.808,00
Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	554.880.000,00	539.760.000,00	97,28	645.600.000,00
Belanja pegawai BLUD	1.195.650.000,00	999.689.201,00	83,61	2.212.252.603,00
Jumlah	199.333.312.928,00	193.996.027.016,00	97,32	181.407.753.146,00



B.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp271.676.297.653,00	Rp237.954.832.811,49

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp271.676.297.653,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Belanja Barang dan Jasa Per SKPD

No	Nama SKPD	Realisasi
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp 48.063.168.861,00
2	Dinas Kesehatan	Rp 30.050.999.563,00
3	RSUD Waikabubak	Rp 42.135.980.479,00
4	RS Kelas D Pratama Hobakalla	Rp 2.861.375.997,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 15.888.407.325,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp 3.253.465.505,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 4.317.441.396,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 1.488.163.316,00
9	Dinas Sosial	Rp 2.864.247.602,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 9.074.392.703,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 3.391.306.747,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 1.597.317.220,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 5.942.629.038,00
14	Dinas Perhubungan	Rp 1.947.938.170,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Rp 1.297.418.177,00
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Rp 2.788.933.984,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 1.281.380.364,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 4.825.587.586,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 1.370.313.403,00
20	Dinas Perikanan	Rp 2.539.154.468,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp 10.271.401.803,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 5.953.804.378,00
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp 2.419.949.516,00
24	Sekretariat Daerah	Rp 20.743.991.431,00
25	Inspektorat Kabupaten	Rp 4.014.478.844,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 5.180.903.219,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 6.111.074.131,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	Rp 4.811.304.970,00
29	Sekretariat DPRD	Rp 9.124.101.813,00
30	Kecamatan Loli	Rp 2.923.269.907,00
31	Kecamatan Kota Waikabubak	Rp 3.124.926.035,00
32	Kecamatan Wanokaka	Rp 985.847.255,00
33	Kecamatan Lamboya	Rp 1.129.898.000,00
34	Kecamatan Laboya Barat	Rp 795.227.200,00
35	Kecamatan Tana Righu	Rp 976.385.470,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 3.220.560.550,00
37	Badan Pendapatan Daerah	Rp 2.909.551.227,00
	Jumlah	Rp 271.676.297.653,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp271.676.297.653,00 atau 93,95 % dari anggaran sebesar



Rp289.179.829.287,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp237.954.832.811,49 mengalami kenaikan sebesar Rp33.721.464.841,51 atau 14,17%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Rincian belanja barang jasa sebagai berikut:

Tabel 31 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bahan Pakai Habis	74.508.103.571,00	70.992.680.463,00	95,28	59.130.397.878,00
Belanja Barang tak pakai habis	6.568.400,00	6.568.400,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	86.557.353.270,00	83.040.953.482,00	95,94	75.481.277.752,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.978.742.621,00	7.414.037.389,00	92,92	6.764.144.140,00
Belanja sewa tanah	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00
Belanja sewa peralatan & mesin	500.980.000,00	295.960.000,00	59,08	735.770.700,00
Belanja sewa Gedung dan bangunan	276.500.000,00	243.000.000,00	87,88	167.000.000,00
Belanja jasa konsultasi konstruksi	400.998.150,00	300.933.210,00	75,05	444.231.303,00
Belanja jasa konsultasi non konstruksi	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	100,00	200.000.000,00
Belanja beasiswa Pendidikan PNS	1.988.750.000,00	1.345.585.000,00	67,66	1.290.150.000,00
Belanja kursus singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	661.754.000,00
Belanja insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah	130.557.935,00	125.282.716,00	95,96	114.067.919,00
Belanja Pemeliharaan	6.778.201.280,00	6.146.011.022,00	90,67	4.323.800.031,00
Belanja Perjalanan Dinas	54.448.291.423,00	46.436.461.127,00	85,29	40.518.610.904,00
Belanja uang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat	11.672.592.801,00	11.239.385.296,00	96,29	6.941.780.169,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	17.122.853.877,00	15.875.031.577,00	92,71	14.841.346.320,49
Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.484.408.309,00	27.089.407.971,00	106,30	26.319.101.695,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	199.927.650,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	289.179.829.287,00	271.676.297.653,00	93,95	237.954.832.811,49



Belanja Barang dan Jasa BLUD melampaui dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 22.a Tahun 2021 tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Pasal 10 ayat (1) dengan persentase ambang batas ditetapkan sebesar 10%.

B.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah	Tahun 2023	Tahun 2022
	<u>Rp6.616.118.600,00</u>	<u>Rp5.335.745.856,00</u>

Belanja Hibah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 6.616.118.600,00 atau 65,18% dari anggaran sebesar Rp10.150.212.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.335.745.856,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.280.372.744,00 atau 24,00 %. Adapun realisasi belanja hibah tersebut diberikan kepada :

- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, terealisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00.
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, terealisasi sebesar Rp5.841.145.000,00 atau 62,30 % dari anggaran sebesar Rp9.375.212.600,00
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, terealisasi sebesar Rp699.973.600,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00.

Tabel 32 Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	4.348.591.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,	4.058.050.000,00	4.000.000.000,00	156.250.000,00



No	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
	Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
3	Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan social yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	1.814.162.600,00	1.813.865.000,00	0,00
4	Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	3.503.000.000,00	27.280.000,00	30.000.000,00
9	Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik	700.000.000,00	699.973.600,00	800.904.856,00
	JUMLAH	10.150.212.600,00	6.616.118.600,00	5.335.745.856,00

B.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp1.415.200.000,00

Rp10.970.413.531,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.415.200.000,00 atau 92,47 % dari anggaran sebesar Rp1.530.400.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.970.413.531,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.555.213.531,00 atau 87,10%, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Sosial terealisasi sebesar Rp1.415.200.000,00 atau 92,47% dari anggaran sebesar Rp1.530.400.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 33 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	Bantuan Sosial kepada Individu	780.400.000,00	665.200.000,00	4.311.105.531,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	750.000.000,00	750.000.000,00	6.659.308.000,00
	JUMLAH	1.530.400.000,00	1.415.200.000,00	10.970.413.531,00



B.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp212.734.251.661,00	Rp142.909.584.239,00

Belanja Modal Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp212.734.251.661,00 atau 98,30 % dari anggaran sebesar Rp216.421.587.126,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp142.909.584.239,00 mengalami kenaikan sebesar Rp69.824.667.422,00 atau 48,86 % dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 34 Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI APBD	REALISASI BOS	REALISASI BLUD	REALISASI JKN	TOTAL REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan & Mesin	28.279.975.368,00	23.901.603.324,00	2.510.715.164,00	215.969.965,00	0,00	26.628.288.453,00	94,16
3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	48.381.640.641,00	47.685.204.516,00	0,00	0,00	0,00	47.685.204.516,00	98,56
4	Belanja Modal JIJ	138.420.242.135,00	137.251.355.339,00	0,00	0,00	0,00	137.251.355.339,00	99,16
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.339.728.982,00	349.023.020,00	820.380.333,00	0,00	0,00	1.169.403.353,00	87,29
6	Jumlah Total	216.421.587.126,00	209.187.186.199,00	3.331.095.497,00	215.969.965,00	0,00	212.734.251.661,00	98,30

Rincian belanja modal Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

B.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp0,00	Rp307.352.500,00

Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah pada Tahun 2023 dan jumlah sebesar Rp 307.352.500,00 merupakan realisasi belanja modal tanah Tahun 2022.

Realisasi Belanja Tanah dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 35 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Rp	Rp		Rp
Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00	307.352.500,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	307.352.500,00

B.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan	Tahun 2023	Tahun 2022
Mesin	Rp26.628.288.453,00	Rp22.291.661.641,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan & Mesin	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Rp	Rp		Rp
Pengadaan Alat Besar Darat	450.000.000,00	377.000.000,00	83,78	0,00
Pengadaan alat-alat bantu	158.300.000,00	26.296.000,00	16,61	12.000.000,00
Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	1.357.810.000,00	1.353.470.000,00	99,68	1.715.122.500,00
Pengadaan alat bengkel bermesin	7.500.000,00	7.492.500,00	99,90	0,00
Pengadaan alat-alat ukur	48.010.000,00	48.009.560,00	100,00	1.800.499.200,00
Pengadaan alat-alat pengolahan	539.650.000,00	519.145.089,00	96,20	2.003.650.000,00
Pengadaan alat kantor	1.490.648.200,00	1.433.748.425,00	96,18	547.603.476,00
Pengadaan alat rumah tangga	1.926.141.800,00	1.854.565.832,00	96,28	1.431.880.002,00
Pengadaan Peralatan Pemancar	37.818.000,00	37.818.000,00	100,00	0,00
Pengadaan alat Kesehatan	14.677.437.669,00	14.677.259.461,00	100,00	0,00
Pengadaan unit-unit Laboratorium	178.000.000,00	178.000.000,00	100,00	121.013.000,00
Pengadaan Komputer Unit	2.794.556.200,00	2.707.752.049,00	96,89	5.123.104.708,00
Pengadaan Peralatan Komputer	609.545.121,00	602.310.408,00	98,81	0,00



Belanja Modal Peralatan & Mesin	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Rp	Rp		Rp
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	78.743.990,00	78.736.000,00	99,99	0,00
Peralatan dan Mesin BOS	3.313.211.388,00	2.510.715.164,00	75,78	22.550.000,00
Peralatan dan Mesin BLUD	612.603.000,00	215.969.965,00	35,25	425.622.833,00
Pengadaan alat studio	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Pengadaan alat-alat kedokteran	0,00	0,00	0,00	8.956.208.868,00
Pengadaan Sumur	0,00	0,00	0,00	74.953.000,00
Alat keselamatan kerja	0,00	0,00	0,00	49.954.054,00
Jumlah	28.279.975.368,00	26.628.288.453,00	94,16	22.291.661.641,00

Belanja Peralatan dan Mesin telah direalisasikan oleh beberapa Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD

No	Nama SKPD	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	Rp3.805.643.264,00
2	Dinas Kesehatan	Rp7.995.191.400,00
3	RSUD Waikabubak	Rp 7.211.616.834,00
4	RS Kelas D Pratama Hobakalla	Rp 498.105.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 212.933.665,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp 19.706.100,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp 23.493.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 15.942.600,00
9	Dinas Sosial	Rp 43.306.070,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 502.150.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 110.616.400,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 230.421.650,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 448.467.192,00
14	Dinas Perhubungan	Rp 196.997.860,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian dan Statistik	Rp 105.642.500,00
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Rp 6.991.100,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 73.159.900,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 568.272.600,00
19	Dinas Perikanan	Rp 89.108.200,00
20	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Rp 44.694.000,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp 1.032.806.268,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 51.275.700,00



No	Nama SKPD	Realisasi
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp 42.493.900,00
24	Sekretariat Daerah	Rp 1.620.766.100,00
25	Inspektorat Kabupaten	Rp 135.939.100,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 136.736.500,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 208.620.000,00
28	Badan Pendapatan Daerah	Rp 320.123.900,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp 561.018.790,00
30	Sekretariat DPRD	Rp 70.426.260,00
31	Kecamatan Loli	Rp 73.412.900,00
32	Kecamatan Kota Waikabubak	Rp 88.277.800,00
33	Kecamatan Wanokaka	Rp -
34	Kecamatan Lamboya	Rp 29.203.500,00
35	Kecamatan Laboya Barat	Rp 18.316.500,00
36	Kecamatan Tana Righu	Rp 18.648.900,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 17.763.000,00
	Jumlah	Rp 26.628.288.453,00

B.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2023	Tahun 2022
	<u>Rp 47.685.204.516,00</u>	<u>Rp 32.868.070.896,00</u>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung & Bangunan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Rp	Rp		Rp
Pengadaan Gedung Tempat Kerja	41.186.879.491,00	40.527.113.614,00	98,40	31.543.490.774,00
Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal	3.473.821.821,00	3.455.200.863,00	99,46	1.274.621.242,00
Tugu titik kontrol pasti	3.720.939.329,00	3.702.890.039,00	99,51	49.958.880,00
Jumlah	48.381.640.641,00	47.685.204.516,00	98,56	32.868.070.896,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan telah direalisasikan oleh beberapa Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai berikut:



Tabel 39 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Nama SKPD	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	Rp 20.388.499.958,00
2	Dinas Kesehatan	Rp 439.446.000,00
3	RSUD Waikabubak	Rp 10.588.158.750,00
4	RS Kelas D Pratama Hobakalla	Rp 365.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 214.900.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 494.011.000,00
7	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Rp 174.320.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 10.970.665.408,00
9	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Rp 100.000.000,00
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp 2.025.941.400,00
11	Sekretariat Daerah	Rp 722.548.000,00
12	Inspektorat Kabupaten	Rp 198.800.000,00
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 35.000.000,00
14	Sekretariat DPRD	Rp 199.800.000,00
15	Kecamatan Lamboya	Rp 768.114.000,00
	Jumlah	Rp 47.685.204.516,00

B.2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp137.251.355.339,00	Rp82.876.818.157,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Rp	Rp		Rp
Pengadaan Jalan	111.780.907.898,00	111.766.124.260,00	99,99	63.989.996.861,00
Pengadaan Jembatan	50.000.000,00	0,00	0,00	790.608.559,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.395.216.756,00	9.395.216.754,00	100,00	4.287.923.445,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	4.249.467.476,00



Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Rp	Rp		Rp
Pengadaan bangunan air bersih/baku	230.000.000,00	229.782.000,00	99,91	6.551.679.147,00
Pengadaan bangunan air kotor	1.555.230.900,00	1.555.230.900,00	100,00	831.378.000,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	14.202.305.056,00	13.106.929.310,00	92,29	99.038.085,00
Pengadaan Jaringan Listrik	1.116.581.525,00	1.108.751.525,00	99,30	2.076.726.584,00
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	90.000.000,00	89.320.590,00	99,25	0,00
Jumlah	138.420.242.135,00	137.251.355.339,00	99,16	82.876.818.157,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan telah direalisasikan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD

No	Nama SKPD	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	Rp 242.282.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp134.835.791.224,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp 2.065.798.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 89.320.590,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 7.265.410,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 3.632.705,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 7.265.410,00
	Jumlah	Rp137.251.355.339,00

B.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
	<u>Rp1.169.403.353,00</u>	<u>Rp4.565.681.045,00</u>

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 42 Belanja Modal Aset tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Rp	Rp		Rp
Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak	245.000.000,00	214.025.000,00	87,36	0,00
Pengadaan Ternak Lainnya	135.000.000,00	134.998.020,00	100,00	0,00
Aset tak berwujud	0,00	0,00	0,00	549.111.700,00
Aset Tetap Lainnya – BOS	959.728.982,00	820.380.333,00	85,48	4.016.569.345,00
Jumlah	1.339.728.982,00	1.169.403.353,00	87,29	4.565.681.045,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya telah direalisasikan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD

No	Nama Per SKPD	Realisasi
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	820.380.333,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	214.025.000,00
3	Dinas Peternakan	134.998.020,00
	Jumlah	1.169.403.353,00

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga memiliki belanja modal Aset tetap lainnya BOS sebesar Rp820.380.333,00;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Realisasi Belanja Modal Aset tetap lainnya adalah sebesar Rp214.025.000,00 yang merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
3. Dinas Peternakan memiliki Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp134.998.020,00 yang merupakan Belanja Modal Ternak Potong.

B.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Tahun 2023	Tahun 2022
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp234.000.000,00</u>

Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp548.515.000,00 dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 44 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023

No	Nama Penerima	Anggaran yang disalurkan	Realisasi Belanja
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	548.515.000,00	0,00
	Jumlah	548.515.000,00	0,00

B.4 TRANSFER

Transfer	Tahun 2023	Tahun 2022
	<u>Rp99.358.199.500,00</u>	<u>Rp109.156.302.378,00</u>

Belanja Transfer Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp99.358.199.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp99.358.198.500,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun 2022 sebesar Rp109.156.302.378,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.798.102.878,00 atau 8,98%.

Tabel 45 Rincian Realisasi Belanja Transfer

No	Nama Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil	399.045.200,00	399.045.200,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	98.959.153.300,00	98.959.154.300,00
	Jumlah	99.358.198.500,00	99.358.199.500,00

B.4.1 Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Desa

Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Desa	Tahun 2023	Tahun 2022
	<u>Rp399.045.200,00</u>	<u>Rp693.983.498,00</u>

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp399.045.200,00 atau 100% dari target sebesar Rp399.045.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp693.983.498,00 mengalami penurunan sebesar Rp294.938.298,00 atau 42,50%.

Adapun realisasi belanja transfer yang bersumber dari bagi hasil pajak sebesar Rp399.045.200,00 tersebar di 63 Desa pada enam Wilayah Kecamatan yang terbagi dalam 2 tahap terdiri dari:

1. Tahap I (Bulan Januari s/d Juni 2023) sebesar Rp199.508.400,00
2. Tahap II (Bulan Juli s/d Desember 2023) sebesar Rp199.536.800,00



Tabel 46 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa Tahun 2022

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah
1	2	3	4
1	17 Juli 2023	24.10/04.0/000114/LS/2.13.0.00.0.00.010000/P.10/7/2023	Rp199.508.400,00
2	7 Desember 2023	24.10/04.0/000264/LS/2.13.0.00.0.00.010000/P.15/12/2023	Rp199.536.800,00
JUMLAH			Rp399.045.200,00

Lampiran 1 Rincian Transfer Bagi hasil Pajak ke Desa

B.4.2 Transfer/Bantuan Keuangan

Transfer/Bantuan Keuangan	Tahun 2023	Tahun 2022
	<u>Rp98.959.154.300,00</u>	<u>Rp108.462.318.880,00</u>

Bantuan Keuangan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp98.959.154.300,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp98.959.153.300,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp108.462.318.880,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.503.164.580,00 atau 8,76%.

Tabel 47 Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Bantuan Keuangan ke Desa	98.959.153.300,00	98.959.154.300,00	100,00	108.462.318.880,00
Jumlah	98.959.153.300,00	98.959.154.300,00	100,00	108.462.318.880,00

Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2023 sebesar Rp98.959.154.300,00 terdiri dari :

1. Realisasi sebesar Rp59.750.038.000,00 yaitu Dana Desa yang ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa sebanyak 63 Desa.

Keterangan: Rincian Dana Desa dapat dilihat pada Lampiran 1.2

2. Realisasi sebesar Rp39.209.116.300,00 yaitu belanja ADD yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa.

Rincian Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada Lampiran 1.3



Surplus (Defisit)	Anggaran	Realisasi	
	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp24.831.161.741,00)	Rp13.214.606.737,26	Rp5.287.778.347,34

Jumlah surplus/defisit dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.214.606.737,26 merupakan selisih antara total realisasi pendapatan Daerah sebesar Rp799.010.701.167,26 dengan total realisasi belanja daerah sebesar Rp785.796.094.430,00.

C. PEMBIAYAAN

C.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp24.831.127.770,52	Rp33.293.383.393,80

Jumlah sebesar Rp24.831.127.770,52 merupakan realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari SiLPA Tahun sebelumnya dan koreksi SiLPA Tahun Anggaran 2022:

Tabel 48 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Penggunaan SiLPA tahun lalu	24.831.161.741,14	33.294.611.052,81
2)	Koreksi SiLPA Tahun Anggaran 2022 (Saldo awal Tahun Anggaran 2023)	(33.970,62)	(1.227.659,01)
	Jumlah	24.831.127.770,52	33.293.383.393,80

Uraian lebih lanjut dari penerimaan pembiayaan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

C.1.1. Penggunaan SiLPA Tahun Lalu

Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp24.831.127.770,52	Rp33.293.383.393,80



Penggunaan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp24.831.127.770,52 terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah 2022	:	Rp12.835.263.974,76
2. Kas di Bendahara Pengeluaran 2022	:	Rp 3.879.170,00
3. Kas di BLUD 2022	:	Rp 292.661.309,59
4. Kas di FKTP 2022	:	Rp 9.521.943.589,00
5. Kas di Bendahara BOS 2022	:	Rp 2.185.757.378,17
6. Utang PFK	:	(Rp 8.397.651,00)
7. Kurang Setor PFK	:	Rp 20.000,00

C.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan	<u>Tahun 2023</u> Rp0,00	<u>Tahun 2022</u> Rp13.750.000.000,00
-------------------	---	--

Tidak terdapat pengeluaran pembiayaan Tahun 2023 yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat pada PT Bank NTT.

C.2.1. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal	<u>Tahun 2023</u> Rp0,00	<u>Tahun 2022</u> Rp13.750.000.000,00
-------------------------	---	--

Tidak terdapat realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank NTT Tahun 2023.

D. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

SiLPA Tahun Berjalan	<u>2023</u> Rp38.045.734.507,78	<u>2022</u> Rp24.831.161.741,14
-----------------------------	--	--

SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp38.045.734.507,78 dan Tahun 2022 sebesar Rp24.831.161.741,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Realisasi SILPA Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi		
			2023 (Rp)	%	2022 (Rp)
1	Surplus (defisit)	(24.831.161.741,00)	13.214.606.737,26	(53,20)	5.287.778.347,34
2	Penerimaan Pembiayaan	24.831.161.741,00	24.831.127.770,52	99,99	33.293.383.393,80



No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi		
			2023 (Rp)	%	2022 (Rp)
3	Pengeluaran Pembiayaan	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(13.750.000.000,00)
	SiLPA	0,00	38.045.734.507,78	0,00	Rp24.831.161.741,14

II. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

II.A Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu

Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp24.831.161.741,14 yang terdiri dari:

II. B Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

1. Kas di Kas Daerah 2022 : Rp12.835.263.974,76
2. Kas di Bendahara Pengeluaran 2022 : Rp 3.879.170,00
3. Kas di BLUD 2022 : Rp 292.661.309,59
4. Kas di FKTP 2022 : Rp 9.521.943.589,00
5. Kas di Bendahara BOS 2022 : Rp 2.185.757.378,17
6. Utang PFK : (Rp 8.397.651,00)
7. Biaya Administrasi Penutupan Rekening BRI : Rp 53.970,62

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp24.831.127.770,52 terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah 2022 : Rp12.835.263.974,76
2. Kas di Bendahara Pengeluaran 2022 : Rp 3.879.170,00
3. Kas di BLUD 2022 : Rp 292.661.309,59
4. Kas di FKTP 2022 : Rp 9.521.943.589,00
5. Kas di Bendahara BOS 2022 : Rp 2.185.757.378,17



6. Utang PFK	:	(Rp	8.397.651,00)
7. Kurang Setor PFK	:	Rp	20.000,00

II.C Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp38.045.734.507,78 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surplus/Defisit Anggaran	:	Rp13.214.606.737,26
2. Pembiayaan Netto	:	Rp24.831.127.770,52
3. SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	:	Rp38.045.734.507,78

II.D Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp33.970,62).

Lain-lain

Tidak terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.

II.E Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan

Sisa Anggaran Lebih Tahun berjalan sebesar Rp38.045.734.507,78 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kas di Kas Daerah 2023	:	Rp	20.812.495.777,38
2. Kas di Bendahara Penerimaan 2023		Rp	3.027.000,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran 2023	:	Rp	990.000,00
4. Kas di Bendahara BLUD 2023	:	Rp	3.016.875.102,30
5. Kas di Bendahara FKTP 2023	:	Rp	10.334.754.634,00
6. Kas di Bendahara BOK 2023		Rp	1.653.759.832,00
7. Kas di Bendahara BOS 2023	:	Rp	2.232.229.813,10
8. Utang PFK	:	(Rp	8.397.651,00)



III. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

I ASET

A ASET LANCAR

A.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp20.812.495.777,38	Rp12.835.263.974,76

Saldo kas di kas daerah menunjukkan saldo kas pemerintah daerah yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.812.495.777,38 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.835.263.974,76 Rincian saldo rekening Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 50 Penjelasan Rekonsiliasi Kas di BUD 2022

No	Uraian	Nilai
1	RC Per 31 Desember 2022	12.724.189.289,76
	Koreksi Tambah:	
2	Koreksi Kesalahan Setoran Kembali Pekerjaan Rumah Dinas PKO	105.658.388,00
3	Koreksi Kesalahan Setoran Kembali Lab SMP Dinas PKO	5.436.288,00
4	Kurang Bayar PFK	(20.000,00)
	Jumlah	12.835.263.974,76

Tabel 51 Rincian Rekening Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Nama Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
A.	Bank NTT Cab. Waikabubak			
1.	No. Rek. 01.40.000054-1	Bupati Sumba Barat (Dana PAD)	-	1.215.402,00
2.	No. Rek. 01.40.000343-8	Rek Kas Umum Daerah Kab Sumba Barat	14.449.376.881,14	9.543.793.645,93
3.	No. Rek. 01.40.000176-6	Bupati Sumba Barat (Tampung JS Depost)	21.320.452,19	57.665.707,78



No	Uraian	Nama Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.	No. Rek. 009.01.05.001064-1	Rek Penerimaan PBB P2 Kab Sumba Barat	-	0,00
B.	BRI Cabang Waikabubak			
1.	No. Rek. 0235.01.005523.50.9	Tabungan Pemda Sumba Barat	868.875.392,05	0,00
2.	No. Rek. 0235.01.000313.30.7	Giro Pemda Sumba Barat	55.339,00	732.926.910,05
C.	BNI Cabang Waikabubak			
1.	No. Rek. 0064290693	Giro <i>Hit</i> Bunga BB Pemerintah	5.472.867.713,00	2.388.587.633,00
	Jumlah		20.812.495.777,38	12.724.189.298,76

Saldo kas di Kas Daerah menurut rekening Bank sebesar Rp20.812.495.777,38 dan menurut BKU hasil rekonsiliasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp 20.812. 475.777,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Penjelasan Rekonsiliasi Kas BUD 2023

NO	URAIAN	NILAI
1	2	3
A	SALDO REKENING KORAN 31 DESEMBER 2023 KAS BUD	20.812.495.777,38
B	SALDO KAS BKU 31 DESEMBER 2023	20.812.475.777,38
	Koreksi Tambah	0,00
	- PFK Tahun 2022 yang telah dibayarkan ke RKUN	20.000,00
	TOTAL REKONSILIASI BUD	20.000,00
C	SALDO KAS BUD	20.812.495.777,38
D	SELISIH	0.00

Saldo rekening Koran BUD Per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.812.495.777,38, Saldo Kas BUD sebesar Rp20.812.475.777,38, terdapat selisih sebesar Rp20.000,00, yaitu koreksi tambah atas PFK BUD tahun 2022 yang telah disetor oleh Bank NTT ke RKUN tanpa memotong di RKUD. PFK tersebut masih utuh di RKUD sehingga saldo akhir kas di BUD sebesar Rp20.812.495.777,38.

A.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp990.000,00</u>	<u>Rp3.879.170,00</u>



Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang berasal dari penggunaan SP2D jenis UP/GU/TU yang belum disetorkan ke rekening umum daerah. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp990.000,00 yang terdapat pada :

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp 990.000,00
	<u>Rp 990.000,00</u>

Lampiran 2 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

A.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penerimaan	<u>Rp3.027.000,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang berasal dari penerimaan atas pendapatan daerah yang masih berada di Bendahara Penerimaan atau belum disetor ke kas umum daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.027.000 yang terdapat pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari: setoran loket Puskesmas Weekarou sebesar Rp2.823.000,00 dan setoran loket Puskesmas Padedewatu sebesar Rp204.000,00.

A.4. Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp10.334.754.634,00</u>	<u>Rp9.521.943.589,00</u>

Kas di Bendahara FKTP adalah sisa kas yang berupa saldo rekening Koran yang berasal dari penggunaan dana kapitasi pada Puskesmas sesuai dengan SP2B yang diterbitkan yang belum dibelanjakan.

Tabel 53 Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP

NO	UNIT KERJA	NOMOR REKENING BANK BRI	KAS DI BENDAHARA FKTP		KAS BANK
			SILPA KAPITASI 2023	Jasa Giro di FKTP	
1	Puskesmas Weekarou	0235-01-005523-50-9	1.393.074.090,00	0,00	1.393.074.090,00
2	Puskesmas Tanarara	0235-01-001256-30-4	792.156.957,00	0,00	792.156.957,00
3	Puskesmas Padediwatu	0235-01-001258-30-6	619.378.501,00	0,00	619.378.501,00



NO	UNIT KERJA	NOMOR REKENING BANK BRI	KAS DI BENDAHARA FKTP		KAS BANK
			SILPA KAPITASI 2023	Jasa Giro di FKTP	
4	Puskesmas Puuweri	0235-01-001251-30-4	2.274.268.900,00	0,00	2.274.268.900,00
5	Puskesmas Lahihuruk	0235-01-001254-30-2	863.951.899,00	0,00	863.951.899,00
6	Puskesmas Kareka Nduku	0235-01-001255-30-8	806.130.456,00	0,00	806.130.456,00
7	Puskesmas Kabukarudi	0235-01-001253-30-6	1.640.170.817,00	0,00	1.640.170.817,00
8	Puskesmas Malata	0235-01-001252-30-0	756.744.361,00	27.036,00	756.771.397,00
9	Puskesmas Gaura	0235-01-001250-30-8	644.314.808,00	0,00	644.314.808,00
10	Puskesmas Lolowano	0235-01-001800-30-7	184.980.779,00	0,00	184.980.779,00
11	Rs Klas D Pratama Hobakalla	3499-01-000047-30-5	359.252.794,00	303.236,00	359.556.030,00
	Jumlah		10.334.424.362,00	330.272,00	10.334.754.634,00

Terdapat Sisa Kas di FKTP Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.334.754.634,00 yang terdiri dari:

1. Silpa Kapitasi yang berada di rekening Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat D Pratama Hobakalla sebesar Rp10.334.424.362,00;
2. Jasa Giro di FKTP sebesar Rp330.272,00 yang berasal dari Puskesmas Malata sebesar Rp27.036,00 dan Rumah Sakit Hobakalla sebesar Rp303.236,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Lampiran 3 Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023

A.5. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp2.232.229.813,10	Rp2.185.757.378,17

Kas di Bendahara BOS adalah sisa kas yang berasal dari pendapatan yang diterima oleh sekolah pengelola dana BOS yang belum dibelanjakan dan masih berada di rekening BOS dan tunai di bendahara BOS.

Saldo kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.232.229.813,10 terdiri dari saldo kas di bank sebesar Rp2.227.492.358,13 dan kas ditangan bendahara BOS sebesar Rp4.737.454,97. Saldo Kas di bendahara Bos sebesar Rp2.232.229.813,10 terdiri dari BOS SD sebesar Rp1.349.601.000,16



yang tersebar di 64 SD Negeri/Inpres dan BOS SMP sebesar Rp882.628.812,94 yang tersebar di 35 SMP Negeri. Rincian Kas di Bendahara BOS adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Kas BOS

Sekolah	Bank	Tunai	Jumlah
64 SD Negeri	1.348.813.911,19	787.088,97	1.349.601.000,16
35 SMP Negeri	878.678.446,94	3.950.366,00	882.628.812,94
Jumlah	2.227.492.358,13	4.737.454,97	2.232.229.813,10

Saldo awal Kas di Bendahara BOS per 1 Januari 2023 sebesar Rp2.185.757.378,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian saldo Kas di Bendahara BOS

Sekolah	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
64 SD Negeri	1.334.010.971,23	10.196.742.572,00	10.236.883.173,00	1.349.601.000,16
35 SMP Negeri	851.746.406,94	8.979.355.976,00	8.969.243.901,00	882.628.812,94
Jumlah	2.185.757.378,17	19.176.098.548,00	19.206.127.074,00	2.232.229.813,10

Lampiran 4 Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023

A.6. Kas di Bendahara BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp3.016.875.102,30	Rp292.661.309,59

Kas di BLUD merupakan selisih antara pendapatan yang diterima oleh BLUD dengan pengeluaran BLUD yang masih terdapat pada rekening koran BLUD maupun kas tunai di Bendahara BLUD. Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.016.875.102,30 merupakan saldo bank RSUD Waikabubak. Saldo Kas di BLUD dirinci sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Saldo Kas di BLUD

Kas di BLUD	2023
	Rp
Rekening Giro Bank NTT	460.820.182,30
Rekening Giro BRI	2.556.054.920,00
Jumlah	3.016.875.102,30



A.7. Kas di Bendahara BOK

Kas di Bendahara BOK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.653.759.832,00	Rp0,00

Terdapat Kas di bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.653.759.832,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Saldo BOK Puskesmas

NO	NAMA PUSKESMAS	No Rek BNI	REALISASI PENDAPATAN BOK	REALISASI BELANJA BOK	SALDO BANK PER 31 DES 2023
1	PUSKESMAS WEEKAROU	1050655	796.319.300,00	727.068.908,00	69.250.392,00
2	PUSKESMAS TANARARA	1050283	568.860.600,00	456.292.774,00	112.567.826,00
3	PUSKESMAS PADEDIWATU	1050280	557.257.400,00	348.230.804,00	209.026.596,00
4	PUSKESMAS PUUWERI	1050284	1.190.792.400,00	933.431.656,00	257.360.744,00
5	PUSKESMAS LAHIHURUK	1050281	655.809.700,00	497.474.652,00	158.335.048,00
6	PUSKESMAS KAREKA NDUKU	1050656	480.841.900,00	330.104.926,00	150.736.974,00
7	PUSKESMAS KABUKARUDI	1050279	1.031.849.000,00	769.447.737,00	262.401.263,00
8	PUSKESMAS MALATA	1050285	624.139.600,00	511.876.849,00	112.262.751,00
9	PUSKESMAS GAURA	1050282	632.484.300,00	450.517.589,00	181.966.711,00
10	PUSKESMAS LOLOWANO	1050707	577.585.400,00	437.733.873,00	139.851.527,00
	Jumlah		7.115.939.600,00	5.462.179.768,00	1.653.759.832,00

Lampiran 5 Kas di Bendahara BOK Per 31 Desember 2023

A.8. Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp0,00

Kas Lainnya adalah sisa kas yang berasal dari penggunaan SP2D jenis LS yang merupakan kelebihan belanja, sisa PFK dan pajak daerah yang sudah dipungut oleh Bendahara serta sisa kas lain yang berada di Bendahara OPD yang belum disetorkan ke rekening umum daerah per 31 Desember 2023.



Tabel 58 Penjelasan Kas Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	0,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	0,00

Piutang

Saldo piutang yang tersaji dalam neraca adalah nilai saldo piutang yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang dicatat secara intrakomptabel. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah mengatur kebijakan tentang nilai penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak menghapus kewajiban bayar/kewajiban tagih atas piutang tersebut.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

Kualitas Piutang	%
Lancar	0,5
Kurang Lancar	10
Diragukan	50
Macet	100

Penyisihan piutang di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada.

Tabel 59 Rekapitulasi NRV Piutang Tahun 2023

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)	NRV (Rp)
1	Piutang Pajak	3.587.267.880,33	2.163.078.013,71	1.424.189.866,62
2	Piutang Retribusi	5.375.399.990,00	5.213.639.990,00	161.760.000,00
3	Piutang Lain-Lain PAD yang sah	2.794.656.791,78	64.059.401,56	2.730.597.390,22
4	Piutang Lainnya	421.782.156,23	335.417.000,00	86.365.156,23
Jumlah		12.179.106.818,34	7.776.194.405,27	4.402.912.413,07

A.9. Piutang Pajak

Piutang Pajak

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp3.587.267.880,33

Rp3.162.052.465,00



Piutang Pajak merupakan pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui SPTPD dan SKPD yang sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh wajib pajak. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.587.267.880,33 terdiri dari:

Tabel 60 Penjelasan Piutang Pajak

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	3.162.052.465,00
Mutasi Tambah	640.632.271,33
Mutasi kurang	215.416.856,00
Saldo per 31 Desember 2023	3.587.267.880,33

Lampiran 6 Perhitungan Piutang Pajak per 31 Desember 2023

Rincian saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 61 Rincian Piutang Pajak Tahun 2023 dan 2022

Piutang Pajak		2023	2022
		Rp	Rp
1)	Pajak Reklame	4.699.575,00	825.450,00
2)	Pajak Hotel	146.753.377,91	122.087.182,00
3)	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	10.388.088,42	10.386.145,00
4)	Pajak Bumi Dan Bangunan P2	3.265.145.329,00	2.840.023.178,00
5)	Pajak Restoran	688.250,00	172.400,00
6)	BPHTB	159.593.260,00	188.558.110,00
	Jumlah	3.587.267.880,33	3.162.052.465,00

A.10. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp5.375.399.990,00</u>	<u>Rp5.156.200.590,00</u>

Piutang Retribusi merupakan retribusi daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui SKRD yang sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh wajib retribusi. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.375.399.990,00 terdiri dari :



Tabel 62 Penjelasan Piutang Retribusi

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	5.156.200.590,00
Koreksi Tambah	0,00
Saldo per 1 Januari 2023	5.156.200.590,00
Mutasi Tambah	908.117.000,00
Mutasi kurang	688.917.600,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp5.375.399.990,00

Tabel 63 Rincian Piutang Retribusi Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Saldo awal	Koreksi Saldo Awal	Saldo per 1 Januari 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Kesehatan	14.156.600	0,00	14.156.600	0,00	14.156.600	-
2	Badan Pendapatan Daerah	155.720.990	0,00	155.720.990	0,00	0,00	155.720.990
3	Dinas Perhubungan	4.197.600.000	0,00	4.197.600.000	412.800.000,00	146.400.000,00	4.464.000.000
4	Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan	477.833.000	0,00	477.833.000	183.170.000,00	216.430.000,00	444.573.000
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	302.890.000	0,00	302.890.000	268.186.000,00	268.186.000,00	302.890.000
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.000.000	0,00	8.000.000	0,00	0,00	8.000.000
7	Dinas Peternakan	0,00	0,00	0,00	43.961.000,00	43.745.000,00	216.000
	Jumlah	5.156.200.590,00	0,00	5.156.200.590,00	908.117.000,00	688.917.600,00	5.375.399.990,00

Rincian Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 64 Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022

Piutang Retribusi		2023	2022
		Rp	Rp
1)	Sewa rumah dinas (Dinas Kesehatan)	0,00	14.156.600,00
2)	Truk Manda Elu (Dinas Perhubungan)	266.400.000,00	0,00
3)	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	4.197.600.000,00	4.197.600.000,00
4)	Sewa kios dan ruko (Dinas Koperindag)	444.573.000,00	477.833.000,00
5)	suprainsus (Dinas Pertanian)	302.890.000,00	302.890.000,00



Piutang Retribusi		2023	2022
		Rp	Rp
6)	Water Boom (Dinas Perikanan)	8.000.000,00	8.000.000,00
7)	Sewa rumah dinas (Dinas Peternakan)	216.000,00	0,00
8)	Pemakaian kekayaan daerah (BAPENDA)	155.720.990,00	155.720.990,00
	Jumlah Sebelum Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.375.399.990,00	5.156.200.590,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(5.213.639.990,00)	(4.755.524.656,00)
	Jumlah Sesudah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	161.760.000,00	400.675.934,00

- Piutang truk manda elu pada dinas perhubungan, ada penambahan SKRD sebesar Rp412.800.000,00 dan ada pelunasan sebesar Rp146.400.000,00
- Piutang sewa kios dan ruko dan sewa tanah pada Dinas Koperasi dan Perdagangan sebesar Rp444.573.000,00 dengan rincian Penambahan SKRD Rp183.170.000,00 dan pelunasan sebesar Rp216.430.000,00
- Piutang pada Dinas Pertanian sebesar Rp302.890.000,00 merupakan piutang dari tahun sebelumnya.
- Piutang pada Dinas Perikanan sebesar Rp8.000.000,00 merupakan piutang dari tahun sebelumnya.
- Piutang pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp155.720.990,00 merupakan piutang dari tahun sebelumnya.

Lampiran 7 Perhitungan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023

A.11. Piutang Transfer

Piutang Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp5.247.953.262,00	Rp6.637.639.077,00

Piutang Transfer merupakan nilai bagi hasil pajak provinsi yang merupakan hak Kabupaten Sumba Barat dan sudah diakui oleh Pemerintah Provinsi namun belum ditransfer ke rekening kas umum daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/73/BKUD4/2024 Tahun 2024 Tentang Hutang Bagi Hasil Pajak



Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Kepada Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur.

Rincian Mutasi tambah dan mutasi kurang Piutang Transfer dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 65 Penjelasan Piutang Transfer

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	6.637.639.077,00
Mutasi Kurang	6.637.639.077,00
Mutasi Tambah	5.247.953.262,00
Saldo per 31 Desember 2023	5.247.953.262,00

Lampiran 8 Perhitungan Piutang Transfer

A.12. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp2.794.656.791,78	Rp4.786.432.916,00

Piutang Lain- Lain PAD yang Sah merupakan denda pajak dan retribusi daerah yang belum dibayarkan pada Badan Pendapatan Daerah dan pendapatan BLUD yang diklaim ke BPJS yang telah divalidasi tetapi belum ditransfer ke rekening BLUD.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.794.656.791,78 merupakan Piutang Lain-Lain PAD yang sah pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66 Penjelasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	4.786.432.916,00
Koreksi Kurang	0,00
Saldo 1 Januari 2023	4.786.432.916,00
Mutasi Tambah	2.720.753.787,78



Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Kurang	4.712.270.400,00
Saldo per 31 Desember 2023	2.794.656.791,78

Lampiran 9 Perhitungan piutang lain-lain PAD yang sah

- Mutasi Tambah sebesar Rp2.720.753.787,78 terdiri dari piutang Klaim BPJS pada RSUD Waikabubak sebesar Rp2.713.301.831,00 dan piutang denda keterlambatan pekerjaan fisik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.192.444,78.
- Mutasi Kurang sebesar Rp4.712.270.400,00 dari pelunasan Klaim BPJS pada RSUD Waikabubak

A.13. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp421.782.156,23</u>	<u>Rp421.782.156,23</u>

Piutang Lainnya adalah Piutang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Piutang Pajak, Piutang retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang terdiri dari piutang macet dana pemberdayaan dan kelebihan pembayaran pihak ketiga yang kemungkinan tertagihnya minim.

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp421.782.156,23 terdiri dari:

Tabel 67 Penjelasan Piutang Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	421.782.156,23
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	421.782.156,23



Tabel 68 Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Piutang Lainnya

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal Rp	Mutasi Tambah Rp	Mutasi Kurang Rp	Saldo Akhir Rp
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Pertambangan	288.430.156,23	0,00	0,00	288.430.156,23
2	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	119.820.000,00	0,00	0,00	119.820.000,00
3	Satuan Polisi Pamongpraja	13.532.000,00	0,00	0,00	13.532.000,00
	Jumlah	421.782.156,23	0,00	0,00	421.782.156,23

Lampiran 10 Piutang Lainnya per 31 Desember 2023

A.14. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>(Rp7.776.194.405,27)</u>	<u>(Rp7.325.232.769,95)</u>

Penyisihan Piutang adalah cadangan yang dibentuk menggunakan metode *aging schedule* dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp7.776.194.405,27) yaitu :

Tabel 69 Rincian Penyisihan Piutang

No	OPD	Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak	Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi	Akumulasi Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	Akumulasi Piutang Lainnya	Total Akumulasi Penyisihan Piutang – LO (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	2.163.078.013,71	155.720.990,00	64.058.104,00	0,00	2.382.857.107,71
2	Dinas PUPR	0,00	0,00	0,00	202.065.000,00	202.065.000,00
3	Dinas Perhubungan	0,00	4.302.240.000,00	0,00	0,00	4.302.240.000,00
4	Dinas Koperasi dan Perdagangan	0,00	444.573.000,00	0,00	0,00	444.573.000,00
5	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	13.532.000,00	13.532.000,00
6	Dinas Perikanan	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	302.890.000,00	0,00	119.820.000,00	422.710.000,00
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00



No	OPD	Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak	Akumulasi Penyisihan Piutang Retribusi	Akumulasi Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	Akumulasi Piutang Lainnya	Total Akumulasi Penyisihan Piutang – LO (Rp)
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	1.297,56	0,00	1.297,56
	Jumlah	2.163.078.013,71	5.213.639.990,00	64.059.401,56	335.417.000,00	7.776.194.405,27

Lampiran 11 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023

A.15 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp 21.862.184.231,38</u>	<u>Rp16.081.360.917,45</u>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2022 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70 Persediaan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	16.081.360.917,45
Mutasi Tambah	53.849.888.563,81
Mutasi Kurang	48.069.065.249,88
Saldo per 31 Desember 2023	21.862.184.231,38

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.862.184.231,38 sebagai berikut :

Tabel 71 Rincian Saldo Persediaan

Jenis Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ATK	100.948.800,00	123.077.847,00
Alat Listrik dan Elektronik	0,00	1.994.400,00
BBM	0,00	36.365.500,00
Materai	150.000,00	350.000,00



Jenis Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Bahan Pembersih	123.140.580,00	34.441.300,00
Alkes Pakai Habis	929.610.770,14	6.347.667.478,64
Barang Cetakan	584.831.920,00	503.458.970,00
Obat dan BMHP Kesehatan	8.092.615.789,86	0,00
Bibita Tanaman	1.434.472.060,00	0,00
Bibit Ternak	46.504.000,00	42.920.675,00
Obat-obatan	2.660.059.947,38	4.396.403.228,81
Peralatan Olah Raga	0,00	22.506.236,00
Makanan Ternak	194.158.894,00	242.032.350,00
Makanan Pasien	11.316.375,00	81.502.000,00
Peralatan Rumah Tangga	0,00	21.384.312,00
Barang Lainnya	19.250.000,00	28.367.500,00
Barang yang diserahkan kepada Masyarakat (rincian lampiran 15.3)	7.665.125.095,00	13.637.764.954,00
J U M L A H	21.862.184.231,38	25.520.236.751,45

Lampiran 12 Daftar Persediaan per 31 Desember 2023

Tabel 72 Rincian Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada masyarakat

NO	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas PU dan Penataan Ruang	1.121.759.195,00
2	Dinas Sosial	286.573.500,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.954.816.087,00
4	Dinas Perikanan	835.878.285,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	74.975.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	475.946.048,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	165.030.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	109.216.980,00
	Jumlah	8.024.195.095,00

- Mutasi Tambah Persediaan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa belanja Uang Muka Pengadaan Meubel SMP Katolik Waikubak sebesar Rp37.444.500,00 pada Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga.



- Mutasi Tambah Persediaan atas Belanja Modal Gedung dan Pembangunan Lab. Komputer SDM Bara Bedang, Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK TAT TWAM ASI (DAK), perencanaan pembangunan sarana prasarana dan utilitas paud, Perencanaan Pembangunan ruang guru paud dan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS dan Rumah Dinas SD Swasta sebesar Rp191.845.066,00,00 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- Mutasi Tambah atas Hibah Ditjen PDTU tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.4.669.594.887,00 Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- Mutasi Kurang Persediaan atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2023 sebesar Rp733.335.710,00 dan Rp6.034.967.935,00 pada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mutasi Kurang Persediaan atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2023 sebesar Rp8.425.690.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mutasi Kurang Persediaan atas bantuan sosial yang akan diserahkan kepada masyarakat yang telah diserahkan berdasarkan BAST Tahun 2022 sebesar Rp 3.411.078.531,00 pada Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
- Mutasi Kurang Persediaan atas Alkon yang diserahkan kepada RSK Lende Moripa sebesar Rp9.902.236,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

B.1. INVESTASI PERMANEN

Investasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Permanen	Rp86.977.562.128,00	Rp86.977.562.128,00



Saldo Investasi Permanen merupakan saldo Investasi Jangka Panjang berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp0,00 yaitu Penambahan nilai Investasi Investasi Permanen tersebut tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terdiri dari:

B.1.1. Penyertaan Modal Pemda

Penyertaan Modal	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pemda	<u>Rp86.977.562.128,00</u>	<u>Rp86.977.562.128,00</u>

Pernyataan Modal Pemda per 31 Desember 2023 sebesar Rp86.977.562.128,00 merupakan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada Bank NTT yang berasal dari konversi Dana Cadangan nilai penyertaan modal sesuai dengan RUPS LB Bank NTT Tahun 2022.

C. ASET TETAP

ASET TETAP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp 1.182.224.012.744,12</u>	<u>Rp1.117.603.545.593,98</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.182.224.012.744,12.

Terhadap saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dilakukan mutasi sebagai berikut:



Tabel 73 Rincian Realisasi Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	87.214.131.038,00	87.614.078.838,00
2	Peralatan dan Mesin	490.937.169.030,90	448.889.061.558,90
3	Gedung dan Bangunan	775.279.420.439,41	728.727.994.817,79
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.374.223.659.385,68	1.238.141.181.562,31
5	Aset Tetap Lainnya	51.906.139.692,09	49.856.260.752,09
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.000.656.167,91	17.891.442.227,73
7	Akumulasi Penyusutan	(1.617.337.163.009,87)	(1.453.516.474.162,84)
	Jumlah	1.182.224.012.744,12	1.117.603.545.593,98

Tabel 74 Daftar Mutasi Aset Tetap

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
			Bertambah	Berkurang	
1 Tanah	87.614.078.838,00	0,00	0,00	399.947.800,00	87.214.131.038,00
2 Peralatan dan Mesin	448.889.061.558,90	0,00	48.303.062.020,55	6.254.954.548,55	490.937.169.030,90
3 Gedung dan Bangunan	728.727.994.817,79	0,00	49.423.153.012,00	2.871.727.390,38	775.279.420.439,41
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.238.141.181.562,31	0,00	137.974.866.363,86	1.892.388.540,49	1.374.223.659.385,68
5 Aset Tetap Lainnya	49.856.260.752,09	0,00	2.088.363.653,00	38.484.713,00	51.906.139.692,09
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.891.442.227,73	0,00	3.233.003.647,98	1.123.789.707,80	20.000.656.167,91
7 Akumulasi Penyusutan	(1.453.516.474.162,84)	(24.595.512.828,35)	(143.391.046.743,43)	(4.165.870.724,75)	(1.617.337.163.009,87)
Jumlah	1.117.603.545.593,98	(24.595.512.828,35)	97.631.401.953,96	8.415.421.975,47	1.182.224.012.744,12

C.1. Tanah

Tanah

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp87.214.131.038,00

Rp87.614.078.838,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang memenuhi klasifikasi aset tetap yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan



operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai per 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 75 Uraian Penjelasan Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	87.614.078.838,00
Mutasi tambah	0,00
Mutasi kurang	399.947.800,00
Reklas ke Aset Lain-lain	399.947.800,00
Saldo per 31 Desember 2023	87.214.131.038,00

Saldo tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.214.131.038,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Mutasi Kurang senilai Rp399.947.800,00 adalah reklas ke Aset Lain-Lain atas 5 Bidang Tanah Rumah Penjaga yang tercatat ganda dengan Pemerintah Provinsi NTT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta 1 Bidang Tanah Bangunan Kantor Pem. pada Dinas Sosial.

Lampiran 13 Daftar Aset Tetap Tanah

C.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp490.937.169.030,90</u>	<u>Rp448.889.061.558,90</u>

Jumlah tersebut mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilai satuannya diatas Rp1.000.000,00 (menurut kebijakan akuntansi batasan minimal harga satuan peralatan dan mesin bernilai Rp1.000.000,00) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, serta dalam kondisi siap pakai per 31 Desember 2023. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp490.937.169.030,90 dengan rincian se bagai berikut :

Tabel 76 Penjelasan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2022	448.889.061.558,90



Uraian	Nilai (Rp)
Tambah	48.306.502.020,55
Belanja Modal	26.628.288.453,00
Belanja Barang dan Jasa	1.865.786.730,00
Reklas dari Persediaan	4.173.000,00
Reklas Antar Akun (Gedung dan Bangunan)	681.808.599,55
Reklas Antar Akun (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	18.163.525,00
Reklas Antar Akun (Aset Tetap Lainnya)	38.484.713,00
Reklas dari Aset Lain-lain	146.200.000,00
Hibah	18.923.597.000,00
Kurang	6.258.394.548,55
Reklas Antar Akun (Gedung dan Bangunan)	20.000.000,00
Reklas Antar Akun (Aset Tetap Lainnya)	89.893.600,00
Reklas ke Persediaan	37.444.500,00
Reklas ke beban Persediaan	350.000,00
Reklas Aset Lain-lain	3.740.388.275,00
Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi	105.306.100,00
Belanja Modal Peralatan dan mesin dibawah Kapitalisasi	1.396.150.148,55
Hibah	468.861.925,00
Barang Yang serahkan kepada Masyarakat	400.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	490.937.169.030,90

- Mutasi Tambah sebesar Rp48.306.502.020,55 terdiri dari :
- Realiasi belanja modal sebesar Rp 26.628.288.453,00
 - Realisasi Belanja barang jasa sebesar Rp1.865.786.730,00 yang masuk ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Tabel 77 Penjelasan Perlatan dan Mesin

No	Perangkat Daerah	Uraian (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174.568.030,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	538.288.700,00
3	Dinas Peternakan	1.102.060.000,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistic	5.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.000.000,00
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	40.470.000,00
7	Sekretariat Daerah	400.000,00
	Jumlah	1.865.786.730,00



- Reklas dari Persediaan sebesar Rp4.173.000,00 yaitu 1 unit Lemari Es, 9 (Sembilan) buah kursi plastik dan 2 buah meja plastik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp681.808.599.55, yaitu Meubeler Sekolah Rp581.808.599,55 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Peralatan kantor serta meubeler Rp100.000.000,00 pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan.
- Reklas dari Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp18.163.525,00, yaitu pengadaan Lampu selang Rp7.265.410,00 pada Bapelitbangda, Lampu selang Rp7.265.410,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lampu selang Rp3.632.705,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Reklas dari Aset Tetap Lainnya Rp38.484.713,00 yaitu 1 buah Microphone/Wireless Mic Rp1.146.000,00 (SDN Tabulo Dara), 1 buah Wireless Rp2.750.400,00 (SD Inpres Soba Rade), 1 buah Wireless Rp2.000.000,00 (SDN Bogora Watu), 15 Buah Gitar Rp5.235.000,00 (SD Inpres Soba Rade), Dispenser Rp401.100,00 (SD Inpres Hoba Jangi), Rice Cooker Rp458.500,00 (SD Inpres Hoba Jangi), Pot 25 Buah Rp4.375.000,00 (SDN Pangadu Rade), Printer Rp1.350.000 (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga), belanja Printer, Laptop, Kursi Busa, Kursi Putar Pimpinan, Kursi Plastik Tanpa Tangan, Meja Biro dan Tangga Lipat dari Dana BOS Rp20.768.713,00 (SMPN 5 Lamboya).
- Reklas dari aset Lain-lain sebesar Rp146.200.000,00 berupa 1 unit mobil ED27B/ED49JG yang merupakan hasil penertiban aset Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- Hibah sebesar Rp18.923.597.000,00 yaitu
 - Hibah 60 unit Antropometri KIT Rp474.000.000,00 dan 10 unit Pulse Oxy Pro Rp42.500.000,00 dari Kementerian Kesehatan pada Dinas Kesehatan.



- Hibah Kemenkes berupa Alat Kesehatan dan Mobil *Ambulace* Rp18.407.097.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah
- Mutasi Kurang sebesar Rp6.258.394.548,55 terdiri dari :
 - Reklas ke Gedung dan Bangunan Gedung Garasi/Tempat Parkir sebesar Rp20.000.000,00 pada Bapelitbangda.
 - Reklas ke Aset tetap Lainnya Berupa alat kesenian Gong sebesar Rp89.893.600,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
 - Reklas ke Persediaan sebesar Rp37.444.500,00 yaitu Uang Muka Pengadaan Meubel SMP Katolik Waikabubak pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
 - Reklas ke Beban Persediaan yaitu *Service* Komputer Rp350.000,00 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
 - Reklas ke Aset Lain-Lain sebesar Rp3.740.388.275,00 terdiri dari :

Tabel 78 Rincian Reklas Aset lain-lain Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Uraian (Rp)
1	Dinas Peternakan	153.861.925,00
2	Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia	184.400.000,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	222.518.600,00
4	Sekretariat Daerah	3.179.607.750,00
Jumlah		3.740.388.275,00

- Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi sebesar Rp105.306.100,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi sebesar Rp1.396.150.148,55
- Hibah sebesar Rp468.861.925,00, yaitu :Hibah 1 unit kendaraan ED 312 JG kepada Kejaksaan Negeri Waikabubak sebesar Rp315.000.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan ED 2 B pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp.153.861.925,00.



- Barang diserahkan kepada Masyarakat berupa *combine harvester* sebesar Rp400.000.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Lampiran 14 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

C.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp775.279.420.439,41	Rp728.727.994.817,79

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung, bangunan dan monumen yang memenuhi klasifikasi aset tetap yaitu diperoleh dengan maksud tertentu untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemda dan dalam kondisi siap pakai per 31 Desember 2023 dan 2022.

Sesuai Pasal 325 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Ayat (3) yang berbunyi:

“Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah (SAP)”

dan Buletin Teknis Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi instansi pemerintah daerah dalam menyusun neraca awal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah halaman 23 yang berbunyi:

“Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar gedung dan bangunan adalah harga perolehan jika gedung bangunan tersebut dibeli atau dibangun setahun atau kurang dari tanggal neraca awal. Jika Gedung dan bangunan diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP, maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau membentuk tim penilai yang kompeten”.



Tabel 79 Penjelasan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2022	728.727.994.817,79
Tambah	49.423.153.012,00
Belanja Modal	47.685.204.516,00
Belanja Barang dan Jasa	622.527.124,00
Hibah	654.500.000,00
Reklas Antar Akun (Peralatan dan Mesin)	20.000.000,00
Reklas Antar Akun (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	315.079.372,00
Reklas Antar Akun (Aset Lain-lain)	125.842.000,00
Kurang	2.871.727.390,38
Pembongkaran/Pemusnahan	1.084.220.500,00
Reklas Antar Akun (Peralatan dan Mesin)	681.808.599,55
Reklas Antar Akun (Aset Tetap Lainnya)	185.000.000,00
Reklas Antar Akun (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	565.106.054,00
Reklas ke Persediaan	191.845.066,00
Reklas Aset Lain-lain	56.000.000,00
BM Gedung dibawah Kapitalisasi	20.000.000,00
Kurang Volume Pekerjaan	53.487.725,83
Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi	34.259.445,00
Saldo per 31 Desember 2023	775.279.420.439,41

- Mutasi Tambah sebesar Rp49.423.153.012,00 terdiri dari :
- Belanja Modal sebesar Rp47.685.204.516,00
 - Belanja Barang Jasa sebesar Rp622.527.124,00, terdiri dari :
 1. Rehabilitasi Gedung Weetana dan Rehab Gedung kantor Rp56.499.378,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 2. Penataan Halaman Kantor Rp272.262.600,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 3. Rumah Pemilahan Sampah Rp46.903.046,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah



4. Belanja jasa konsultasi dan rehabilitasi BBI Labariri Rp96.914.000,00
 5. Rehabilitasi Lapangan Voli Rp149.948.100,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- Hibah Kemenkes tahun 2021 berupa Bangunan Rumah Sakit Rp654.500.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak.
 - Reklas dari Peralatan dan Mesin Garasi/Tempat Parkir sebesar Rp20.000.000,00 pada Bapelitbangda.
 - Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp315.079.372,00, terdiri dari :
 1. Perencanaan Rehab Kantor sebesar Rp8.000.000,00 pada Inspektorat Waikabubak.
 2. Perencanaan Bangunan Gedung sebesar Rp99.756.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 3. Rehab Gedung untuk covid sebesar Rp132.723.372,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak.
 4. Perencanaan Penataan Halaman Gedung Kantor dan Pembangunan Gedung Arsip sebesar Rp74.600.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - Reklas dari Aset Lain-lain Kantor Kecamatan Lamboya sebesar Rp125.842.000,00 pada Kecamatan Lamboya.
- Mutasi Kurang sebesar Rp2.871.727.390,38 terdiri dari :
- Pembongkaran/Pemusnahan Gedung sebesar Rp1.084.220.500,00 terdiri dari :
 1. Kantor Disbudpar Rp196.820.500,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 2. Ruang kelas I-III dan Wc SD Inpres Puu Magho sebesar Rp887.400.000,00 pada Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga.
 - Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp681.808.599,55, yaitu *Meubeler* Sekolah Rp581.808.599,55



pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Peralatan kantor serta *meubeler* Rp100.000.000,00 pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan.

- Reklas ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp185.000.000,00, yaitu : Belanja rehabilitasi Gedung dan Bangunan yang di akui sebagai Aset Tetap Renovasi pada Rumah Sakit Pratama Hobakalla.
- Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp565.106.054,00
 - a. Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati sebesar Rp99.972.000,00 pada Sekretariat Daerah.
 - b. Jasa konsultasi perencanaan, pengawasan Gedung perpustakaan, Lab Komputer dan Ruang UKS SDN Tillu Mareda sebesar Rp201.953.954,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
 - c. Jasa konsultasi perencanaan Perencanaan Konstruksi Bangunan Toilet, UKS, dan Rumah Dinas SD Pekerjaan Fisik 2024, Perencanaan Konstruksi Bangunan Ruang Kelas, Ruang Guru, Pagar dan Penataan Halaman Pekerjaan Fisik Tahun 2024, Perencanaan Konstruksi Bangunan Perpustakaan dan Laboratorium Komputer SD Pekerjaan Fisik Tahun 2024, Perencanaan Laboratorium Tahun 2024 dan Perencanaan Fisik Sarana Prasana Pendidikan Tahun 2024 sebesar Rp263.180.100,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- Reklas ke Persediaan Rp191.845.066,00,00 yaitu Pembangunan Lab. Komputer SDM Bara Bedang, Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK Tat Twam Asi (DAK), perencanaan pembangunan sarana prasarana dan utilitas paud, Perencanaan Pembangunan ruang guru paud dan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS dan



Rumah Dinas SD Swasta pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

- Reklas ke Aset lain-lain sebesar Rp56.000.000,00 yaitu Bangunan Rumah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Belanja Modal Gedung dibawah kapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00 yaitu Garasi/Tempat Parkir sebesar pada Bapelitbangda.
- Kurang volume pekerjaan sebesar Rp53.487.725,83 yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yaitu Pembangunan Pagar SD Inpres Soba Rade sebesar Rp13.239.570,67, Pembangunan Pagar SMP Negeri 3 Waikabubak sebesar Rp4.192.665,49, Pembangunan Gedung Lab. Komputer SMPN 5 Loli sebesar Rp4.791.197,53, Pembangunan Pagar SD Negeri Bali Kalebu sebesar Rp4.776.286,55, serta pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum sebesar Rp26.488.005,59.
- Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi Sebesar Rp34.259.445,00 yaitu pada RSUD Waikabubak yaitu Pembangunan Ruang Rawat Inap VVIP Tahap 1 Rp3.294.000,00, Pembangunan Hemodialisis dan CT Scan Rp10.394.000,0, Bagian Umum Sekretariat Daerah yaitu Gedung Karya Siaga sebesar Rp2.496.000,00, Dinas Pendidikan , Keemudaan dan Olahraga yaitu Pembangunan Lab Komputer SDN, Pebangunan Ruang Guru SDN, Rumah Dinas SD Negeri, Pembangunan Toilet SD Negeri Rp8.799.445,00, dan Gedung Perpustakaan serta Ruang Kelas Rp9.276.000,00

Lampiran 15 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan

C.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jaringan	Rp1.374.223.659.385,68	Rp1.238.141.181.562,31



Jumlah tersebut merupakan jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80 Penjelasan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2022	1.238.141.181.562,31
Tambah	137.974.866.363,86
Belanja Modal	137.251.355.339,00
Realisasi Barang dan Jasa	257.518.139,86
Reklas Antar Akun (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	465.992.885,00
Kurang	1.892.388.540,49
Reklas Antar Akun (Peralatan dan Mesin)	18.163.525,00
Reklas Antar Akun (Aset tetap Lainnya)	300.000.000,00
Reklas Antar Akun (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	1.472.397.594,98
Kurang Volume Pekerjaan	30.697.071,31
Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi	71.130.349,20
Saldo per 31 Desember 2023	1.374.223.659.385,68

- Mutasi Tambah sebesar Rp137.974.866.363,86 terdiri dari :
- Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp137.251.355.339,00
 - Realisasi Barang dan Jasa sebesar Rp257.518.139,86 terdiri dari :
 1. Pembangunan Daerah Irigasi Daduka sebesar Rp144.038.149,86 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 2. Pengadaan Panel Surya dan Bak Air sebesar Rp35.499.990,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 3. Penataan Prasarana Sarana Umum Kampung Galimara sebesar Rp34.980.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



4. Sumur Gali sebesar Rp25.000.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 5. Pengadaan Panel Surya sebesar Rp18.000.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 465.992.885,00 terdiri dari :
 1. Perencanaan Jalan 2 2022, Perencanaan Jalan 3 2022, Perencanaan Drainase 2022, Perencanaan Irigasi, Perencanaan Irigasi 2 dan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/air Minum sebesar Rp393.992.885,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 2. Perencanaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sumba Barat dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp72.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - Mutasi Kurang sebesar Rp1.892.388.540,49 terdiri dari :
 - Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.163.525,00 terdiri dari: pengadaan Lampu selang pada Bapelitbangda sebesar Rp7.265.410,00, Lampu selang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp7.265.410,00 dan Lampu selang sebesar Rp3.632.705,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - Reklas ke Aset Tetap Lainnya yaitu *Survey* Kondisi Jalan sebesar Rp300.000.000,00 pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 1.472.397.594,98 yaitu :
 - a. Perencanaan, Pengawasan dan SPAM Desa Bondohula sebesar Rp230.900.747,89 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



- b. Pengawasan SPAM Desa Harona Kalla dan SPAM Desa Harona Kalla sebesar Rp123.382.485,09 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Pembangunan SPAM Letekamughila, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ubu Raya, Perencanaan SPAM untuk T.A.2024, Perencanaan Irigasi T.A.2024, perencanaan bantaran sungai kali kaori, Perencanaan Drainase perkotaan untuk T.A.2024, Perencanaan jalan 1 dan Perencanaan Jalan 2 sebesar Rp1.028.793.772,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Perencanaan Optimalisasi TPA Wee Dabbo sebesar Rp89.320.590,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Kurang volume pekerjaan Jalan dan Irigasi pada Dinas PUPR sebesar Rp30.697.071,31 dengan rincian :
 - 1. Aset Jalan sebesar Rp29.650.005,72 yang terdiri dari :
 - a. Jalan Ponungaba – Kareka Nduku dengan nama paket pekerjaan Jalan Ponungaba (Relly TVRI) – Wanokaza (K56) sebesar Rp1.993.656,63.
 - b. SP. Zalakadu – Lolo Wano (K11) dengan nama paket pekerjaan Jalan Zala Kadu – Manuku (K11) sebesar Rp19.476.860,76.
 - c. Jalan Puu Naga – Batas Sumba Barat Daya (Mata Piau) dengan nama paket pekerjaan Jalan Puu Naga – Mata Piau (K69) sebesar Rp3.961.607,26.
 - d. SP. Kabukarudi – Sodana SP Keretana (K25) dengan nama paket pekerjaan Jalan Kabukarudi – Hang Kapu (K25) sebesar Rp4.217.881,07.
 - 2. Kurang volume pekerjaan Irigasi pada Dinas PUPR sebesar Rp1.047.065,59 yaitu Daerah Irigasi Labariri dengan paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Labariri.



- Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi pada Dinas PUPR sebesar Rp71.130.349,20, yaitu Peningkatan Jalan lega - kerewei (transdes) sebesar Rp3.561.924,24, Peningkatan Jalan Pamate lakawe- SP. KP. Situs Sodana (Transdesk) sebesar Rp11.279.426,76, SP. Kabukarudi – Sodana – SP.Keretana (K25) sebesar Rp17.854.434,00, Puunaga – Batas Sumba Barat Daya (Matapiawu) sebesar Rp14.910.000,00, SPAM Letenale Rp780.000, SPAM Bodo Ede Rp3.744.000,00, Pembangunan SPAM Lokory sebesar Rp2.772.222,82, Peningatan SPAM Weemarada sebesar Rp625.786,08, Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Pro Air Desa Praibakul sebesar Rp626.555.30, Peningkatan DI. Lama Ladde Kec. Loli (DAK) sebesar Rp980.803,59, Pembangunan DI. Rua Kecamatan Wanukaka sebesar Rp4546.986,03, Pembangunan DI Wee Kalowo sebesar Rp3.639.230,43, serta Pembangunan DI Labariri sebesar Rp5.808.979,95

Lampiran 16 Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp51.906.139.692,09	Rp49.856.260.752,09

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang meliputi buku/perpustakaan, ternak, tanaman, dan barang bercorak kesenian/kebudayaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Tabel 81 Penjelasan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2022	49.856.260.752,09
Tambah	2.088.363.653,00
Belanja Modal	1.169.403.353,00



Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	44.955.000,00
Reklas Antar Akun (Peralatan dan Mesin)	89.893.600,00
Reklas Antar Akun (Gedung dan Bangunan)	185.000.000,00
Reklas Antar Akun (Jalan Irigasi dan Jaringan)	300.000.000,00
Reklas Antar Akun (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	299.111.700,00
Kurang	38.484.713,00
Reklas Antar Akun (Peralatan dan Mesin)	38.484.713,00
Saldo per 31 Desember 2023	51.906.139.692,09

- Mutasi Tambah sebesar Rp2.088.363.653,00 terdiri dari :
- Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.169.403.353,00
 - Realisasi Barang dan Jasa sebesar Rp44.955.000,00 yaitu Pengadaan induk ikan unggul pada Dinas Perikanan
 - Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa alat kesenian sebesar Rp 89.893.600,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp185.000.000,00, yaitu: Belanja rehabilitasi Gedung dan Bangunan yang di akui sebagai Aset Tetap Renovasi pada Rumah Sakit Pratama Hobakalla.
 - Reklas dari Jalan Irigasi dan Jaringan yaitu Survey Kondisi Jalan sebesar Rp300.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Perencanaan Pembuat Rencana Umum sebesar Rp299.111.700,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mutasi Kurang sebesar Rp38.484.713,00 terdiri dari :
- Reklas ke Peralatan dan Mesin yaitu 1 buah *Microphone/Wireless Mic* Rp1.146.000,00 (SDN Tabulo Dara), 1 buah *Wireless* Rp2.750.400,00 (SD Inpres Soba Rade), 1 buah *Wireless* Rp2.000.000,00 (SDN Bogora Watu), 15 Buah Gitar



Rp.5.235.000,00 (SD Inpres Soba Rade), *Dispenser* Rp401.100,00 (SD Inpres Hoba Jangi), *Rice Cooker* Rp458.500,00 (SD Inpres Hoba Jangi), Pot 25 Buah Rp4.375.000,00 (SDN Pangadu Rade), Printer Rp1.350.000 (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga), belanja Printer, Laptop, Kursi Busa, Kursi Putar Pimpinan, Kursi Plastik Tanpa Tangan, Meja Biro dan Tangga Lipat dari Dana BOS Rp20.768.713,00 (SMPN 5 Lamboya).

Lampiran 17 Daftar Aset Tetap Lainnya

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp20.000.656.167,91	Rp17.891.442.227,73

Jumlah tersebut merupakan nilai konstruksi yang belum selesai atau belum siap digunakan per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

Tabel 82 Penjelasan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2022	17.891.442.227,73
Mutasi Tambah	3.233.003.647,98
Gedung dan Bangunan	565.106.054,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.472.397.594,98
Barang dan Jasa	395.998.150,00
Kewajiban	799.501.849,00
Mutasi Kurang	1.123.789.707,80
Gedung dan Bangunan	315.079.372,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	465.992.885,00
Aset Tetap Lainnya	299.111.700,00
Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi	43.605.750,80
Saldo per 31 Desember 2023	20.000.656.167,91

➤ Mutasi Tambah sebesar Rp3.233.003.647,98 terdiri dari :



- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp565.106.054,00
 - a. Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati sebesar Rp99.972.000,00 pada Sekretariat Daerah.
 - b. Jasa konsultasi perencanaan, pengawasan Gedung perpustakaan, Lab Komputer dan Ruang UKS SDN Tillu Mareda sebesar Rp201.953.954,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
 - c. Jasa konsultasi perencanaan Perencanaan Konstruksi Bangunan Toilet, UKS, dan Rumah Dinas SD Pekerjaan Fisik 2024, Perencanaan Konstruksi Bangunan Ruang Kelas, Ruang Guru, Pagar dan Penataan Halaman Pekerjaan Fisik Tahun 2024, Perencanaan Konstruksi Bangunan Perpustakaan dan Laboratorium Komputer SD Pekerjaan Fisik Tahun 2024, Perencanaan Laboratorium Tahun 2024 dan Perencanaan Fisik Sarana Prasana Pendidikan Tahun 2024 sebesar Rp263.180.100,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.472.397.594,98 yaitu :
 - a. Perencanaan, Pengawasan dan SPAM Desa Bondohula sebesar Rp230.900.747,89 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. Pengawasan SPAM Desa Harona Kalla dan SPAM Desa Harona Kalla sebesar Rp123.382.485,09 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - c. Pembangunan SPAM Letekamughila, Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ubu Raya, Perencanaan SPAM untuk T.A. 2024, Perencanaan Irigasi T.A. 2024, perencanaan bantaran sungai kali kaori, Perencanaan Drainase perkotaan untuk T.A. 2024, Perencanaan jalan 1



dan Perencanaan Jalan 2 sebesar Rp1.028.793.772,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

d. Perencanaan Optimalisasi TPA Wee Dabbo sebesar Rp89.320.590,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp395.998.150,00 yaitu Pengadaan Jasa Konsultasi Belanja Jasa Konsultasi Lainnya Jasa Konsultansi Lingkungan, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Kewajiban SPAM Bondohula, SPAM Desa Harona Kalla dan Peningkatan Spam Jaringan Perpipaan Desa Sobarade sebesar Rp799.501.849,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mutasi Kurang sebesar Rp1.123.789.707,80 terdiri dari :
 - Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp315.079.372,00, terdiri dari :
 1. Perencanaan Rehab Kantor sebesar Rp8.000.000,00 pada Inspektorat Waikabubak.
 2. Perencanaan Bangunan Gedung sebesar Rp99.756.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 3. Rehab Gedung untuk covid sebesar Rp132.723.372,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak.
 4. Perencanaan Penataan Halaman Gedung Kantor dan Pembangunan Gedung Arsip sebesar Rp74.600.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - Reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp465.992.885,00 yaitu :
 - Perencanaan Jalan 2 2022, Perencanaan Jalan 3 2022, Perencanaan Drainase 2022, Perencanaan Irigasi, Perencanaan



- Irigasi 2 dan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/air Minum sebesar Rp393.992.885,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Perencanaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sumba Barat dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp72.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - Reklas ke Aset Tetap Lainnya yaitu Perencanaan Pembuat Rencana Umum sebesar Rp299.111.700,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - Reklas ke Aset Lain – Lainnya atas kelebihan pembayaran jasa konsultasi sebesar Rp43.605.750,80 terdiri dari:
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp31.221.195,80 yaitu Perencanaan Jalan 2 sebesar Rp10.656.000,00, Perencanaan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp7.280.000,00, SPAM Desa Harona Kalla sebesar Rp493.195,80, Perencanaan SPAM untuk Perencanaan Tahun 2024 sebesar Rp12.792.000,00;
 2. Bagian Umum Sekretariat Daerah atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati sebesar Rp2.850.000,00;
 3. Dinas Pertanian dan KP atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik Tahun 2024 sebesar Rp1.680.000,00;
 4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp7.854.555,00 atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Perpustakaan, Laboratorium dan UKS serta Jasa Konsultasi Perencanaan Konstruksi bangunan Toilet, Perpustakaan dan Laboratorium.



Lampiran 18 Daftar Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

C.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyusutan	(Rp1.617.337.163.009,87)	(Rp1.453.516.474.162,84)

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menetapkan kebijakan akuntansi menyangkut penyusutan, sehingga nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.617.337.163.009,87)

Tabel 83 Penjelasan Akumulasi Penyusutan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Des 2022	1.453.516.474.162,84
Koreksi Tambah	24.595.512.828,35
Saldo awal 1 Januari 2023	1.478.111.986.991,19
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	44.536.037.242,53
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.855.278.207,89
Beban Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	82.448.108.609,85
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	43.006.560,00
Mutasi Tambah	508.616.123,16
Mutasi Kurang	4.165.870.724,75
Saldo per 31 Desember 2023	1.617.337.163.009,87

Lampiran 19 Rincian Akumulasi Penyusutan

➤ Koreksi Tambah sebesar Rp24.595.512.828,35 merupakan hasil reklasifikasi aset tetap, pembulatan angka, penilaian aset tetap, kapitalisasi ke aset induk dan koreksi saldo awal tahun sebelumnya yang belum tercatat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi Tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.779.308.566,67.
2. Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.167.177.026,21.



3. Koreksi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.649.027.235,47.
- Mutasi Tambah sebesar Rp508.616.123,16 dengan rincian sebagai berikut :
1. Reklas dari aset lain- lain sebesar Rp146.200.000,00 ke Peralatan dan Mesin berupa 1 unit mobil ED27B/ED49JG yang merupakan hasil penertiban aset Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah dan
 2. Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.174.356,50 ke Peralatan dan Mesin berupa belanja Printer, Laptop, Kursi Busa, Kursi Putar Pimpinan, Kursi Plastik Tanpa Tangan, Meja Biro dan Tangga Lipat dari Dana BOS Rp7.824.356,50 (SMPN 5 Lamboya) dan Printer Rp1.350.000,00 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
 3. Alat kesenian yang belum disusutkan senilai Rp299.521.000,00 pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan.
 4. Alat kesenian yang belum disusutkan senilai Rp1.413.500,00 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
 5. Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp52.307.266,66 ke Aset Tetap Lainnya berupa alat kesenian pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- Mutasi Kurang sebesar Rp4.165.870.724,75 dengan rincian sebagai berikut :
1. Peralatan dan Mesin Hibah ke Kejaksaan Negeri Waikabubak Rp311.361.925,00.
 2. Peralatan dan Mesin ke Aset lain-lain Rp3.398.533.475,00.
 3. Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain Rp25.760.000,00.
 4. Gedung dan Bangunan Pembongkaran/Pemusnahan sebesar Rp375.752.668,75.
 5. Perubahan masa manfaat pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.908.200,00.



6. Perubahan masa manfaat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.998.000,00.
7. Perubahan masa manfaat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp10.871.696,00.
8. Reklas ke Aset Tetap Lainnya Rp39.684.760,00 dari Peralatan dan Mesin berupa alat kesenian pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

D. PROPERTI INVETASI

D.1. Properti Investasi Tanah

Properti Investasi Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp20.181.000,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai atas properti investasi tanah per 31 Desember 2023 yang memenuhi klasifikasi properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan tidak untuk digunakan untuk kegiatan pemerintah atau tidak untuk diserahkan kepada masyarakat. Namun dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.

Tabel 84 Properti Investasi Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	0,00
Mutasi Tambah	20.181.000,00
Reklas dari Kemitraan dengan Pihak ketiga	20.181.000,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	20.181.000,00



- Mutasi Tambah sebesar Rp20.181.000,00 terdiri dari :
 - Reklas dari kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp20.181.000,00 berupa Tanah bangunan obyek wisata Bahari Water Boom pada Dinas Perikanan.

D.2. Properti Investasi Peralatan Mesin

Properti Investasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	Rp7.952.247.175,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas properti investasi peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 yang memenuhi klasifikasi properti investasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk menghasilkan pendapatan sewa. Saldo properti investasi peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.952.247.175,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut

Tabel 85 Properti Investasi Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	0,00
Mutasi Tambah	7.952.247.175,00
Reklas dari Kemitraan dengan Pihak ketiga	7.952.247.175,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	7.952.247.175,00

- Mutasi Tambah sebesar Rp7.952.247.175,00 terdiri dari :
 - Reklas dari kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp7.952.247.175,00 berupa Mobil Dinas Operasional Truk Manda Elu pada Dinas Perhubungan.



D.3. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Properti Investasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	<u>Rp2.576.167.833,51</u>	<u>Rp0,00</u>

Jumlah tersebut merupakan saldo atas properti investasi gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 yang memenuhi klasifikasi properti investasi dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

Tabel 86 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	0,00
Mutasi Tambah	2.576.167.833,51
Reklas dari Kemitraan dengan Pihak ketiga	2.576.167.833,51
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	2.576.167.833,51

- Mutasi Tambah sebesar Rp2.576.167.833,51 terdiri dari :
- Reklas dari kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp2.576.167.833,51 berupa Gedung dan Bangunan obyek wisata Bahari Water Boom pada Dinas Perikanan.

D.4. Properti Investasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Properti Investasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp246.229.062,97</u>	<u>Rp0,00</u>

Jumlah tersebut merupakan saldo atas properti investasi jalan, jaringan dan irigasi yang memenuhi klasifikasi properti investasi dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan



pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87 Properti Investasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	0,00
Saldo per 1 Januari 2023	0,00
Mutasi Tambah	246.229.062,97
Reklas dari Kemitraan dengan Pihak ketiga	246.229.062,97
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	246.229.062,97

- Mutasi Tambah sebesar Rp246.229.062,97 terdiri dari :
- Reklas dari kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp246.229.062,97 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi obyek wisata Bahari Water Boom pada Dinas Perikanan.

D.5. Akumulasi Properti Investasi

Akumulasi Properti	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Investasi	<u>Rp7.839.899.934,44</u>	<u>Rp0,00</u>

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menetapkan kebijakan akuntansi menyangkut penyusutan, sehingga nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp7.839.899.934,44).

Tabel 88 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Des 2022	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	618.163.217,50
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.423.240,03



Uraian	Nilai (Rp)
Beban Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	12.311.453,15
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
Mutasi Tambah	7.158.002.023,76
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	7.839.899.934,44

- Mutasi Tambah sebesar Rp7.839.899.934,44 merupakan reklas dari kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp7.839.899.934,44 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi obyek wisata Bahari Water Boom pada Dinas Perikanan.

Lampiran 20 Daftar Properti Investasi

E. DANA CADANGAN

Dana Cadangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Kabupaten Sumba Barat tidak mempunyai dana cadangan per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

F. ASET LAINNYA

F.1. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp558.538.244,64</u>	<u>Rp1.225.531.234,88</u>

Jumlah sebesar Rp558.538.244,64 merupakan saldo tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang telah memiliki SKTJM. Dari jumlah sebesar Rp1.225.531.234,88 pada tahun 2022 telah dilunasi sebesar Rp666.992.990,24 yang meliputi hasil temuan pemeriksaan BPK RI.

F.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp10.794.825.071,48</u>



Jumlah tersebut merupakan saldo atas pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati per 31 Desember 2023.

Tabel 89 Kemitraan Dengan Pihak ke Tiga

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	10.794.825.071,48
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	10.794.825.071,48
Reklas ke Properti Investasi	10.794.825.071,48
Saldo per 31 Desember 2023	0,00

Mutasi kurang sebesar Rp10.794.825.071,48 terdiri dari:

- Reklas ke properti investasi tanah sebesar Rp20.181.000,00 berupa Tanah bangunan obyek wisata Bahari Water Boom pada Dinas Perikanan.
- Reklas ke properti investasi peralatan dan mesin sebesar Rp7.952.247.175,00 berupa Mobil Dinas Operasional Truk Manda Elu pada Dinas Perhubungan.
- Reklas dari properti investasi Gedung dan bangunan sebesar Rp2.576.167.833,51 berupa Gedung dan Bangunan obyek wisata Bahari Water Boom pada Dinas Perikanan.
- Reklas ke properti investasi jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp246.229.062,97 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi obyek wisata Bahari Water Boom pada Dinas Perikanan

F.3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<u>Rp4.524.391.635,00</u>	<u>Rp4.393.141.635,00</u>

Saldo sebesar Rp4.524.391.635,00 adalah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 terdiri dari :



Tabel 90 Penjelasan Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	4.393.141.635,00
Mutasi Tambah	131.250.000,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	4.524.391.635,00

Lampiran 21 Daftar Aset Tak Berwujud

- Mutasi Tambah sebesar Rp131.250.000,00 meru pakan belanja barang dan jasa Pembuatan Vidio / Materi Promosi Liputan Parade Kuda Pacu, Promosi Pariwisata Sumba Barat dengan *Event Organiser* dalam Pelaksanaan *CFD JAKARTA*, Pembuatan Vidio / Materi Promosi Pariwisata Sumba Barat pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan.

F.4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp74.339.815.275,93</u>	<u>Rp74.065.869.441,22</u>

Jumlah tersebut merupakan aset lain-lain meliputi emas, penataan lahan, peralatan mesin yang rusak berat dan yang tidak dapat ditemukan serta gedung dan bangunan yang rusak berat dan sekolah swasta.

Tabel 91 Penjelasan Aset Lain-lain

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	74.065.869.441,22
Koreksi Kurang	55.000.000,00
Saldo per 1 Januari 2023	74.010.869.441,22
Mutasi Tambah	4.908.142.417,14
Tanah	399.947.800,00
Peralatan dan mesin	3.740.388.275,00
Gedung dan Bangunan	56.000.000,00
Pencatatan Pendapatan Transfer DBH Non Tunai melalui TDF Tahun 2023	478.626.000,00
Aset Lain-Lain lainnya	233.180.342,14



Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Kurang	4.579.196.582,43
Reklas Antar Akun (Gedung dan Bangunan)	84.884.130,43
Pencatatan Pendapatan Transfer DBH Non Tunai melalui TDF Tahun 2022	1.070.018.977,00
Akumulasi Penyusutan	3.424.293.475,00
Saldo per 31 Desember 2023	74.339.815.275,93

Lampiran 22 Daftar Aset Lain-lain

- Mutasi Tambah sebesar Rp4.908.142.417,14 terdiri dari :
- Reklas ke Aset lain-lain adalah barang-barang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, tidak diketahui keberadaannya dan Pencatatan Pendapatan Transfer DBH Non Tunai melalui TDF Tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 92 Rincian Mutasi Tambah Aset Lain-lain

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.897.800,00
2	Dinas Peternakan	153.861.925,00
3	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	184.400.000,00
4	Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	701.144.600,00
5	Sekretariat Daerah	3.179.607.750,00
6	Dinas Sosial	242.000.000,00
Jumlah		4.674.912.075,00

- Aset lain-Lain Lainnya Rp233.180.342,14 terdiri dari :
 1. Kurang volume pekerjaan sebesar Rp53.487.725,83 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yaitu Pembangunan Pagar SD Inpres Soba Rade sebesar Rp13.239.570,67, Pembangunan Pagar SMP Negeri 3 Waikabubak sebesar Rp4.192.665,49, Pembangunan Gedung Lab. Komputer SMPN 5 Loli sebesar Rp4.791.197,53, dan Pembangunan Pagar SD Negeri Bali Kalebu sebesar Rp4.776.286,55, dan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum sebesar Rp26.488.005,59.



2. Kurang volume pekerjaan Jalan dan Irigasi pada Dinas PUPR sebesar Rp30.697.071,31 dengan rincian sebagai berikut:
 - Jalan sebesar Rp29.650.005,72 yang terdiri dari Jalan Ponungaba – Kareka Nduku dengan nama paket pekerjaan Jalan Ponungaba (Relly TVRI) – Wanokaza (K56) sebesar Rp1.993.656,63, SP. Zalakadu – Lolo Wano (K11) dengan nama paket pekerjaan Jalan Zala Kadu – Manuku (K11) sebesar Rp19.476.860,76, Jalan Puu Naga – Batas Sumba Barat Daya (Mata Piau) dengan nama paket pekerjaan Jalan Puu Naga – Mata Piau (K69) sebesar Rp3.961.607,26, SP. Kabukarudi – Sodana SP Keretana (K25) dengan nama paket pekerjaan Jalan Kabukarudi – Hang Kapu (K25) sebesar Rp4.217.881,07.
 - Irigasi sebesar Rp1.047.065,59 yaitu Daerah Irigasi Labariri dengan paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Labariri.
3. Kelebihan Pembayaran Jasa konsultansi Jalan dan Irigasi pada Dinas PUPR sebesar Rp71.130.349,20, yaitu Peningkatan Jalan lega - kerewei (transdes) sebesar Rp3.561.924,24, Peningkatan Jalan Pamate lakawe- SP. KP. Situs Sodana (Transdes) sebesar Rp11.279.426,76, SP. Kabukarudi – Sodana – SP.Keretana (K25) sebesar Rp17.854.434,00, Puunaga – Batas Sumba Barat Daya (Matapiawu) sebesar Rp14.910.000,00, SPAM Letenale Rp780.000,00, SPAM Bodo Ede Rp3.744.000,00, Pembangunan SPAM Lokory sebesar Rp2.772.222,82, Peningkatan SPAM Weemarada sebesar Rp625.786,08, Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Pro Air Desa Praibakul sebesar Rp626.555,30, Peningkatan DI. Lama Ladde Kec. Loli (DAK) sebesar Rp980.803,59, Pembangunan DI. Rua Kecamatan Wanukaka sebesar Rp4.546.986,03, Pembangunan DI Wee Kalowo sebesar



- Rp3.639.230,43, serta Pembangunan DI Labariri sebesar Rp5.808.979,95.
4. Kelebihan pembayaran jasa konsultansi Sebesar Rp16.184.000,00 pada RSUD Waikabubak yaitu Pembangunan Ruang Rawat Inap VVIP Tahap 1 Rp3.294.000,00, Pembangunan Hemodialisasi dan *CT Scan* Rp10.394.000,00, Bagian Umum Sekretariat Daerah yaitu Gedung Karya Siaga sebesar Rp2.496.000,00.
 5. Kelebihan pembayaran jasa konsultansi sebesar Rp31.221.195,80 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Jalan 2 sebesar Rp10.656.000,00, Perencanaan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp7.280.000,00, SPAM Desa Harona Kalla sebesar Rp493.195,80, Perencanaan SPAM untuk Perencanaan Tahun 2024 sebesar Rp12.792.000.
 6. Kelebihan pembayaran pembayaran jasa konsultansi sebesar Rp2.850.000,00 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Bagian Umum Sekretarian Daerah atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati
 7. Kelebihan pembayaran jasa konsultansi sebesar Rp1.680.000,00 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Dinas Pertanian dan KP atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan DAK Fisik Tahun 2024
 8. Kelebihan Pembayaran jasa konsultansi sebesar Rp18.075.445,00 dari Gedung Bangunan pada Dinas Pendidikan , Keemudaan dan Olahraga yaitu Pembangunan Lab Komputer SDN, Pebangunan Ruang Guru SD N, Rumah Dinas SD Negeri, Pembangunan Toilet SD Negeri Rp8.799.445,00, dan Gedung Perpustakaan serta Ruang Kelas Rp9.276.000,00 .
 9. Kelebihan pembayaran jasa konsultansi sebesar Rp7.854.555,00 dari Kontruksi Dalam Pengerjan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Perpustakaan, Labratorium dan UKS serta Jasa Konsultasi Perecanaan Konstruksi bangunan Toilet, Perpustakaan dan Laboratorium.



- Mutasi Kurang sebesar Rp4.579.196.582,43 merupakan reklas dari nilai buku, akumulasi penyusutan dan Pencatatan Pendapatan Transfer DBH Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 yang sudah dibayar, terdiri dari :

Tabel 93 Rincian Mutasi Kurang Aset Lain-lain Per SKPD

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang	25.760.000,00
2	Dinas Peternakan	153.861.925,00
3	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	184.400.000,00
4	Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	199.438.900,00
5	Badan Pendapatan Daerah	1.070.018.977,00
6	Sekretariat Daerah	2.860.832.650,00
7	Kecamatan Lamboya	84.884.130,43
Jumlah		4.579.196.582,43

F.5. Akumulasi Amortisasi

Akumulasi Amortisasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>(Rp4.422.629.135,00)</u>	<u>(Rp4.249.170.385,00)</u>

Akumulasi Amortisasi sebesar (Rp4.422.629.135,00) merupakan penambahan beban amortisasi aset tak berwujud.

Tabel 94 Penjelasan Akumulasi Amortisasi

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	4.249.170.385,00
Mutasi Tambah	173.458.750,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	4.422.629.135,00

Lampiran 23 Rincian Amortisasi

- Mutasi Tambah sebesar Rp173.458.750,00 terdiri dari :

Tabel 95 Rincian Penjelasan Beban Amortisasi Per SKPD



No	Perangkat Daerah	Uraian (Rp)
1	Beban Amortisasi Dinas Pendidikan	104.665.000,00
2	Beban Amortisasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	32.812.500,00
3	Beban Amortisasi Dinas Perhubungan	22.687.500,00
4	Beban Amortisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	3.325.000,00
5	Beban Amortisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	9.968.750,00
Jumlah		173.458.750,00

F.6. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<u>31 Desember 2023</u> (Rp0,00)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp7.158.002.023,76)
--	--	--

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga atas pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati per 31 Desember 2023.

Tabel 96 Akumulasi Pnyusutan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Des 2022	7.158.002.023,76
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	7.158.002.023,76
Saldo per 31 Desember 2023	0,00

Mutasi kurang sebesar Rp7.158.002.023,76 merupakan reklas ke akumulasi penyusutan properti investasi



II. KEWAJIBAN

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

A.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Fihak Ketiga (PFK)	Rp8.397.651,00	Rp8.397.651,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah baik melalui BUD maupun yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang harus diserahkan kepada Pihak Lain.

Tabel 97 Penjelasan Utang PFK

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	8.397.651,00
Koreksi kurang	0,00
Saldo per 1 Januari 2023	8.397.651,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	8.397.651,00

Utang PFK tahun sebelumnya 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- IWP sebesar Rp433.353,00
- BPJS sebesar Rp159.358,00
- JKK sebesar Rp10.794,00
- JKM sebesar Rp32.383,00
- PPh Pasal 21 sebesar Rp7.761.763,00

A.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp21.000.000,00	Rp56.580,01

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.



Tabel 98 Penjelasan Pendapatan diterima Dimuka

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	56.580,01
Saldo per 1 Januari 2023	56.580,01
Mutasi Tambah	21.000.000,00
Mutasi Kurang	56.580,01
Saldo per 31 Desember 2023	21.000.000,00

- Mutasi Tambah sebesar Rp21.000.000,00 Pendapatan diterima dimuka yang berasal dari Hasil Sewa BMD pada Dinas Perikanan yang merupakan sewa (Rua *Beach/ Waterboom*) pada Tahun 2023 yang dibayarkan untuk Tahun Anggaran 2024.
- Mutasi Kurang sebesar Rp56.580,01 pembayaran yang dilakukan pada tahun 2022 untuk pembayaran tahun 2023 yang merupakan PBB-P2.

A.3. Utang Belanja

Utang Belanja	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<u>Rp13.006.948.577,12</u>	<u>Rp13.259.984.617,20</u>

Utang belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Tabel 99 Penjelasan Utang Belanja

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Des 2022	13.259.984.617,20
Koreksi tambah	156.610.328,00
Saldo per 1 Januari 2023	13.416.594.945,20
Mutasi Tambah	5.586.411.669,92
Mutasi Kurang	5.996.058.038,00
Saldo per 31 Des 2023	13.006.948.577,12

Lampiran 24 Rincian Utang Belanja



- Koreksi tambah saldo awal utang belanja sebesar Rp156.610.328,00 merupakan koreksi kesalahan pencatatan belanja barang berupa obat-obatan BLUD pada RSUD Waikabubak.
- Mutasi Tambah sebesar Rp5.586.411.669,92 terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai yaitu Jasa Pelayanan pada RSUD Waikabubak sebesar Rp1.917.000.000,00
 2. Belanja Pegawai yaitu kewajiban JKK dan JKM Kecamatan Tanarighu sebesar Rp536.011,00
 3. Belanja Barang BLUD pada RSUD Waikabubak sebesar Rp2.818.935.894,00
 4. Belanja jasa jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp50.437.915,92 terdiri dari jasa pelayanan kesehatan puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.032.222,84 dan jasa pelayanan kesehatan RS Hobakalla sebesar Rp1.405.693,08.
 5. Belanja Modal JIJ pembangunan sumur air tanah tahun 2023 pada Dinas PUPR sebesar Rp799.501.849,00
- Mutasi Kurang sebesar Rp5.996.058.038,00 terdiri dari :
 1. Pelunasan Kewajiban Belanja Pegawai yaitu Jasa Pelayanan pada RSUD Waikabubak sebesar Rp1.552.000.000,00
 2. Pelunasan kewajiban barang BLUD pada RSUD Waikabubak sebesar Rp4.429.058.038,00
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kewajiban hadiah lomba antar kelurahan sebesar Rp15.000.000,00

III. EKUITAS

EKUITAS

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<u>Rp1.403.687.451.866,84</u>	<u>Rp1.324.144.604.620,84</u>

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yaitu selisih nilai aset dengan kewajiban.



IV. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. Pendapatan – LO

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Daerah-LO	Rp 735.760.786.656,14	Rp638.139.842.933,83

Pendapatan – LO Kabupaten Sumba Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp735.760.786.656,14 jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp638.139.842.933,83 terjadi kenaikan sebesar Rp 97.620.943.722,31 atau 15,30 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 100 Pendapatan - LO

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	79.689.337.155,14	72.138.710.873,83	7.550.626.281,31	10,47%
2	Pendapatan Transfer	646.892.416.318,00	531.250.313.727,00	115.642.102.591,00	21,77%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	9.179.033.183,00	34.750.818.333,00	(25.571.785.150,00)	(73,59%)
	Jumlah	735.760.786.656,14	638.139.842.933,83	97.620.943.722,31	15,30%

A.1 Pendapatan Asli Daerah– LO

Pendapatan Asli	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Daerah-LO	Rp 79.689.337.155,14	Rp72.138.710.873,83

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Sumba Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.689.337.155,14 jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2022 sebesar Rp72.138.710.873,83 terjadi kenaikan sebesar Rp7.550.626.281,31 atau 10,47% dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 101 Pendapatan Asli Daerah – LO di SKPD

No	SKPD	Pendapatan Asli Daerah – LO			
		Pendapatan Pajak Daerah – LO	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	1.463.032.500,00	0,00	0,00
3	RSUD	0,00	0,00	0,00	29.030.312.360,71
4	RS Kelas D Pratama Hobakalla	0,00	5.160.000,00	0,00	0,00
5	Dinas PUPR	0,00	252.851.057,56	0,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	128.905.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	0,00	669.248.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	234.511.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Perikanan	0,00	27.300.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	268.186.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	43.961.000,00	0,00	0,00
12	Sekretariat Daerah	0,00	23.880.000,00	0,00	0,00
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	8.717.087.368,00	1.744.931.866,89
14	Badan Pendapatan Daerah	36.995.507.602,54	7.152.800,00	0,00	77.310.599,44
	Jumlah	36.995.507.602,54	3.124.187.357,56	8.717.087.368,00	30.852.554.827,04



Saldo Pendapatan Asli Daerah – LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp79.689.337.155,14 dengan rincian pada masing – masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 102 Rincian Saldo PAD Per SKPD

No	SKPD	Pendapatan Asli Daerah – LO
1	Dinas Kesehatan	1.463.032.500,00
2	RSUD	29.030.312.360,71
3	RS Kelas D Pratama Hobakalla	5.160.000,00
4	Dinas PUPR	252.851.057,56
5	Dinas Lingkungan Hidup	128.905.000,00
6	Dinas Perhubungan	669.248.000,00
7	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	234.511.000,00
8	Dinas Perikanan	27.300.000,00
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	268.186.000,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	43.961.000,00
11	Sekretariat Daerah	23.880.000,00
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.462.019.234,89
13	Badan Pendapatan Daerah	37.079.971.001,98
Jumlah		79.689.337.155,14

Tabel 103 Selisih Pendapatan Asli Daerah LO dan LRA 2023

No	Uraian	Pendapatan Asli Daerah-LO	Pendapatan Asli Daerah- LRA	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah	36.995.507.602,54	36.570.235.607,20	425.271.995,34
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.124.187.357,56	2.904.987.957,56	219.199.400,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaam Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	8.717.087.368,00	8.717.087.368,00	0,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.852.554.827,04	33.532.323.941,50	(2.679.769.114,46)
Jumlah		79.689.337.155,14	81.724.634.874,26	(2.035.297.719,12)

Terdapat perbedaan angka antara Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional dan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran pada setiap SKPD sebesar (Rp2.035.297.719,12) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 104 Rincian Selisih antara LRA dan LO Per SKPD

No	SKPD	Pendapatan – LO	Pendapatan – LRA	Selisih	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	1.463.032.500,00	1.477.189.100,00	(14.156.600,00)	Pelunasan piutang Retribusi daerah TA 2022 sebesar Rp14.156.100,00



No	SKPD	Pendapatan – LO	Pendapatan – LRA	Selisih	Keterangan
2	RSUD Waikabubak	29.030.312.360,71	31.029.280.929,71	(1.998.968.569,00)	Pelunasan piutang Penerimaan dari BPJS
4	RS Kelas D Pratama Hobakalla	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	-
5	Dinas PUPR	252.851.057,56	252.851.057,56	0,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	128.905.000,00	128.905.000,00	0,00	
7	Dinas Perhubungan	669.248.000,00	402.848.000,00	266.400.000,00	Penambahan Piutang Retribusi kekayaan daerah truk manda elu TA 2023 sebesar Rp266.400.000,00
8	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	234.511.000,00	267.771.000,00	(33.260.000,00)	Pelunasan piutang Ruko TA 2022 yang dibayar TA 2023 sebesar Rp33.260.000,00
9	Dinas Perikanan	27.300.000,00	48.300.000,00	(21.000.000,00)	Pendapatan Dibayar dimuka TA 2024 yang dibayarkan pada TA 2023 sebesar Rp21.000.000,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	268.186.000,00	268.186.000,00	0,00	-
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	43.961.000,00	43.745.000,00	216.000,00	Piutang Retribusi sewa rumah dinas TA 2023 sebesar Rp216.000,00
12	Sekretariat Daerah	23.880.000,00	23.880.000,00	0,00	-
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.462.019.234,89	11.121.819.780,35	(659.800.545,46)	Penambahan piutang denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 7.192.444,78 dan pelunasan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp666.992.990,24.
14	Badan Pendapatan Daerah	37.079.971.001,98	36.654.699.006,64	425.271.995,34	Penambahan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp640.632.271,33, pengakuan



No	SKPD	Pendapatan – LO	Pendapatan – LRA	Selisih	Keterangan
					Pendapatan Pajak Daerah atas Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 sebesar Rp56.580,01, pelunasan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp215.416.856,00,
	Jumlah	79.689.337.155,14	81.724.634.874,26	(2.035.297.719,12)	

- a. Selisih pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional dan Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp425.271.995,34 terdiri dari :

Tabel 105 Rincian Mutasi Pendapatan Pajak Daerah

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH (Rp.)	MUTASI KURANG (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pajak Hotel	69.770.627,91	45.104.432,00	24.666.195,91
2.	Pajak Restoran	515.850,00	0,00	515.850,00
3.	Pajak Reklame	3.874.125,00	0,00	3.874.125,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya	9.623.778,42	9.621.835,00	1.943,42
5.	PBB-P2	547.869.320,01	122.690.589,00	425.178.731,01
6.	BPHTB	9.035.150,00	38.000.000,00	(28.964.850,00)
	JUMLAH	640.688.851,34	215.416.856,00	425.271.995,34

- a. Mutasi tambah sebesar Rp640.688.851,34 merupakan piutang yang bertambah di Tahun 2023 terdiri dari :
- ✓ Pajak Hotel Sebesar Rp69.770.627,91 terdiri dari penambahan pajak piutang lancar hotel sumba nautil resort dan piutang macet sebesar Rp67.880.627,91 dan Rp250.000,00 penambahan piutang macet dan piutang diragukan sebesar Rp1.640.000,00 yang bersumber dari pajak home stay sumba pada tahun 2023.



- ✓ Penambahan Pajak Restoran sebesar Rp515.850,00 pada tahun 2023.
 - ✓ Penambahan Pajak Reklame pada tahun 2023 sebesar Rp3.874.125,00.
 - ✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebesar Rp9.623.778,42 pada tahun 2023.
 - ✓ Penambahan Penambahan Pajak Bumi, Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sebesar Rp547.869.320,01 yaitu reklas dari Pendapatan diterima dimuka PBB P2 sebesar Rp56.580,01, Piutang PBB P2 sebesar Rp547.812.740,00.
 - ✓ Penambahan BPHTB sebesar Rp9.035.150,00 pada tahun 2023
- b. Mutasi kurang sebesar Rp215.416.856,00 terdiri dari :
- ✓ Pelunasan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp45.104.432,00
 - ✓ Pelunasan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebesar Rp9.621.835,00
 - ✓ Pelunasan Piutang PBB-P2 sebesar Rp122.690.589,00
 - ✓ Pelunasan Piutang BPHTB sebesar Rp38.000.000,00

Tabel 106 Rincian Pendapatan Retribusi LO dan LRA

No	Uraian	Pendapatan Retribusi LO	Pendapatan Retribusi LRA	Selisih
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.471.787.500,00	1.471.787.500,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan	128.905.000,00	128.905.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	100.831.000,00	100.831.000,00	0,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	206.985.000,00	206.985.000,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	829.984.800,00	610.785.400,00	219.199.400,00
7	Retribusi Terminal	26.963.000,00	26.963.000,00	0,00
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	56.850.000,00	56.850.000,00	0,00
10	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	241.601.057,56	241.601.057,56	0,00
11	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol	23.880.000,00	23.880.000,00	0,00
JUMLAH		3.124.187.357,56	2.904.987.957,56	219.199.400,00



- b. Selisih pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional dan Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp219.199.400,00 Tahun 2023 terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdapat pada OPD:

Tabel 107 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2023

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	0,00	14.156.600,00	(14.156.600,00)
2.	Dinas Peternakan	216.000,00	0,00	216.000,00
3.	Dinas Perhubungan	266.400.000,00	0,00	266.400.000,00
4.	Dinas Koperindag	0,00	33.260.000,00	(33.260.000,00)
	JUMLAH	266.616.000,00	47.416.600,00	219.199.400,00

- Mutasi tambah sebesar Rp266.166.000,00 merupakan penambahan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun Anggaran 2023
 - Mutasi kurang sebesar Rp47.416.600,00 merupakan pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Selisih Lain-lain PAD yang sah pada LO dan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada LRA sebesar Rp2.679.769.114,46 terdapat pada OPD :

Tabel 108 Selisih Lain-lain PAD yang sah pada LO dan LRA

NO	URAIAN	LRA	LO	SELISIH (Rp)
1	RSUD	31.029.280.929,71	29.030.312.360,71	1.998.968.569,00
2	Badan Pendapatan Daerah	77.310.599,44	77.310.599,44	0,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.404.732.412,35	1.744.931.866,89	659.800.545,46
4	Dinas Perikanan	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
	JUMLAH	33.532.323.941,50	30.852.554.827,04	2.679.769.114,46

- RSUD Waikabubak Sebesar Rp1.998.968.569,00 terdiri dari Penambahan piutang BPJS Kesehatan Tahun 2023 sebesar Rp 2.713.301.831,00 dan pelunasan piutang BPJS Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp 4.712.270.400,00
- Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp659.800.545,46 terdiri dari pelunasan TGR Tahun 2022 sebesar Rp Rp666.992.990,24 dan pendapatan denda keterlambatan pekerjaan-LO sebesar Rp7.192.444,78.



- Dinas Perikanan sebesar Rp21.000.000,00 merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa BMD.

A.2 Pendapatan Transfer– LO

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Transfer-LO	Rp646.892.416.318,00	Rp531.250.313.727,00

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Sumba Barat untuk periode 31 Desember 2023 sebesar Rp646.892.416.318,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp531.250.313.727,00 mengalami kenaikan sebesar Rp115.642.102.591,00 atau 21,77% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109 Rincian Pendapatan Transfer – LO

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
A.2.1	Dana Perimbangan	596.346.836.168,00	498.205.139.253,00	98.141.696.915,00	19,70
1)	Dana Bagi Hasil Pajak	2.734.156.829,00	10.384.414.115,00	(7.650.257.286,00)	(73,67)
2)	Dana Bagi Hasil/SDA	1.890.609.000,00	1.070.018.977,00	820.590.023,00	76,69
3)	Dana Alokasi Umum	393.087.240.000,00	370.784.608.355,00	22.302.631.645,00	6,01
4)	Dana Alokasi Khusus	198.634.830.339,00	115.966.097.806,00	82.668.732.533,00	71,29
A.2.2	Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya	30.066.851.000,00	13.804.604.000,00	16.262.247.000,00	117,80
1)	Dana Insentif Daerah	30.066.851.000,00	13.804.604.000,00	16.262.247.000,00	117,80
A.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	20.478.729.150,00	19.240.570.474,00	1.238.158.676,00	6,44
1)	Bagi Hasil Pajak	20.478.729.150,00	19.240.570.474,00	1.238.158.676,00	6,44
	Jumlah	646.892.416.318,00	531.250.313.727,00	115.642.102.591,00	21,77

Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp646.892.416.318,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp626.413.687.168,00 dari:
 - a. Dana Transfer DBH dengan realisasi sebesar Rp4.624.765.829,00



- b. Dana Alokasi Umum dengan realisasi sebesar Rp393.087.240.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus dengan realisasi sebesar Rp198.634.830.339,00
 - d. Dan Dana Insentif Daerah dengan realisasi sebesar Rp30.066.851.000,00
2. Realisasi Transfer Pemerintah Antar Daerah sebesar Rp20.478.729.150,00 yang berasal dari Bagi hasil Pajak Provinsi.

A.3 Lain Lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Yang Sah-LO	Rp9.179.033.183,00	Rp34.750.818.333,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Kabupaten Sumba Barat untuk periode 31 Desember 2023 sebesar Rp9.179.033.183,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp34.750.818.333,00 mengalami penurunan sebesar (Rp25.571.785.150,00) atau (73,59%).

A.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Hibah-LO	Rp930.616.500,00	Rp16.401.424.767,00

Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp930.616.500,00 dan jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp414.116.500,00 tidak terdapat selisih (Rp516.500.000,00) merupakan pendapatan Hibah pada Dinas Kesehatan yaitu Hibah Dari Kementerian Kesehatan dari Alat Kesehatan Antropometri Kit dan Alat Kesehatan Kebinanan. Pendapatan hibah – LO terdapat di beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110 Pendapatan Hibah - LO

OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Kesehatan	516.500.000,00	Hibah Dari Kementerian Kesehatan dari Alat Kesehatan Antropometri Kit dan Alat Kesehatan Kebinanan



OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	102.795.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga yaitu Biaya pendaftaran lomba pacuan kuda Bupati Cup Sumba Barat
Sekretariat Daerah	11.321.500,00	Sumbangan Pihak Ketiga dari PT Timor Mitra Niaga
Badan Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,00	CSR Bank NTT
JUMLAH	930.616.500,00	

A.3.2 Pendapatan Lainnya-LO

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lainnya-LO	Rp8.248.416.683,00	Rp18.349.393.566,00

Pendapatan Lainnya-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.248.416.683,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp18.349.393.566,00 mengalami penurunan sebesar (Rp10.100.976.883,00) atau (73,59%) dan jika dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya-LRA Tahun 2023 sebesar Rp8.248.416.683,00 tidak terdapat selisih.

B. Beban- LO

Beban -LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp654.019.235.636,95	Rp619.793.523.684,28

Beban – LO Kabupaten Sumba Barat untuk periode 31 Desember 2023 sebesar Rp654.019.235.636,95 dan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp619.793.523.684,28 mengalami kenaikan sebesar Rp34.225.711.952,67 atau 5,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111 Beban - LO

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
B.1	Beban Operasi	614.411.074.136,95	581.643.774.306,28	32.767.299.830,67	5,63%
1	Beban Pegawai	194.361.563.027,00	180.955.822.029,00	13.405.740.998,00	7,41%



No	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
2	Beban Persediaan	120.535.184.472,21	110.115.045.383,36	10.420.139.088,85	9,46%
3	Beban Jasa	93.645.191.562,92	85.684.448.861,11	7.960.742.701,81	9,29%
4	Beban Pemeliharaan	6.146.336.520,55	4.315.800.031,00	1.830.536.489,55	42,41%
5	Beban Perjalanan Dinas	46.436.461.127,00	40.518.610.904,00	5.917.850.223,00	14,61%
6	Beban Hibah	7.494.882.761,00	5.389.604.731,00	2.105.278.030,00	39,06%
7	Beban Bantuan Sosial	1.415.200.000,00	11.204.413.531,00	(9.789.213.531,00)	(87,37%)
8	Beban Penyusutan	143.564.328.530,95	142.449.195.050,92	1.115.133.480,03	0,78%
9	Beban Penyisihan Piutang	450.961.635,32	819.903.159,89	(368.941.524,57)	(45,00)%
10	Beban Amortisasi	173.458.750,00	190.930.625,00	(17.471.875,00)	(9,15)%
11	Beban Lain-lain	187.505.750,00	0,00	187.505.750,00	0,00%
B.2	Beban Transfer	39.608.161.500,00	38.149.749.378,00	1.458.412.122,00	3,82%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	399.045.200,00	693.983.498,00	(294.938.298,00)	(42,50)%
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	39.209.116.300,00	37.455.765.880,00	1.753.350.420,00	4,68%
	Jumlah	654.019.235.636,95	619.793.523.684,28	34.225.711.952,67	5,52%

Terdapat perbedaan angka antara beban operasi pada Laporan Operasional dan belanja operasi pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar (Rp3.668.823.798,32) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112 Selisih antara LRA dan LO

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Pegawai	194.361.563.027,00	193.996.027.016,00	365.536.011,00
Beban Persediaan	120.535.184.472,21	125.203.073.707,00	(4.667.889.234,79)
Beban Jasa	93.645.191.562,92	93.890.751.797,00	(245.560.234,08)
Beban Pemeliharaan	6.146.336.520,55	6.146.011.022,00	325.498,55



Beban Perjalanan Dinas	46.436.461.127,00	46.436.461.127,00	0,00
Beban Hibah	7.494.882.761,00	6.616.118.600,00	878.764.161,00
Beban Bantuan Sosial	1.415.200.000,00	1.415.200.000,00	0,00
JUMLAH	470.034.819.470,68	473.703.643.269,00	3.668.823.798,32

1. Terdapat selisih antara Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA sebesar (Rp365.536.011,00) terdiri dari :
 - Penambahan kewajiban belanja pegawai BLUD sebesar Rp1.917.000.000,00 dan pelunasan kewajiban Belanja pegawai BLUD sebesar Rp1.552.000.000,00 pada RSUD Waikabubak.
 - Penambahan kewajiban belanja pegawai (JKK dan JKM) pada Kecamatan Tanarighu sebesar Rp536.011,00
2. Terdapat selisih Beban Barang-LO dengan Belanja Barang-LRA sebesar (Rp4.667.889.234,79) terdiri atas:
 - Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp109.056.500,00.
 - Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp191.845.066,00.
 - Penggunaan persediaan sebesar Rp18.900.296.811,45.
 - Penerimaan persediaan sebesar (Rp21.999.890.382,38).
 - Reklas ke beban pemeliharaan sebesar (Rp350.000,00).
 - Reklas ke beban hibah untuk pihak swasta sebesar (Rp9.902.236,00).
 - Reklas ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar (Rp834.588.730,00).
 - Reklas ke aset tetap Gedung dan bangunan sebesar (Rp525.613.124,00).
 - Reklas ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar (Rp222.538.139,86).
 - Reklas ke aset tetap lainnya sebesar (Rp44.955.000,00).
 - Reklas ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar (Rp100.000.000,00).
 - Reklas ke aset tak berwujud sebesar (Rp131.250.000,00).
10. Terdapat selisih Beban Jasa-LO dengan Belanja Jasa-LRA sebesar (Rp245.560.234,08) merupakan belanja jasa konsultan perencanaan yang direklas ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar



(Rp295.998.250,00) serta penambahan utang utang belanja jasa pelayanan kesehatan tahun 2023 sebesar Rp50.437.915,92 terdiri jasa pelayanan puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.032.222,84 dan jasa pelayanan kesehatan pada RS Hobakalla sebesar Rp1.405.693,08.

11. Terdapat selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp325.498,55 yang terdiri dari:

- Reklas dari beban barang sebesar Rp350.000,00.
- Reklas dari belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp1.214.329.498,55 dan belanja modal Gedung dan bangunan dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00.
- Reklas ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar (Rp1.102.460.000,00), reklas ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar (Rp96.914.000,00), dan reklas ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar (Rp34.980.000,00)

12. Terdapat selisih Beban Hibah-LO dengan Belanja Hibah-LRA sebesar Rp878.764.161,00 terdiri dari:

- Hibah persediaan kepada Rumah Sakit Swasta berupa alat kontrasepsi sebesar Rp9.902.236,00.
- Hibah 2 (dua) unit kendaraan kepada kejaksaan sebesar Rp468.861.925,00.
- Hibah persediaan kepada masyarakat berupa alat mesin pertanian sebesar Rp400.000.000,00.

Rincian Beban Pegawai – LO pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 113 Rincian Beban Pegawai Per SKPD

No	SKPD	Beban Pegawai – LO (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	74.939.948.746,00
2.	Dinas Kesehatan	24.843.768.084,00
3.	RSUD Waikabubak	12.267.573.856,00
4.	RS Kelas D Pratama Hobakalla	18.100.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.354.631.178,00
6.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.758.585.980,00
7.	Satpol PP & Pemadam Kebakaran	2.200.698.506,00



No	SKPD	Beban Pegawai – LO (Rp)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.197.089.361,00
9.	Dinas Sosial	1.483.226.133,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	1.659.490.231,00
11.	Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil	1.152.156.682,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.664.095.855,00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.041.364.440,00
14.	Dinas Perhubungan	1.806.008.162,00
15.	Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik	1.290.530.948,00
16.	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan	2.115.922.966,00
17.	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.313.010.450,00
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	994.798.959,00
19.	Dinas Perikanan	1.629.875.621,00
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.488.421.202,00
21.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.007.788.805,00
22.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.117.071.343,00
23.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.332.542.841,00
24.	Sekretariat Daerah	7.256.948.552,00
25.	Inspektorat	2.105.654.623,00
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.711.556.360,00
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.873.918.165,00
28.	Badan Pendapatan Daerah	2.701.673.598,00
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	4.189.925.340,00
30.	Sekretariat DPRD	13.769.304.676,00
31.	Kecamatan Loli	3.399.576.247,00
32.	Kecamatan Kota Waikabubak	3.817.143.488,00
33.	Kecamatan Wanokaka	823.542.163,00
34.	Kecamatan Lamboya	1.070.477.484,00
35.	Kecamatan Lamboya Barat	888.277.719,00
36.	Kecamatan Tanarighu	1.093.374.482,00
37.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	983.489.781,00
	Jumlah	194.361.563.027,00

Rincian Beban Persediaan – LO senilai Rp120.535.184.472,21 rincian pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 114. Rincian Beban Persediaan

NO	SKPD	Beban Persediaan – LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan	30.835.630.306,00
2	Dinas Kesehatan	7.445.263.730,80
3	RSUD Waikabubak	28.069.117.171,78
4	RS Pratama Hobakalla	962.714.071,38
5	Dinas PU dan Penataan Ruang	8.281.452.840,14
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.186.919.500,00
7	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	837.161.598,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	678.589.337,00
9	Dinas Sosial	877.033.717,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	583.241.100,00
11	Dinas Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil	378.400.212,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.100.166.590,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.611.363.627,00
14	Dinas Perhubungan	836.346.300,00
15	Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik	200.410.200,00
16	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan	519.101.260,00
17	Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu	222.241.493,00
18	Dinas Perpustakaan	257.441.000,00
19	Dinas Perikanan	718.011.968,50
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.753.232.750,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.633.393.375,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.752.526.062,61
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.081.423.520,00
24	Sekretariat Daerah	6.256.386.742,00
25	Inspektorat	506.692.606,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.218.640.800,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.514.791.400,00
28	Badan Pendapatan Daerah	437.221.162,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	381.260.100,00
30	Sekretariat DPRD	3.161.160.350,00
31	Kec. Loli	1.148.755.562,00
32	Kec. Kota Waikabubak	1.097.481.800,00
33	Kec. Wanokaka	536.960.170,00
34	Kec. Lamboya	476.728.200,00
35	Kec. Lamboya Barat	320.629.300,00
36	Kec. Tanarighu	415.277.350,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.242.017.200,00
	Jumlah	120.535.184.472,21

Rincian Beban Jasa – LO senilai Rp93.645.191.562,92 rincian pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 115. Rincian Beban Jasa - LO

No	SKPD	Beban Jasa – LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan	15.490.492.049,00
2	Dinas Kesehatan	18.183.931.196,84
3	RSUD Waikabubak	12.049.557.712,00
4	RS Pratama Hobakalla	1.357.479.898,08
5	Dinas PU dan Penataan Ruang	2.794.053.830,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	442.223.755,00
7	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	2.935.021.694,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	496.232.735,00
9	Dinas Sosial	965.072.240,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.371.641.280,00
11	Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil	742.954.935,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.194.186.012,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.003.517.200,00
14	Dinas Perhubungan	461.781.551,00
15	Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik	434.202.682,00
16	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	1.191.344.640,00
17	Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu	408.950.300,00
18	Dinas Perpustakaan	591.313.060,00
19	Dinas Perikanan	328.173.795,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	898.069.786,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.124.025.200,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	676.743.520,00
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	542.456.879,00
24	Sekretariat Daerah	8.708.369.211,00
25	Inspektorat	944.673.598,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.533.988.119,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.029.452.313,00
28	Badan Pendapatan Daerah	1.857.481.896,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.398.547.260,00
30	Sekretariat DPRD	1.202.759.831,00
31	Kec. Loli	1.327.056.135,00
32	Kec. Kota Waikabubak	1.713.007.275,00
33	Kec. Wanokaka	212.807.435,00
34	Kec. Lamboya	385.204.800,00
35	Kec. Lamboya Barat	176.012.900,00
36	Kec. Tanarighu	280.364.920,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.192.039.920,00
	Jumlah	93.645.191.562,92



Rincian Beban Pemeliharaan – LO senilai Rp6.146.336.520,55 rincian pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 116. Rincian beban Pemeliharaan - LO

No	SKPD	Beban Pemeliharaan – LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan	932.116.382,55
2	Dinas Kesehatan	385.448.796,00
3	RSUD Waikabubak	2.700.000,00
4	RS Pratama Hobakalla	96.194.000,00
5	Dinas PU dan Penataan Ruang	3.110.046.130,00
6	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	(7.706.200,00)
7	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	24.010.008,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.050.187,00
9	Dinas Sosial	106.838.575,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	165.692.855,00
11	Dinas Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil	35.628.162,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.707.670,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90.884.515,00
14	Dinas Perhubungan	94.309.662,00
15	Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik	18.829.295,00
16	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan	40.264.590,00
17	Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu	35.045.000,00
18	Dinas Perpustakaan	137.348.943,00
19	Dinas Perikanan	56.795.350,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.162.209,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	102.964.961,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(1.087.655.250,00)
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.422.170,00
24	Sekretariat Daerah	1.154.130.398,00
25	Inspektorat	74.056.989,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	49.924.100,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	187.767.607,00
28	Badan Pendapatan Daerah	86.529.780,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.474.905,00
30	Sekretariat DPRD	59.187.761,00
31	Kec. Loli	33.842.110,00
32	Kec. Kota Waikabubak	22.839.760,00
33	Kec. Wanokaka	12.539.650,00
34	Kec. Lamboya	0,00
35	Kec. Lamboya Barat	15.000.000,00
36	Kec. Tanarighu	4.751.700,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.193.750,00
	Jumlah	6.146.336.520,55

Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO senilai Rp46.436.461.127,00 rincian pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 117. Rincian Beban Perjalanan Dinas - LO

No	SKPD	Beban Perjalanan Dinas – LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.528.765.370,00
2	Dinas Kesehatan	4.761.905.869,00
3	RSUD Waikabubak	0,00
4	RS Pratama Hobakalla	281.001.637,00
5	Dinas PU Dan Penataan Ruang	2.965.159.123,00
6	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	583.952.100,00
7	Satpol PP & Pemadam Kebakaran	520.819.396,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	483.366.522,00
9	Dinas Sosial	839.418.570,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	300.311.612,00
11	Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil	451.018.011,00
12	Dinas Pemb. Masyarakat Desa	1.455.430.066,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.591.927.748,00
14	Dinas Perhubungan	490.835.557,00
15	Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik	639.669.500,00
16	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan	1.039.361.094,00
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	614.564.571,00
18	Dinas Perpustakaan	451.004.200,00
19	Dinas Perikanan	475.133.468,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.033.306.850,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	864.464.484,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	866.165.145,00
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	772.200.147,00
24	Sekretariat Daerah	4.720.906.080,00
25	Inspektorat	2.506.197.751,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.399.333.000,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.071.396.711,00
28	Badan Pendapatan Daerah	478.696.589,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.011.022.705,00
30	Sekretariat DPRD	4.699.151.071,00
31	Kec. Loli	413.330.000,00
32	Kec. Kota Waikabubak	304.310.000,00
33	Kec. Wanokaka	223.540.000,00
34	Kec. Lamboya	267.965.000,00
35	Kec. Lamboya Barat	283.585.000,00
36	Kec. Tanarighu	276.285.000,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	770.961.180,00
	Jumlah	46.436.461.127,00



Rincian Beban Hibah – LO senilai Rp7.494.882.761,00,00 rincian pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 118. Rincian Beban Hibah - LO

No	OPD	Beban Hibah – LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.791.145.000,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	400.000.000,00
3	Sekretariat Daerah	440.000.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.699.973.600,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.902.236,00
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	153.861.925,00
	Jumlah	7.494.882.761,00

Rincian Beban Bantuan Sosial – LO senilai Rp1.415.200.000,00 rincian pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 119. Rincian Beban Bantuan Sosial - LO

No	SKPD	Beban Bantuan Sosial – LO (Rp)
1	Dinas Sosial	1.415.200.000,00
	Jumlah	1.415.200.000,00

Rincian Beban Penyusutan Aset – LO senilai Rp143.564.328.530,95 rincian pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 120. Rincian Beban Penyusutan Aset - LO

No	SKPD	Beban Penyusutan – LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan	13.060.186.784,91
2	Dinas Kesehatan	11.402.385.631,34
3	RSUD Waikabubak	20.003.808.440,59
4	RS Pratama Hobakalla	120.485.315,00
5	Dinas PU Dan Penataan Ruang	79.338.500.222,94
6	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	501.686.400,96
7	Satpol PP & Pemadam Kebakaran	34.166.073,50
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	385.202.100,00
9	Dinas Sosial	185.238.415,35
10	Dinas Lingkungan Hidup	982.909.398,54
11	Dinas Adm. Kependudukan & Catatan Sipil	197.108.162,50
12	Dinas Pemb. Masyarakat Desa	140.324.832,75
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	530.736.387,82
14	Dinas Perhubungan	2.086.405.936,57



No	SKPD	Beban Penyusutan – LO (Rp)
15	Dinas Komunikasi Informasi Persandian & Statistik	188.335.665,00
16	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan	1.142.818.750,43
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	208.499.634,73
18	Dinas Perpustakaan	488.818.546,45
19	Dinas Perikanan	400.317.232,63
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	239.856.244,62
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.757.008.511,21
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	644.847.647,59
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	232.609.216,35
24	Sekretariat Daerah	5.233.676.038,88
25	Inspektorat	190.803.455,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	273.622.256,80
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	708.885.916,50
28	Badan Pendapatan Daerah	121.789.989,02
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	431.245.224,00
30	Sekretariat DPRD	579.592.424,64
31	Kec. Loli	204.136.012,19
32	Kec. Kota Waikabubak	169.951.772,82
33	Kec. Wanokaka	54.942.279,52
34	Kec. Lamboya	93.708.963,30
35	Kec. Lamboya Barat	76.303.504,50
36	Kec. Tanarighu	75.398.042,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78.017.100,00
	Jumlah	143.564.328.530,95

Beban Penyusutan Aset-LO sebesar Rp143.564.328.530,95 merupakan beban penyusutan pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja yaitu :

- a. Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp44.536.037.242,53.
- b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.855.278.207,89.
- c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp82.448.108.609,85.
- d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp43.006.560,00.
- e. Beban Penyusutan Properti Investasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp618.163.217,50.
- f. Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.423.240,03.



g. Beban Penyusutan Properti Investasi Jalan, irigasi dan Jaringan sebesar Rp12.311.453,15.

Rincian Beban Amortisasi Aset-LO senilai Rp173.458.750,00 rincian pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 121. Rincian Beban Amortisasi Aset - LO

No	SKPD	Beban Amortisasi Aset – LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	104.665.000,00
2	Dinas Perhubungan	22.687.500,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	3.325.000,00
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif	32.812.500,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.968.750,00
	Jumlah	173.458.750,00

Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO senilai Rp450.961.635,32 rincian pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 122. Rincian Beban Penyisihan Piutang -LO

No	SKPD	Beban Penyisihan Piutang – LO (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	8.279.421,32
2	Dinas Perhubungan	409.680.000,00
3	Dinas Koperasi dan Perdagangan	43.455.800,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	216.000,00
5	Dinas Kesehatan	(10.669.586,00)
	Jumlah	450.961.635,32

C. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional-LO

Surplus dari Kegiatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Operasional-LO	<u>Rp81.741.551.019,19</u>	<u>Rp18.346.319.249,55</u>

Surplus/defisit dari Operasi-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp81.741.551.019,19 merupakan selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp735.760.786.656,14 dan Beban-LO sebesar Rp654.019.235.636,95.



D. Surplus (Defisit) Non Operasional-LO

Surplus (Defisit) Non Operasional-LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp708.467.831,25)	(Rp1.471.569.600,00)

Defisit Non Operasional Tahun 2023 sebesar (Rp708.467.831,25) mengalami penurunan sebesar (Rp763.101.768,75) atau (51,86%) jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar (Rp1.471.569.600,00).

E. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta diluar kendali entitas pemerintah daerah.

E.1. Pendapatan Luar Biasa

Tidak terdapat pendapatan luar biasa Per 31 Desember 2023.

E.2. Beban Luar Biasa

Terdapat beban luar biasa per 31 Desember 2023 Sebesar Rp0,00.

Surplus/Defisit – LO

Surplus (Defisit) - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp81.033.083.187,94	Rp16.874.749.649,55

Surplus/Defisit – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp81.066.672.339,12 mengalami kenaikan sebesar Rp64.158.333.538,39 atau 380,20% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp16.874.749.649,55.

V. LAPORAN ARUS KAS

V.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

V.1.A Arus Masuk Kas

	2023	2022
Arus Masuk Kas	Rp799.010.701.167,26	Rp693.256.410.308,83



Jumlah tersebut merupakan jumlah arus masuk kas ke Bendahara Umum Daerah dari seluruh aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasional

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.1	Penerimaan Pajak Daerah	36.570.235.607,20	27.074.133.196,50
1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.904.987.957,56	2.721.500.962,00
1.3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.717.087.368,00	4.531.104.366,00
1.4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	33.532.323.941,50	36.118.573.414,33
1.5	Penerimaan Dana Perimbangan	596.938.229.145,00	497.135.120.276,00
1.6	Penerimaan Dana Insentif Daerah	30.066.851.000,00	13.804.604.000,00
1.7	Penerimaan Dana Desa	59.750.038.000,00	71.006.553.000,00
1.8	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	21.868.414.965,00	17.457.382.028,00
1.9	Penerimaan Hibah	414.116.500,00	5.058.045.500,00
1.10	Penerimaan Lainnya	8.248.416.683,00	18.349.393.566,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	799.010.701.167,26	693.256.410.308,83

Jumlah arus masuk kas ke Bendahara Umum Daerah dari seluruh aktivitas operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp799.010.701.167,26 jika dibandingkan Tahun 2022 Rp693.256.410.308,83 terjadi kenaikan sebesar Rp105.754.290.858,43 atau 15,25%.

V.1.B Arus Keluar Kas

	2023	2022
Arus Keluar Kas	Rp 573.061.842.769,00	Rp545.059.047.722,49

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 124 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasional

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.1	Belanja Pegawai	193.996.027.016,00	181.407.753.146,00



No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.2	Belanja Barang dan Jasa	271.676.297.653,00	237.954.832.811,49
2.3	Belanja Bunga	0,00	0,00
2.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00
2.5	Belanja Hibah	6.616.118.600,00	5.335.745.856,00
2.6	Belanja Bantuan Sosial dan Keuangan	1.415.200.000,00	10.970.413.531,00
2.7	Belanja Tidak Terduga	0,00	234.000.000,00
2.8	Bagi Hasil Pajak	399.045.200,00	693.983.498,00
2.9	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
2.10	Transfer lainnya	98.959.154.300,00	108.462.318.880,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	573.061.842.769,00	545.059.047.722,49

Tidak terdapat perbedaan angka antara arus keluar kas (belanja) aktivitas operasi pada Laporan Arus Kas dengan Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran hal ini disebabkan karena Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran bersumber pada angka SPJ dengan rincian sebagai berikut

Tabel 125 Selisih Antara LAK dan LRA

URAIAN	LAK (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH
Pegawai	193.996.027.016,00	193.996.027.016,00	0,00
Barang dan Jasa	271.676.297.653,00	271.676.297.653,00	0,00
Hibah	6.616.118.600,00	6.616.118.600,00	0,00
Bantuan Sosial	1.415.200.000,00	1.415.200.000,00	0,00
BTT	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak	399.045.200,00	399.045.200,00	0,00
Transfer Lainnya	98.959.154.300,00	98.959.154.300,00	0,00
JUMLAH	573.061.842.769,00	573.061.842.769,00	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2023	2022
	Rp225.948.858.398,26	Rp148.197.362.586,34

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 dan 2022.



V.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

V.2.A Arus Masuk Kas

Arus Masuk kas	2023	2022
	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan arus masuk kas dari aktivitas investasi. Selama tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 126 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2	Pendapatan penjualan atas Peralatan dan Mesin (Kendaraan)	0,00	0,00
3	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap lainnya	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah arus masuk kas	0,00	0,00

V.2.B Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas	2023	2022
	Rp212.734.251.661,00	Rp156.659.584.239,00

Jumlah tersebut merupakan arus keluar kas untuk memperoleh aset tetap Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tahun 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.1	Belanja Tanah	0,00	307.352.500,00
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	26.628.288.453,00	22.291.661.641,00
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	47.685.204.516,00	32.868.070.896,00
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	137.251.355.339,00	82.876.818.157,00
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.169.403.353,00	4.565.681.045,00



No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
2.7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	13.750.000.000,00
	Jumlah arus keluar kas	212.734.251.661,00	156.659.584.239,00

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp212.734.251.661,00) adalah realisasi pembayaran untuk pembelian aset tetap .

Tidak terdapat perbedaan angka antara arus keluar kas (belanja) aktivitas Investasi pada Laporan Arus Kas dan belanja modal Laporan Realisasi Anggaran.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari	2023	2022
Aktivitas Investasi	Rp(212.734.251.661,00)	Rp(156.659.584.239,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas investasi dan arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 dan 2022.

V.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

V.3.A Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas	2023	2022
	Rp 0,00	Rp 0,00

Tidak terdapat Arus Masuk Kas pada Tahun 2023.

V.3.B Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas	2023	2022
	Rp 0,00	Rp 0,00

Tidak terdapat Arus Masuk Kas pada Tahun 2023.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari	2023	2022
Aktivitas Pendanaan	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas aktivitas pendanaan Tahun 2023 dan 2022.



V.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

V.4.A Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas	2023	2022
	Rp53.953.017.977,00	Rp42.561.715.536,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan PFK	53.953.017.977,00	42.561.715.536,00
2	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun sebelumnya	0,00	0,00
3	Penerimaan Kontra Pos dan Pengembalian Uang Persediaan	0,00	0,00
	Jumlah arus masuk kas	53.953.017.977,00	42.561.715.536,00

V.4.B Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas	2023	2022
	Rp53.953.017.977,00	Rp43.013.303.285,10

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus keluar kas dari aktivitas transitoris yaitu penyetoran yang telah dilakukan atas penerimaan kas dari pihak ketiga (PFK) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2023 sebesar Rp53.953.017.977,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari	2023	2022
Aktivitas Transitoris	Rp 0,00	(Rp451.587.749,10)

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas transitoris pada tahun 2023 dan pada tahun 2022.

V.5 Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Akhir Kas di BUD	2023	2022
	Rp38.055.132.158,78	Rp24.839.559.392,14



Jumlah tersebut merupakan jumlah kenaikan/penurunan kas dan saldo awal kas di BUD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129 Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Kenaikan/ penurunan kas di BUD	13.214.606.737,26	(8.913.809.401,76)
	Saldo Awal Kas di BUD	24.839.559.392,14	33.754.596.452,91
	Koreksi SiLPA	(33.970,62)	(1.227.659,01)
2	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) – Terkait PFK	0,00	0,00
	Saldo Kas di BUD	Rp38.054.132.158,78	24.839.559.392,14

Jumlah sebesar Rp38.054.132.158,78 terdiri dari :

- a. Kas di BUD sebesar Rp 20.812.495.777,38
- b. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 3.027.000,00
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 990.000,00
- d. Kas di FKTP sebesar Rp 10.334.754.634,00
- e. Kas di BLUD sebesar Rp 3.016.875.102,30
- f. Kas di BOS sebesar Rp 2.232.229.813,10
- g. Kas di Bendahara BOK sebesar Rp 1.653.759.832,00

Saldo akhir kas Tahun 2023 sebesar Rp38.054.132.158,78 jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 sebesar Rp38.045.734.507,78 terdapat selisih sebesar Rp 8.397.651,00 yaitu utang perhitungan fihak ketiga yang belum dibayarkan.

VI. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:



VI.A Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2023	2022
	<u>Rp1.324.144.604.620,84</u>	<u>Rp1.317.669.050.330,97</u>

Jumlah ekuitas awal Tahun 2023 sebesar Rp1.324.144.604.620,84 merupakan nilai saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan Neraca Per 31 Desember 2022. Sedangkan Jumlah ekuitas awal Tahun 2022 sebesar Rp1.317.669.050.330,97 merupakan nilai saldo akhir ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021.

VI.B Surplus/Defisit-Laporan Operasional (LO)

Surplus/Defisit-LO	2023	2022
	<u>Rp81.033.083.187,94</u>	<u>Rp16.874.749.649,55</u>

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan Tahun 2023 sebesar Rp81.033.083.187,94. Sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp16.874.749.649,55. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO dalam Laporan Operasional.

VI.C Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp1.490.235.941,94) terdiri dari :

1. Koreksi ekuitas-Kas di Kas Daerah sebesar Rp20.000,00 merupakan koreksi kas tahun 2022 atas PFK yang telah dibayarkan,
2. Koreksi ekuitas-Persediaan sebesar Rp4.310.524.887,00 merupakan koreksi persediaan yang telah diserahkan ke masyarakat tahun 2020 sebesar (Rp359.070.000,00) dan penerimaan hibah persediaan Tahun 2018 dan 2019 dari Pemerintah Pusat-Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sebesar Rp4.669.594.887,00.
3. Koreksi ekuitas-Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.307.476.000,00 merupakan penerimaan hibah peralatan dan mesin tahun 2021 yaitu alat kesehatan dari Pemerintah Pusat-Kementerian



kesehatan sebesar Rp18.407.097.000,00 dan Aset tetap peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi tahun 2022 sebesar (Rp99.621.000,00).

4. Koreksi Ekuitas-Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp319.705.200,82 merupakan penerimaan hibah Gedung dan bangunan dari Pemerintah Pusat-Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp654.500.000,00, penghapusan Gedung dan bangunan sebesar (Rp375.752.668,75), dan reklas dari Aset Lain-lain atas bangunan rusak berat yang telah direhabilitasi sebesar Rp40.957.869,57.
5. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp24.216.351.701,76) terdiri dari:
 - Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp7.422.658.342,17) merupakan penyesuaian masa manfaat sesuai dengan kebijakan akuntansi sebesar Rp14.777.896,00, koreksi akumulasi penyusutan atas aset tetap lainnya berupa gong atau alat kesenian lainnya yang sebelumnya tercatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp30.510.403,50, penerimaan hibah peralatan dan mesin tahun 2021 yaitu alat kesehatan dari Pemerintah Pusat-Kementerian kesehatan sebesar (Rp7.779.308.566,67), hibah kendaraan ke Kejaksaan yaitu 2 (dua) unit mobil sebesar Rp311.361.925,00.
 - Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp791.424.357,45) merupakan penerimaan hibah Gedung dan bangunan dari Pemerintah Pusat-Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sebesar (Rp26.180.000,00), koreksi kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar (Rp1.140.997.026,20), penghapusan Gedung dan bangunan sebesar Rp375.752.668,75.
 - Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp15.649.027.235,47) merupakan koreksi kapitalisasi akumulasi penyusutan tahun 2022.
 - Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp353.241.766,67) merupakan koreksi atas Penyusutan Aset Tetap



Lainnya yang diperoleh sebelum Tahun 2023 terdiri atas gong, alat kesenian, maket dan foto dokumen sebesar (Rp300.934.500,00) dan koreksi atas akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya berupa gong atau alat kesenian lainnya yang dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp52.307.266,67).

6. Koreksi Ekuitas - Aset Lain-Lain sebesar (Rp55.000.000,00) merupakan koreksi atas kesalahan (*pendoublean*) pencatatan mobil Toyota Kijang KF 50 ED 151 B dengan KIB pengelola.
7. Koreksi Ekuitas- Kewajiban sebesar (Rp156.610.328,00) merupakan koreksi penambahan utang belanja barang dan jasa BLUD tahun 2022.

Lampiran 25 Rincian Koreksi Ekuitas

VI.D Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2023	2022
	<u>Rp1.403.687.451.866,84</u>	<u>Rp1.324.144.604.620,84</u>

Jumlah ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Sumba Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.403.687.451.866,84 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.324.144.604.620,84.



BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili Entitas Akuntansi

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam Tahun 2023 terdiri dari 6 Badan, 19 Dinas, 1 Inspektorat, 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 RSUD, 1 RS Tingkat D, 6 Kecamatan. Adapun domisili dari entitas akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 130. Nama OPD dan Alamat

No	Nama OPD	Alamat
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Jln. Weekarou
2	Dinas Kesehatan	Jln. Weekarou
3	RSUD Waikabubak	Jln. Adhyaksa
4	RS Kelas D Pratama Hobakalla	Hobakalla-Lamboya
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jln. Weekarou
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jln. Weekarou
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Jln. Weekarou
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jln. Weekarou
9	Dinas Sosial	Jln. Weekarou
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jln. Weekarou
11	Dinas Lingkungan Hidup	Jln. Weekarou
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jln. Basuki Rachmad
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jln. Weekarou
14	Dinas Perhubungan	Jln. Weekarou
15	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Jln. Teratai
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Jln. Weekarou
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jln. Weekarou
18	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Jln. Weekarou
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jln. Teratai
20	Dinas Perikanan	Jln. Weekarou
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jln. Adhyaksa
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jln. Adhyaksa
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jln. Weekarou
24	Sekretariat Daerah	Jln. Weekarou
25	Inspektorat Kabupaten	Jln. Basuki Rachmad
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jln. Weekarou
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jln. Weekarou
28	Badan Pendapatan Daerah	Jln. Weekarou
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	Jln. Weekarou
30	Sekretariat DPRD	Jln. Weekarou
31	Kecamatan Loli	Kecamatan Loli
32	Kecamatan Kota Waikabubak	Jln. Basuki Rachmad



No	Nama OPD	Alamat
33	Kecamatan Wanukaka	Kecamatan Wanukaka
34	Kecamatan Lamboya	Kecamatan Lamboya
35	Kecamatan Laboya Barat	Kecamatan Laboya Barat
36	Kecamatan Tanarighu	Kecamatan Tanarighu
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jln. Basuki Rachmad

B. Pengguna Anggaran Kabupaten Sumba Barat

Pengguna Anggaran wajib dan telah menyampaikan laporan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya selama Tahun 2023 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dan telah dilakukan konsolidasi untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Adapun nama-nama dari Pengguna Anggaran di Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 131. Pengguna Anggaran Kabupaten Sumba Barat

No	Nama OPD	Nama Pengguna Anggaran
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Lobu Ori, S.Pd, M.Pd
2	Dinas Kesehatan	drg. Bonar Sinaga, M. Kes
3	RSUD Waikabubak	dr. Japendi R. P. Saragih, SP.A.M.Biomed
4	RS Kelas D Pratama Hobakalla	Dr.Bintang Sihombing, M.Ec.Dev
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ir. Fredrik Gah
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	G. Umbu Yapu Ndapamede, S.pt
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kuala Djowa, S.sos
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Antonius Surfresna Kabba,S.STP
9	Dinas Sosial	Samuel Dato Mesa, S.sos
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Samuel Kali Kulla, S.Pd, M.Pd
11	Dinas Lingkungan Hidup	Melkianus L. U. Lage, SE
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bulu Bepa Tobu, SH
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Y. J. Dapamerang, SP, MM
14	Dinas Perhubungan	Yehuda Malorung, S.Pd
15	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	Ir. Israel Y. Meok, M.Si
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Drs. Victor Umbu Sulung, MM
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sairo Umbu Awang, SE
18	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Charles Hermana Weru, S.Sos
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Herybertus Ndama Nggilik, ST
20	Dinas Perikanan	Ir. Maxi M. O. St. Nange, M.Si
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jantje Lakumau, SP
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	drh. Hamadoku Wedo
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dedy Saba Ora, SE; M.Si
24	Sekretariat Daerah	Yermia Ndapa Doda, S.Sos
25	Inspektorat Kabupaten	Ledi Lagu, SH. M.Hum., CGCAE., CFrA
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Titus Diaz Liurai, S.Sos. MM



No	Nama OPD	Nama Pengguna Anggaran
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anita Rinie, S.Pi
28	Badan Pendapatan Daerah	Woldeman H. Wello, S.Si., M.Si
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Drs. Jemy Oktavianus Dima, MM
30	Sekretariat DPRD	Yohanis Niga Leidju, S.Hut; MP
31	Kecamatan Loli	Samuel B. Wulamale, S.Sos
32	Kecamatan Kota Waikabubak	Victor W. Dimu, SH
33	Kecamatan Wanukaka	Weingu Bora, S.Pd
34	Kecamatan Lamboya	Fajar Dwi Kurniawan, SH
35	Kecamatan Laboya Barat	Yulius Kadobo, ST
36	Kecamatan Tanarighu	David Umbu Pati, S.Sos
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bani Kadengara, SH

C. Keadaan Wilayah

Wilayah administratif Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 Kecamatan dibagi dalam 11 Kelurahan dan 63 Desa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132. Keadaan Wilayah

No	Kecamatan	Ibu kota	Desa	Kelurahan
1	Kota Waikakubak	Waikabubak	7	6
2	Loli	Dokakaka	9	5
3	Tana Righu	Malata	18	-
4	Wanukaka	Lahi Huruk	14	-
5	Lamboya	Kabukarudi	11	-
6	Laboya Barat	Hodi	4	-
	Jumlah		63	11

D. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat tahun 2023 didukung dengan SDM sebagai berikut :

Tabel 133. Sumber Daya Manusia

	Pangkat/Golongan Ruang	PNS		PPPK		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
		1	2	3	4	
A	Fungsional Tertentu	354	766	0	0	1120
1	Fungsional Kesehatan	48	265	0	0	313
2	Fungsional Kependidikan	176	384	0	0	560
3	Auditor	7	8	0	0	15



	Pangkat/Golongan Ruang	PNS		PPPK		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
4	Penyuluh Perikanan, Pertanian, Sosial	27	23	0	0	50
5	Lain-lain	96	86	0	0	182
B	Fungsional Umum	397	335	258	550	1540
1	Fungsional Umum	317	193	44	32	586
2	Fungsional Guru	43	84	153	346	626
3	Fungsional Kesehatan	31	57	61	172	321
4	Fungsional Auditor	1	1	0	0	2
5	Fungsional Penyuluh	5	0	0	0	5
C	Struktural	254	129	0	0	383
1	Eselon IV	116	69	0	0	185
2	Eselon III	107	57	0	0	164
3	Eselon II	31	3	0	0	34
4	Eselon I	0	0	0	0	0
	Jumlah ASN	1.005	1.230	258	550	3.043



BAB VII PENUTUP

A. Laporan Keuangan Pokok

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan transparan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 disusun dengan Pendapatan sebesar Rp799.010.701.167,26 dan Belanja Daerah ditambah transfer sebesar Rp785.796.094.430,00 sehingga mengalami surplus sebesar Rp13.214.606.737,26. Dalam Tahun 2023 terdapat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp Rp24.831.127.770,52 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 sehingga SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp38.045.734.507,78.

Neraca Tahun Anggaran 2023 disusun dengan jumlah Aset sebesar Rp1.416.723.798.094,96 , jumlah kewajiban sebesar Rp13.036.346.228,12, jumlah ekuitas sebesar Rp1.403.687.451.866,84 dan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp1.416.723.798.094,96.

Laporan Operasional Tahun 2023 disusun dengan Pendapatan sebesar Rp735.760.786.656,14 dan Beban sebesar Rp654.019.235.636,95 surplus/defisit dari operasi sebesar Rp81.741.551.019,19 surplus non operasional sebesar Rp0,00 defisit non operasional sebesar Rp708.467.831,25 , defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp81.033.083.187,94 sehingga surplus/defisit LO sebesar Rp81.033.083.187,94.

Laporan Arus Kas Tahun 2023 menunjukkan bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp225.948.858.398,26 , arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp212.734.251.661,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan



sebesar Rp0,00 dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 sehingga saldo akhir kas di BUD + FKTP + Kas dibendahara Pengeluaran + BOS + BOK sebesar Rp38.054.132.158,78.

Saldo akhir kas daerah per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp38.054.132.158,78 terdiri dari: Kas di Kas Daerah sebesar Rp20.812.495.777,38, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp3.027.000,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp990.000,00, Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp3.016.875.102,30, Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp10.334.754.634,00, Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.232.229.813,10, dan Kas di Bendahara BOK Puskesmas sebesar Rp1.653.759.832,00.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari kesatuan laporan keuangan, berfungsi memberikan informasi keuangan secara lengkap.


BUPATI SUMBA BARAT
YOHANIS DADE, SH

LAMPIRAN



REALISASI DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS HIBAH / BANSOS / BANTUAN KEUANGAN	NILAI DALAM DPA	REALISASI	NAMA PENERIMA	KET
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BEL. BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	399.045.200,00	399.045.200,00		
I	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	399.045.200,00	399.045.200,00		
-	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	399.045.200,00	399.045.200,00	399.045.200	-
	1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa				
	Penyetoran Kembali Dana Desa 2017		-		
	2 Bel. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bulan Jan s/d Juni 2020	399.045.200,00	199.508.400,00	399.045.200	
	I Tana Righu	114.012.900,00	57.002.400,00		
1	Loko Ry	6.334.050,00	3.166.800,00	Loko Ry	6.334.050,00
2	Lolo Wano	6.334.050,00	3.166.800,00	Lolo Wano	6.334.050,00
3	Malata	6.334.050,00	3.166.800,00	Malata	6.334.050,00
4	Ngadu Pada	6.334.050,00	3.166.800,00	Ngadu Pada	6.334.050,00
5	Lingu Lango	6.334.050,00	3.166.800,00	Lingu Lango	6.334.050,00
6	Karaka Nduku	6.334.050,00	3.166.800,00	Karaka Nduku	6.334.050,00
7	Wano Kasa	6.334.050,00	3.166.800,00	Wano Kasa	6.334.050,00
8	Wee Patola	6.334.050,00	3.166.800,00	Wee Patola	6.334.050,00
9	Zala Kadu	6.334.050,00	3.166.800,00	Zala Kadu	6.334.050,00
10	Bondo Tera	6.334.050,00	3.166.800,00	Bondo Tera	6.334.050,00
11	Manu Kuku	6.334.050,00	3.166.800,00	Manu Kuku	6.334.050,00
12	Lolo Tana	6.334.050,00	3.166.800,00	Lolo Tana	6.334.050,00
13	Kareka Nduku Utara	6.334.050,00	3.166.800,00	Kareka Nduku Utara	6.334.050,00
14	Kareka Nduku Selatan	6.334.050,00	3.166.800,00	Kareka Nduku Selatan	6.334.050,00
15	Manu Mada	6.334.050,00	3.166.800,00	Manu Mada	6.334.050,00
16	Elu Loda	6.334.050,00	3.166.800,00	Elu Loda	6.334.050,00
17	Kalebu Ana Kaka	6.334.050,00	3.166.800,00	Kalebu Ana Kaka	6.334.050,00
18	Tarona	6.334.050,00	3.166.800,00	Tarona	6.334.050,00
	II Loli	57.006.450,00	28.501.200,00		
1	Bera Dolu	6.334.050,00	3.166.800,00	Bera Dolu	6.334.050,00
2	Doka Kaka	6.334.050,00	3.166.800,00	Doka Kaka	6.334.050,00
3	Tana Rara	6.334.050,00	3.166.800,00	Tana Rara	6.334.050,00
4	Bali Ledo	6.334.050,00	3.166.800,00	Bali Ledo	6.334.050,00
5	Dedekadu	6.334.050,00	3.166.800,00	Dedekadu	6.334.050,00
6	Ubu Pede	6.334.050,00	3.166.800,00	Ubu Pede	6.334.050,00
7	Tema Tana	6.334.050,00	3.166.800,00	Tema Tana	6.334.050,00
8	Ubu Raya	6.334.050,00	3.166.800,00	Ubu Raya	6.334.050,00
9	Manola	6.334.050,00	3.166.800,00	Manola	6.334.050,00
	III Wanukaka	88.676.700,00	44.335.200,00		
1	Katiku Loku	6.334.050,00	3.166.800,00	Katiku Loku	6.334.050,00
2	Hupu Mada	6.334.050,00	3.166.800,00	Hupu Mada	6.334.050,00
3	Praibakul	6.334.050,00	3.166.800,00	Praibakul	6.334.050,00
4	Hoba Wawi	6.334.050,00	3.166.800,00	Hoba Wawi	6.334.050,00
5	Waihura	6.334.050,00	3.166.800,00	Waihura	6.334.050,00
6	Pahola	6.334.050,00	3.166.800,00	Pahola	6.334.050,00
7	Bali Loku	6.334.050,00	3.166.800,00	Bali Loku	6.334.050,00
8	Tara Manu	6.334.050,00	3.166.800,00	Tara Manu	6.334.050,00
9	Mamodu	6.334.050,00	3.166.800,00	Mamodu	6.334.050,00
10	Rua	6.334.050,00	3.166.800,00	Rua	6.334.050,00

NO	JENIS HIBAH / BANSOS / BANTUAN KEUANGAN	NILAI DALAM DPA	REALISASI	NAMA PENERIMA	KET
1	2	3	4	5	6
11	Rewa Rara	6.334.050,00	3.166.800,00	Rewa Rara	6.334.050,00
12	Wei Mangoma	6.334.050,00	3.166.800,00	Wei Mangoma	6.334.050,00
13	Ana Wolu	6.334.050,00	3.166.800,00	Ana Wolu	6.334.050,00
14	Pari Rara	6.334.050,00	3.166.800,00	Pari Rara	6.334.050,00
	IV Lamboya	69.674.550,00	34.834.800,00		
1	Patiala Bawa	6.334.050,00	3.166.800,00	Patiala Bawa	6.334.050,00
2	Wailibo	6.334.050,00	3.166.800,00	Wailibo	6.334.050,00
3	Lamboya Bawah	6.334.050,00	3.166.800,00	Lamboya Bawah	6.334.050,00
4	Watu Karere	6.334.050,00	3.166.800,00	Watu Karere	6.334.050,00
5	Kabu Karudi	6.334.050,00	3.166.800,00	Kabu Karudi	6.334.050,00
6	Rajaka	6.334.050,00	3.166.800,00	Rajaka	6.334.050,00
7	Sodana	6.334.050,00	3.166.800,00	Sodana	6.334.050,00
8	Laboya Dete	6.334.050,00	3.166.800,00	Laboya Dete	6.334.050,00
9	Ringu Rara	6.334.050,00	3.166.800,00	Ringu Rara	6.334.050,00
10	Bodo Hula	6.334.050,00	3.166.800,00	Bodo Hula	6.334.050,00
11	Pala Moko	6.334.050,00	3.166.800,00	Pala Moko	6.334.050,00
	V Kota Waikabubak	44.338.400,00	22.167.600,00		
1	Kodaka	6.334.100,00	3.166.800,00	Kodaka	6.334.100,00
2	Tebara	6.334.050,00	3.166.800,00	Tebara	6.334.050,00
3	Kalembu Kuni	6.334.050,00	3.166.800,00	Kalembu Kuni	6.334.050,00
4	Soba Rade	6.334.050,00	3.166.800,00	Soba Rade	6.334.050,00
5	Lapale	6.334.050,00	3.166.800,00	Lapale	6.334.050,00
6	Modu Waimaringu	6.334.050,00	3.166.800,00	Modu Waimaringu	6.334.050,00
7	Puu Mawo	6.334.050,00	3.166.800,00	Puu Mawo	6.334.050,00
	VI Laboya Barat	25.336.200,00	12.667.200,00		25.336.200,00
1	Wee Tana	6.334.050,00	3.166.800,00	Wee Tana	6.334.050,00
2	Gaura	6.334.050,00	3.166.800,00	Gaura	6.334.050,00
3	Patiala Dete	6.334.050,00	3.166.800,00	Patiala Dete	6.334.050,00
4	Harona Kalla	6.334.050,00	3.166.800,00	Harona Kalla	6.334.050,00
3	Bel. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bulan Juli s/d Des 2020	399.045.200,00	199.536.800,00		
	I Tana Righu	114.012.900,00	57.010.500,00		
1	Loko Ry	6.334.050,00	3.167.250,00	Loko Ry	
2	Lolo Wano	6.334.050,00	3.167.250,00	Lolo Wano	
3	Malata	6.334.050,00	3.167.250,00	Malata	
4	Ngadu Pada	6.334.050,00	3.167.250,00	Ngadu Pada	
5	Lingu Lango	6.334.050,00	3.167.250,00	Lingu Lango	
6	Karaka Nduku	6.334.050,00	3.167.250,00	Karaka Nduku	
7	Wano Kasa	6.334.050,00	3.167.250,00	Wano Kasa	
8	Wee Patola	6.334.050,00	3.167.250,00	Wee Patola	
9	Zala Kadu	6.334.050,00	3.167.250,00	Zala Kadu	
10	Bondo Tera	6.334.050,00	3.167.250,00	Bondo Tera	
11	Manu Kuku	6.334.050,00	3.167.250,00	Manu Kuku	
12	Lolo Tana	6.334.050,00	3.167.250,00	Lolo Tana	
13	Kareka Nduku Utara	6.334.050,00	3.167.250,00	Kareka Nduku Utara	

NO	JENIS HIBAH / BANSOS / BANTUAN KEUANGAN	NILAI DALAM DPA	REALISASI	NAMA PENERIMA	KET
1	2	3	4	5	6
14	Kareka Nduku Selatan	6.334.050,00	3.167.250,00	Kareka Nduku Selatan	
15	Manu Mada	6.334.050,00	3.167.250,00	Manu Mada	
16	Elu Loda	6.334.050,00	3.167.250,00	Elu Loda	
17	Kalebu Ana Kaka	6.334.050,00	3.167.250,00	Kalebu Ana Kaka	
18	Tarona	6.334.050,00	3.167.250,00	Tarona	
	II Loli	57.006.450,00	28.505.250,00		
1	Bera Dolu	6.334.050,00	3.167.250,00	Bera Dolu	
2	Doka Kaka	6.334.050,00	3.167.250,00	Doka Kaka	
3	Tana Rara	6.334.050,00	3.167.250,00	Tana Rara	
4	Bali Ledo	6.334.050,00	3.167.250,00	Bali Ledo	
5	Dedekadu	6.334.050,00	3.167.250,00	Dedekadu	
6	Ubu Pede	6.334.050,00	3.167.250,00	Ubu Pede	
7	Tema Tana	6.334.050,00	3.167.250,00	Tema Tana	
8	Ubu Raya	6.334.050,00	3.167.250,00	Ubu Raya	
9	Manola	6.334.050,00	3.167.250,00	Manola	
	III Wanukaka	88.676.700,00	44.341.500,00		
1	Katiku Loku	6.334.050,00	3.167.250,00	Katiku Loku	
2	Hupu Mada	6.334.050,00	3.167.250,00	Hupu Mada	
3	Praibakul	6.334.050,00	3.167.250,00	Praibakul	
4	Hoba Wawi	6.334.050,00	3.167.250,00	Hoba Wawi	
5	Waihura	6.334.050,00	3.167.250,00	Waihura	
6	Pahola	6.334.050,00	3.167.250,00	Pahola	
7	Bali Loku	6.334.050,00	3.167.250,00	Bali Loku	
8	Tara Manu	6.334.050,00	3.167.250,00	Tara Manu	
9	Mamodu	6.334.050,00	3.167.250,00	Mamodu	
10	Rua	6.334.050,00	3.167.250,00	Rua	
11	Rewa Rara	6.334.050,00	3.167.250,00	Rewa Rara	
12	Wei Mangoma	6.334.050,00	3.167.250,00	Wei Mangoma	
13	Ana Wolu	6.334.050,00	3.167.250,00	Ana Wolu	
14	Pari Rara	6.334.050,00	3.167.250,00	Pari Rara	
	IV Lamboya	69.674.550,00	34.839.750,00		
1	Patiala Bawa	6.334.050,00	3.167.250,00	Patiala Bawa	
2	Wailibo	6.334.050,00	3.167.250,00	Wailibo	
3	Lamboya Bawah	6.334.050,00	3.167.250,00	Lamboya Bawah	
4	Watu Karere	6.334.050,00	3.167.250,00	Watu Karere	
5	Kabu Karudi	6.334.050,00	3.167.250,00	Kabu Karudi	
6	Rajaka	6.334.050,00	3.167.250,00	Rajaka	
7	Sodana	6.334.050,00	3.167.250,00	Sodana	
8	Laboya Dete	6.334.050,00	3.167.250,00	Laboya Dete	
9	Ringu Rara	6.334.050,00	3.167.250,00	Ringu Rara	
10	Bodo Hula	6.334.050,00	3.167.250,00	Bodo Hula	
11	Pala Moko	6.334.050,00	3.167.250,00	Pala Moko	
	V Kota Waikabubak	44.338.400,00	22.170.800,00		
1	Kodaka	6.334.100,00	3.167.300,00	Kodaka	
2	Tebara	6.334.050,00	3.167.250,00	Tebara	
3	Kalembu Kuni	6.334.050,00	3.167.250,00	Kalembu Kuni	
4	Soba Rade	6.334.050,00	3.167.250,00	Soba Rade	
5	Lapale	6.334.050,00	3.167.250,00	Lapale	
6	Modu Waimaringu	6.334.050,00	3.167.250,00	Modu Waimaringu	
7	Puu Mawo	6.334.050,00	3.167.250,00	Puu Mawo	
	VI Laboya Barat	25.336.200,00	12.669.000,00		
1	Wee Tana	6.334.050,00	3.167.250,00	Wee Tana	
2	Gaura	6.334.050,00	3.167.250,00	Gaura	
3	Patiala Dete	6.334.050,00	3.167.250,00	Patiala Dete	
4	Harona Kalla	6.334.050,00	3.167.250,00	Harona Kalla	

NO	JENIS HIBAH / BANSOS / BANTUAN KEUANGAN	NILAI DALAM DPA	REALISASI	NAMA PENERIMA	KET
1	2	3	4	5	6



REALISASI DANA DESA DAN ADD TAHUN ANGGARAN 2023

	JENIS HIBAH / BANSOS / BANTUAN KEUANGAN	NILAI DALAM DPA	REALISASI	NAMA PENERIMA	KET
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BEL. BANT. KEU. KEPADA PROV/KAB/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	98.959.153.300,00	98.959.154.300,00		
I	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	98.959.153.300,00	98.959.154.300,00		
	A Dana Desa	59.750.038.000,00	59.750.038.000,00		Dari RKUD langsung ke Rek Desa
	B Alokasi Dana Desa (DAU 10%)	39.209.115.300,00	39.209.116.300,00	(1.000)	
	I Tana Righu	11.062.902.072,00	11.062.902.072,00		
	1 Loko Ry	659.183.004	659.183.004	Loko Ry	
	2 Lolo Wano	628.103.004	628.103.004	Lolo Wano	
	3 Malata	636.683.004	636.683.004	Malata	
	4 Ngadu Pada	621.683.004	621.683.004	Ngadu Pada	
	5 Lingu Lango	632.903.004	632.903.004	Lingu Lango	
	6 Karaka Nduku	621.983.004	621.983.004	Karaka Nduku	
	7 Wano Kasa	627.983.004	627.983.004	Wano Kasa	
	8 Wee Patola	608.216.604	608.216.604	Wee Patola	
	9 Zala Kadu	630.683.004	630.683.004	Zala Kadu	
	10 Bondo Tera	630.683.004	630.683.004	Bondo Tera	
	11 Manu Kuku	616.283.004	616.283.004	Manu Kuku	
	12 Lolo Tana	570.416.604	570.416.604	Lolo Tana	
	13 Kareka Nduku Utara	568.016.604	568.016.604	Kareka Nduku Utara	
	14 Kareka Nduku Selatan	604.283.004	604.283.004	Kareka Nduku Selatan	
	15 Manu Mada	617.483.004	617.483.004	Manu Mada	
	16 Elu Loda	619.883.004	619.883.004	Elu Loda	
	17 Kalebu Ana Kaka	586.016.604	586.016.604	Kalebu Ana Kaka	
	18 Tarona	582.416.604	582.416.604	Tarona	
	II Loli	5.557.147.836,00	5.557.147.836,00		
	1 Bera Dolu	654.683.004,00	654.683.004,00	Bera Dolu	
	2 Doka Kaka	610.016.604,00	610.016.604,00	Doka Kaka	
	3 Tana Rara	637.583.004,00	637.583.004,00	Tana Rara	
	4 Bali Ledo	643.583.004,00	643.583.004,00	Bali Ledo	
	5 Dedekadu	643.883.004,00	643.883.004,00	Dedekadu	
	6 Ubu Pede	640.883.004,00	640.883.004,00	Ubu Pede	
	7 Tema Tana	569.216.604,00	569.216.604,00	Tema Tana	
	8 Ubu Raya	601.283.004,00	601.283.004,00	Ubu Raya	
	9 Manola	556.016.604,00	556.016.604,00	Manola	
	III Wanokaka	8.569.499.256,00	8.569.499.256,00		
	1 Katiku Loku	634.133.004,00	634.133.004,00	Katiku Loku	
	2 Hupu Mada	623.183.004,00	623.183.004,00	Hupu Mada	
	3 Praibakul	618.383.004,00	618.383.004,00	Praibakul	
	4 Hoba Wawi	619.283.004,00	619.283.004,00	Hoba Wawi	
	5 Waihura	634.883.004,00	634.883.004,00	Waihura	
	6 Pahola	613.283.004,00	613.283.004,00	Pahola	
	7 Bali Loku	621.983.004,00	621.983.004,00	Bali Loku	
	8 Tara Manu	607.703.004,00	607.703.004,00	Tara Manu	
	9 Mamodu	610.883.004,00	610.883.004,00	Mamodu	
	10 Rua	616.883.004,00	616.883.004,00	Rua	
	11 Rewa Rara	562.616.604,00	562.616.604,00	Rewa Rara	
	12 Wei Mangoma	613.583.004,00	613.583.004,00	Wei Mangoma	
	13 Ana Wolu	581.216.604,00	581.216.604,00	Ana Wolu	
	14 Pari Rara	611.483.004,00	611.483.004,00	Pari Rara	
	IV Lamboya	7.005.053.044,00	7.005.053.044,00		
	1 Patiala Bawa	648.283.004,00	648.283.004,00	Patiala Bawa	
	2 Wailibo	652.183.004,00	652.183.004,00	Wailibo	
	3 Lamboya Bawah	627.683.004,00	627.683.004,00	Lamboya Bawah	
	4 Watu Karere	648.683.004,00	648.683.004,00	Watu Karere	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Lampiran 2

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

NO	SKPD	TA 2023				SALDO KAS DI BEND PENGELUARAN TA 2023
		SISA UP	SISA TU	Total Utang PFK Pusat	Pajak Restoran yang belum setor	
1	Dinas DPOK	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-
3	RSUD		-			-
4	RS Kelas D Pratama Hobakalla		-			-
5	Dinas PU & Penataan Ruang	-	-	-	-	-
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-
7	SatPol PP dan Pemadam kebakaran	-	-	-	-	-
8	BPBD	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	-			-
11	Dinas Kependudukan dan Capil	-	-	-	-	-
12	DPMD	990.000	-	-	-	990.000

NO	SKPD	TA 2023				SALDO KAS DI BEND PENGELUARAN TA 2023
		SISA UP	SISA TU	Total Utang PFK Pusat	Pajak Restoran yang belum setor	
13	DP5A	-	-	-	-	-
14	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
15	DKIPS	-	-	-	-	-
16	Dinas Korperindag	-	-	-	-	-
17	DPMPTSP	-	-	-	-	-
18	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	-	-	-	-	-
19	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-
20	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan	-	-	-	-	-
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan	-	-	-	-	-
22	Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan	-	-	-	-	-
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-
25	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-
26	Bappelitbangda	-	-	-	-	-
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-
27.A	PPKD	-	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-
29	BKPSDM	-	-	-	-	-
30	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Loli	-	-	-	-	-

NO	SKPD	TA 2023				SALDO KAS DI BEND PENGELUARAN TA 2023
		SISA UP	SISA TU	Total Utang PFK Pusat	Pajak Restoran yang belum setor	
32	Kecamatan Wanukaka	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Kota	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Lamboya	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Laboya Barat	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Tanarighu	-	-	-	-	-
37	Badan Kesbangpol	-	-	-	-	-
	TOTAL SISA KAS	990.000	-	-	-	990.000



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

Lampiran 3

KAS DI BENDARAHA FKTP

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL	PENERIMAAN KAPITASI	PENARIKAN KAPITASI	REALISASI BELANJA	SILPA KAPITASI	SALDO BANK PER 31 DES 2023	KURANG BAYAR JAGIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PUSKESMAS WEEKAROU	1.339.344.280,00	1.290.014.001,00	1.253.051.391,00	1.236.284.191,00	1.393.074.090,00	1.393.074.090,00	
2	PUSKESMAS TANARARA	734.702.277,00	715.155.002,00	663.743.705,00	657.700.322,00	792.156.957,00	792.156.957,00	
3	PUSKESMAS PADEDIWATU	547.705.044,00	522.623.943,00	453.002.085,00	450.950.486,00	619.378.501,00	619.378.501,00	
4	PUSKESMAS PUUWERI	2.084.430.846,00	1.633.915.304,00	1.444.101.135,00	1.444.077.250,00	2.274.268.900,00	2.274.268.900,00	
5	PUSKESMAS LAHIHURUK	753.051.509,00	741.790.551,00	634.126.442,00	630.890.161,00	863.951.899,00	863.951.899,00	
6	PUSKESMAS KAREKA NDUKU	722.213.386,00	483.375.706,00	399.458.636,00	399.458.636,00	806.130.456,00	806.130.456,00	
7	PUSKESMAS KABUKARUDI	1.542.153.040,00	1.154.056.620,00	1.056.167.309,00	1.056.038.843,00	1.640.170.817,00	1.640.170.817,00	
8	PUSKESMAS MALATA	780.611.272,00	540.133.296,00	572.778.547,00	564.000.207,00	756.744.361,00	756.771.397,00	27.036,00
9	PUSKESMAS GAURA	707.539.633,00	425.024.563,00	488.249.388,00	488.249.388,00	644.314.808,00	644.314.808,00	
10	PUSKESMAS LOLOWANO	136.786.382,00	329.143.568,00	280.949.599,00	280.949.171,00	184.980.779,00	184.980.779,00	
11	RS HOBA KALLA	173.405.920,00	413.184.129,00	227.337.255,00	227.337.255,00	359.252.794,00	359.556.030,00	303.236,00
	JUMLAH TOTAL	9.521.943.589,00	8.248.416.683,00	7.472.965.492,00	7.435.935.910,00	10.334.424.362,00	10.334.754.634,00	330.272,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Per 31 Desember 2023

Lampiran 4

KAS DIBENDAHARA BOS SD

No	Nama Sekolah	SALDO PER 31 DES 2022		SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	PENERIMAAN BOS	PENERIMAAN TEMUAN	LEBIH STOR	JUMLAH SALDO AWAL + MUTASI MASUK	BELANJA		TOTAL BELANJA	SALDO KAS	SALDO BANK	KAS DI TANGAN
		SALDO BANK	KAS DI TANGAN						BELANJA BARJAS	BELANJA MODAL				
1	SDN KABA RARA	6.825.235,46	245.500,00	7.070.735,46	78.585.500,00	200.000,00	-	85.856.235,46	74.573.700,00	3.875.000,00	78.448.700,00	7.407.535,46	7.407.535,46	-
2	SDN ZALA KADU	1.099.689,46	-	1.099.689,46	133.043.944,00	400.000,00	-	134.543.633,46	121.203.349,00	11.804.600,00	133.007.949,00	1.535.684,46	1.535.684,46	-
3	SDN WETENA SODANA	3.808.558,98	-	3.808.558,98	94.007.960,00	2.034.279,00	15.000,00	99.865.797,98	80.659.440,00	14.200.560,00	94.860.000,00	5.005.797,98	5.005.797,98	-
4	SDN WEELALAKA	83.048.116,32	-	83.048.116,32	106.567.000,00	1.402.000,00	-	191.017.116,32	88.636.000,00	23.894.000,00	112.530.000,00	78.487.116,32	78.487.116,32	-
5	SDN WEEKAROU	11.894,41	-	11.894,41	218.550.000,00	-	-	218.561.894,41	214.698.000,00	3.832.000,00	218.530.000,00	31.894,41	31.894,41	-
6	SDN WAIWIRUK	102.000,61	-	102.000,61	157.095.000,00	1.762.000,00	-	158.959.000,61	142.070.500,00	15.099.500,00	157.170.000,00	1.789.000,61	1.789.000,61	-
7	SDN TILLU MAREDA	15.231.290,44	-	15.231.290,44	312.255.000,00	9.000.000,00	-	336.486.290,44	257.224.500,00	58.045.500,00	315.270.000,00	21.216.290,44	21.216.290,44	-
8	SDN TABULO DARA	129.941,61	-	129.941,61	455.880.000,00	-	-	456.009.941,61	383.029.000,00	72.851.000,00	455.880.000,00	129.941,61	129.941,61	-
9	SDN SOBA RADE II	39.863.874,64	-	39.863.874,64	174.090.000,00	-	-	213.953.874,64	145.445.000,00	23.045.000,00	168.490.000,00	45.463.874,64	44.739.517,67	724.356,97
10	SDN LAPALE	25.130.022,64	-	25.130.022,64	204.899.000,00	1.228.108,00	-	231.257.130,64	176.001.000,00	32.949.000,00	208.950.000,00	22.307.130,64	22.307.130,64	-
11	SDN WETANA	6.165.207,38	-	6.165.207,38	246.439.400,00	2.872.887,00	11.000,00	255.488.494,38	197.160.000,00	49.290.000,00	246.450.000,00	9.038.494,38	9.038.494,38	-
12	SDN RAJAKA	7.615.508,29	-	7.615.508,29	247.242.437,00	-	8.000,00	254.865.945,29	214.016.713,00	35.917.700,00	249.934.413,00	4.931.532,29	4.931.532,29	-
13	SDN PUU WERI	14.610.855,76	-	14.610.855,76	372.864.603,00	-	-	387.475.458,76	335.866.403,00	36.998.200,00	372.864.603,00	14.610.855,76	14.610.855,76	-
14	SDN POGU KATODA	4.215.106,68	-	4.215.106,68	208.222.605,00	-	-	212.437.711,68	151.184.800,00	56.205.200,00	207.390.000,00	5.047.711,68	5.047.711,68	-
15	SDN PANGADU RADE	18.303.238,20	1.050.000,00	19.353.238,20	300.286.365,00	1.992.500,00	2.080,00	321.634.183,20	240.312.000,00	60.078.000,00	300.390.000,00	21.244.183,20	21.244.183,20	-
16	SDN PAHANGU LADI	6.890.900,39	-	6.890.900,39	110.959.600,00	-	-	117.850.500,39	93.711.400,00	21.408.600,00	115.120.000,00	2.730.500,39	2.730.500,39	-
17	SDN PADEDEWATU	841.529,08	-	841.529,08	99.640.000,00	3.100.000,00	-	103.581.529,08	80.501.700,00	19.738.300,00	100.240.000,00	3.341.529,08	3.341.529,08	-
18	SDN MAINDA OLE	51.464.856,78	-	51.464.856,78	87.228.000,00	-	-	138.692.856,78	71.358.000,00	15.870.000,00	87.228.000,00	51.464.856,78	51.464.856,78	-
19	SDN LOMANA PADAKA	945.905,64	-	945.905,64	144.150.000,00	1.500.000,00	-	146.595.905,64	131.347.200,00	12.802.800,00	144.150.000,00	2.445.905,64	2.445.905,64	-
20	SDN LINGU LANGO	79.618.069,11	-	79.618.069,11	173.909.400,00	-	-	253.527.469,11	137.552.000,00	34.742.000,00	172.294.000,00	81.233.469,11	81.233.469,11	-
21	SDN LAHI KANINU	5.373.763,78	-	5.373.763,78	118.840.000,00	1.132.763,00	-	125.346.526,78	96.786.500,00	22.253.500,00	119.040.000,00	6.306.526,78	6.306.526,78	-
22	SDN KADOKU	2.892.517,69	6.400,00	2.898.917,69	85.731.800,00	-	-	88.630.717,69	69.477.100,00	16.812.100,00	86.289.200,00	2.341.517,69	2.341.517,69	-
23	SDN IDA BONNU	2.063.698,01	300.002,00	2.363.700,01	112.513.800,00	1.945.500,00	16.900,00	116.839.900,01	103.578.100,00	8.935.000,00	112.513.100,00	4.326.800,01	4.326.800,01	-
24	SDN GOLLU SAPI	90.497.707,68	-	90.497.707,68	139.530.000,00	-	-	230.027.707,68	113.847.000,00	26.582.900,00	140.429.900,00	89.597.807,68	89.597.807,68	-
25	SDN GOLLU KALOGHO	35.552.368,98	-	35.552.368,98	187.487.900,00	-	-	223.040.268,98	148.332.000,00	40.458.000,00	188.790.000,00	34.250.268,98	34.250.268,98	-
26	SDN DEDEKADU	2.346.523,43	-	2.346.523,43	366.600.000,00	1.262.500,00	-	370.209.023,43	345.405.000,00	21.195.000,00	366.600.000,00	3.609.023,43	3.609.023,43	-
27	SDN BONDO EDE	61.032.268,80	-	61.032.268,80	170.632.600,00	9.670.000,00	-	241.334.868,80	131.296.000,00	39.824.000,00	171.120.000,00	70.214.868,80	70.214.868,80	-
28	SDN BOGORA WATU	260.842,90	514,00	261.356,90	189.720.000,00	-	-	189.981.356,90	144.968.500,00	44.751.500,00	189.720.000,00	261.356,90	261.356,90	-
29	SDN BALI KALEBU	9.652.849,08	-	9.652.849,08	199.170.000,00	-	-	208.822.849,08	162.936.000,00	40.734.000,00	203.670.000,00	5.152.849,08	5.152.849,08	-
30	SDN WEE TAME	170.812.674,50	-	170.812.674,50	143.061.800,00	378.974,91	-	314.253.449,41	108.045.800,00	29.987.900,00	138.033.700,00	176.219.749,41	176.219.749,41	-
31	SDN TANAKAKA	66.267.485,13	-	66.267.485,13	155.663.729,00	-	-	221.931.214,13	132.932.033,00	27.027.967,00	159.960.000,00	61.971.214,13	61.971.214,13	-
32	SDN SUBAKA	90.300,00	-	90.300,00	175.770.000,00	-	-	175.860.300,00	160.789.268,00	13.320.000,00	174.109.268,00	1.751.032,00	1.690.300,00	60.732,00
33	SDN PUU MAGHO	58.980.527,06	-	58.980.527,06	95.040.000,00	-	-	154.020.527,06	91.221.000,00	3.819.000,00	95.040.000,00	58.980.527,06	58.980.527,06	-
34	SDN PUU KANIKI	876.885,90	-	876.885,90	31.060.000,00	-	-	31.936.885,90	25.295.964,00	6.324.000,00	31.619.964,00	316.921,90	316.921,90	-
35	SDN PALA MOKO	647.292,90	-	647.292,90	97.386.372,00	-	348.704,00	98.382.368,90	79.864.986,00	17.335.800,00	97.200.786,00	1.181.582,90	1.181.582,90	-
36	SDN BALI LOKU	760.051,15	-	760.051,15	58.720.000,00	-	-	59.480.051,15	48.230.800,00	11.049.200,00	59.280.000,00	200.051,15	200.051,15	-
37	SDN BALI LEDO	32.527,28	-	32.527,28	106.950.000,00	-	-	106.982.527,28	104.848.845,00	1.951.155,00	106.800.000,00	182.527,28	182.527,28	-
38	SDI WEE SAKE	2.140.491,87	-	2.140.491,87	174.837.000,00	6.604.000,00	-	183.581.491,87	155.977.000,00	18.863.000,00	174.840.000,00	8.741.491,87	8.741.491,87	-
39	SDI WEE LOWA	75.089.147,62	-	75.089.147,62	121.830.000,00	-	-	196.919.147,62	100.154.800,00	21.425.200,00	121.580.000,00	75.339.147,62	75.339.147,62	-
40	SDI TANA RARA	669,91	30.000,00	30.669,91	84.576.000,00	-	-	84.606.669,91	78.844.940,00	5.659.100,00	84.504.040,00	102.629,91	102.629,91	-
41	SDI SOBA RADE	6.868.264,86	-	6.868.264,86	199.200.000,00	-	-	206.068.264,86	179.774.100,00	19.425.900,00	199.200.000,00	6.868.264,86	6.868.264,86	-
42	SDI PUU BOGHILA	75.128.683,14	74.118,00	75.202.801,14	92.305.000,00	-	-	167.507.801,14	75.201.000,00	23.274.000,00	98.475.000,00	69.032.801,14	69.032.801,14	-
43	SDI PULI	67.976.666,84	-	67.976.666,84	56.632.200,00	-	-	124.608.866,84	46.757.700,00	10.202.300,00	56.960.000,00	67.648.866,84	67.648.866,84	-
44	SDI PRAIGAGA II	8.257.209,63	-	8.257.209,63	200.739.880,00	-	500,00	208.997.589,63	164.467.000,00	37.498.000,00	201.965.000,00	7.032.589,63	7.032.589,63	-
45	SDI PANTAI RUA	177.286,71	-	177.286,71	109.614.200,00	-	-	109.791.486,71	87.492.000,00	21.048.000,00	108.540.000,00	1.251.486,71	1.251.486,71	-
46	SDI ANAKAKA	3.202.527,93	-	3.202.527,93	274.620.000,00	-	-	277.822.527,93	226.991.000,00	49.219.000,00	276.210.000,00	1.612.527,93	1.612.527,93	-
47	SDI BERA DOLU	1.263.737,44	-	1.263.737,44	139.494.000,00	-	-	140.757.737,44	123.307.600,00	16.192.400,00	139.500.000,00	1.257.737,44	1.257.737,44	-
48	SDI CONGA TANA	39.289.551,27	-	39.289.551,27	78.120.000,00	-	-	117.409.551,27	69.323.200,00	8.796.800,00	78.120.000,00	39.289.551,27	39.289.551,27	-
49	SDI DASSA ELU	12.972.272,04	-	12.972.272,04	166.470.000,00	1.600.000,00	-	181.042.272,04	133.169.200,00	33.294.000,00	166.463.200,00	14.579.072,04	14.579.072,04	-

No	Nama Sekolah	SALDO PER 31 DES 2022		SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	PENERIMAAN BOS	PENERIMAAN TEMUAN	LEBIH STOR	JUMLAH SALDO AWAL + MUTASI MASUK	BELANJA		TOTAL BELANJA	SALDO KAS	SALDO BANK	KAS DI TANGAN
		SALDO BANK	KAS DI TANGAN						BELANJA BARJAS	BELANJA MODAL				
50	SDI DOKA KAKA	4.970.064,19	295.550,00	5.265.614,19	135.127.000,00	-	-	140.392.614,19	124.471.800,00	15.028.200,00	139.500.000,00	892.614,19	892.614,19	-
51	SDI DONGA DELO	2.343.164,03	-	2.343.164,03	68.070.000,00	-	-	70.413.164,03	58.956.000,00	9.114.000,00	68.070.000,00	2.343.164,03	2.343.164,03	-
52	SDI GAYI LIKU	211.995,67	-	211.995,67	214.830.000,00	-	-	215.041.995,67	171.864.000,00	42.966.000,00	214.830.000,00	211.995,67	211.995,67	-
53	SDI HOBA JANGI	5.038.004,41	-	5.038.004,41	71.580.000,00	-	-	76.618.004,41	65.749.550,00	6.790.450,00	72.540.000,00	4.078.004,41	4.078.004,41	-
54	SDI HOBA TETE	43.405.216,27	-	43.405.216,27	85.192.650,00	2.322.050,00	-	130.919.916,27	75.762.650,00	9.430.000,00	85.192.650,00	45.727.266,27	45.727.266,27	-
55	SDI KABALI BEDU	643.986,35	-	643.986,35	114.390.000,00	-	-	115.033.986,35	93.040.500,00	21.349.500,00	114.390.000,00	643.986,35	643.986,35	-
56	SDI KABBA	5.804.525,54	-	5.804.525,54	108.740.000,00	-	-	114.544.525,54	87.092.000,00	21.948.000,00	109.040.000,00	5.504.525,54	5.504.525,54	-
57	SDI KURU TEPE	4.082.112,53	-	4.082.112,53	202.985.800,00	-	-	207.067.912,53	163.393.300,00	39.592.000,00	202.985.300,00	4.082.612,53	4.080.612,53	2.000,00
58	SDI LAHONA	1.791.894,25	-	1.791.894,25	47.960.000,00	-	-	49.751.894,25	41.120.200,00	6.974.200,00	48.094.400,00	1.657.494,25	1.657.494,25	-
59	SDI MAGHONAGA	11.377.678,43	2.100,00	11.379.778,43	102.297.900,00	-	-	113.677.678,43	96.419.500,00	5.880.500,00	102.300.000,00	11.377.678,43	11.377.678,43	-
60	SDI NGADU BONNU	5.453.597,00	4.810,00	5.458.407,00	144.917.000,00	-	8.500,02	150.383.907,02	116.808.000,00	29.202.000,00	146.010.000,00	4.373.907,02	4.373.907,02	-
61	SDI OMBALALO	2.505.076,31	-	2.505.076,31	164.999.450,00	400.000,00	-	167.904.526,31	128.791.000,00	36.749.000,00	165.540.000,00	2.364.526,31	2.364.526,31	-
62	SDN LARAWATU	58.734.789,03	-	58.734.789,03	248.805.677,00	-	-	307.540.466,03	227.740.000,00	21.500.000,00	249.240.000,00	58.300.466,03	58.300.466,03	-
63	SDN LOKORY	12.820.724,07	-	12.820.724,07	260.400.000,00	4.512.384,00	-	277.733.108,07	207.070.000,00	53.330.000,00	260.400.000,00	17.333.108,07	17.333.108,07	-
64	SDI WATU LITI	6.390.553,74	-	6.390.553,74	168.215.000,00	-	-	174.605.553,74	141.424.000,00	31.556.000,00	172.980.000,00	1.625.553,74	1.625.553,74	-
TOTAL		1.332.001.977,23	2.008.994,00	1.334.010.971,23	10.196.742.572,00	55.319.945,91	410.684,02	11.586.484.173,16	8.645.567.641,00	1.591.315.532,00	10.236.883.173,00	1.349.601.000,16	1.348.813.911,19	787.088,97



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Per 31 Desember 2023

Lampiran 4

KAS DIBENDAHARA BOS SMP

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2022		SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	PENERIMAAN DANA BOS TA. 2023	STOR TEMUAN	LEBIH STOR	JUMLAH SALDO AWAL + MUTASI MASUK	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	SALDO AKHIR	SALDO BANK	KAS DI TANGAN
		BANK	KAS DI TANGAN											
1	SMP NEGERI 1 LOLI	78.151.666,38	-	78.151.666,38	217.830.000,00	-	-	295.981.666,38	178.610.400,00	37.294.600,00	215.905.000,00	80.076.666,38	80.076.666,38	-
2	SMP NEGERI 2 LOLI	41.054.540,36	-	41.054.540,36	436.777.260,00	-	60.000,00	477.891.800,36	349.998.000,00	85.482.100,00	435.480.100,00	42.411.700,36	42.411.700,36	-
3	SMP NEGERI 3 LOLI	4.111.731,54	-	4.111.731,54	214.168.051,00	-	179,00	218.279.961,54	175.950.671,00	38.368.990,00	214.319.661,00	3.960.300,54	3.960.300,54	-
4	SMP NEGERI 4 LOLI	4.643.481,96	-	4.643.481,96	272.460.000,00	-	-	277.103.481,96	218.076.093,00	49.719.407,00	267.795.500,00	9.307.981,96	9.307.981,96	-
5	SMP NEGERI 5 LOLI	17.333.777,70	-	17.333.777,70	123.120.000,00	-	-	140.453.777,70	106.068.000,00	15.927.000,00	121.995.000,00	18.458.777,70	18.458.777,70	-
6	SMP NEGERI 6 LOLI	95.553.686,32	-	95.553.686,32	157.740.863,00	-	99.200,00	253.393.749,32	120.013.000,00	37.613.000,00	157.626.000,00	95.767.749,32	95.767.749,32	-
7	SMP NEGERI 7 LOLI	999.990,83	-	999.990,83	60.399.188,00	-	-	61.399.178,83	48.285.500,00	12.084.000,00	60.369.500,00	1.029.678,83	1.029.678,83	-
8	SMP NEGERI SATAP KABA RARA	5.366,14	-	5.366,14	49.016.150,00	-	-	49.021.516,14	39.190.600,00	9.804.000,00	48.994.600,00	26.916,14	26.916,14	-
9	SMP NEGERI 1 WANUKAKA	13.840.846,15	-	13.840.846,15	326.697.902,00	4.529.091,00	-	345.067.839,15	274.420.700,00	59.259.300,00	333.680.000,00	11.387.839,15	11.387.839,15	-
10	SMP NEGERI 2 WANUKAKA	10.186.320,58	-	10.186.320,58	243.233.500,00	-	-	253.419.820,58	198.816.000,00	49.704.000,00	248.520.000,00	4.899.820,58	4.899.820,58	-
11	SMP NEGERI 3 WANUKAKA	5.224.505,21	-	5.224.505,21	149.092.000,00	-	-	154.316.505,21	144.125.200,00	-	144.125.200,00	10.191.305,21	10.191.305,21	-
12	SMP NEGERI 4 WANUKAKA	6.559.049,15	-	6.559.049,15	82.901.981,00	950.000,00	-	90.411.030,15	59.773.379,00	17.556.000,00	77.329.379,00	13.081.651,15	9.131.285,15	3.950.366,00
13	SMP NEGERI 5 WANUKAKA	22.141.334,00	-	22.141.334,00	152.002.380,00	-	309.000,00	174.452.714,00	132.984.200,00	30.035.800,00	163.020.000,00	11.432.714,00	11.432.714,00	-
14	SMP NEGERI 1 WAIKABUBAK	20.073.350,47	-	20.073.350,47	528.817.870,00	2.638.000,00	-	551.529.220,47	424.821.300,00	106.246.600,00	531.067.900,00	20.461.320,47	20.461.320,47	-
15	SMP NEGERI 2 WAIKABUBAK	26.036.279,55	3.018.967,00	29.055.246,55	687.400.864,00	2.127.640,00	-	718.583.750,55	517.191.932,00	155.563.708,00	672.755.640,00	45.828.110,55	45.828.110,55	-
16	SMP NEGERI 3 WAIKABUBAK	11.093.423,18	-	11.093.423,18	757.692.400,00	-	-	768.785.823,18	600.653.961,00	164.856.039,00	765.510.000,00	3.275.823,18	3.275.823,18	-
17	SMP NEGERI 4 WAIKABUBAK	6.810.826,79	-	6.810.826,79	124.802.307,00	-	2.994,00	131.616.127,79	106.234.870,00	24.749.700,00	130.984.570,00	631.557,79	631.557,79	-
18	SMP NEGERI 5 WAIKABUBAK	12.038.140,56	-	12.038.140,56	136.800.000,00	500.000,00	-	149.338.140,56	116.572.000,00	20.228.000,00	136.800.000,00	12.538.140,56	12.538.140,56	-
19	SMP NEGERI SATAP LAPALE	2.646.377,52	30.138,00	2.676.515,52	115.265.818,00	-	-	117.942.333,52	91.781.817,00	23.484.001,00	115.265.818,00	2.676.515,52	2.676.515,52	-
20	SMP NEGERI 1 TANA RIGHU	18.424.414,07	-	18.424.414,07	344.560.000,00	5.000.000,00	-	367.984.414,07	253.987.980,00	63.612.000,00	317.599.980,00	50.384.434,07	50.384.434,07	-
21	SMP NEGERI 2 TANA RIGHU	52.421.462,80	-	52.421.462,80	336.120.000,00	-	196.000,00	388.737.462,80	259.403.263,00	76.716.737,00	336.120.000,00	52.617.462,80	52.617.462,80	-
22	SMP NEGERI 3 TANA RIGHU	31.703.842,21	-	31.703.842,21	292.979.949,00	-	51,00	324.683.842,21	234.384.000,00	58.596.000,00	292.980.000,00	31.703.842,21	31.703.842,21	-
23	SMP NEGERI 4 TANA RIGHU	10.629.797,85	-	10.629.797,85	216.600.000,00	-	-	227.229.797,85	179.904.740,00	36.695.260,00	216.600.000,00	10.629.797,85	10.629.797,85	-
24	SMP NEGERI 5 TANA RIGHU	10.031.215,62	-	10.031.215,62	325.174.550,00	-	5.450,00	335.211.215,62	254.852.734,00	70.321.816,00	325.174.550,00	10.036.665,62	10.036.665,62	-
25	SMP NEGERI 6 TANA RIGHU	4.260.093,71	-	4.260.093,71	151.741.400,00	-	-	156.001.493,71	120.901.400,00	30.780.000,00	151.681.400,00	4.320.093,71	4.320.093,71	-
26	SMP NEGERI 7 TANA RIGHU	1.768.086,37	-	1.768.086,37	163.020.000,00	-	-	164.788.086,37	131.328.100,00	31.691.900,00	163.020.000,00	1.768.086,37	1.768.086,37	-
27	SMP NEGERI 1 LAMBOYA	159.351.901,64	-	159.351.901,64	420.578.960,00	-	-	579.930.861,64	343.805.771,00	88.413.816,00	432.219.587,00	147.711.274,64	147.711.274,64	-
28	SMP NEGERI 2 LAMBOYA	31.974.968,10	-	31.974.968,10	446.501.114,00	1.178.200,00	-	479.654.282,10	360.651.000,00	90.696.990,00	451.347.990,00	28.306.292,10	28.306.292,10	-
29	SMP NEGERI 3 LAMBOYA	12.379.624,15	-	12.379.624,15	360.363.600,00	480.000,00	-	373.223.224,15	274.309.000,00	86.571.000,00	360.880.000,00	12.343.224,15	12.343.224,15	-
30	SMP NEGERI 4 LAMBOYA	23.445.655,89	-	23.445.655,89	179.516.417,00	2.263.728,00	179.972,00	205.405.772,89	142.695.728,00	35.999.300,00	178.695.028,00	26.710.744,89	26.710.744,89	-
31	SMP NEGERI 5 LAMBOYA	32.944.325,93	-	32.944.325,93	84.090.095,00	-	526,00	117.034.946,93	70.319.449,00	5.059.301,00	75.378.750,00	41.656.196,93	41.656.196,93	-
32	SMP NEGERI 6 LAMBOYA	5.076.177,36	-	5.076.177,36	82.263.048,00	-	-	87.339.225,36	65.619.048,00	16.644.000,00	82.263.048,00	5.076.177,36	5.076.177,36	-
33	SMP NEGERI SATAP TANA KAKA	10.901.739,18	-	10.901.739,18	210.208.609,00	-	-	221.110.348,18	171.456.000,00	42.864.000,00	214.320.000,00	6.790.348,18	6.790.348,18	-
34	SMP NEGERI 1 LABOYA BARAT	17.593.803,80	-	17.593.803,80	341.660.000,00	250.000,00	-	359.503.803,80	301.629.400,00	40.030.600,00	341.660.000,00	17.843.803,80	17.843.803,80	-
35	SMP NEGERI 2 LABOYA BARAT	47.285.498,87	-	47.285.498,87	187.759.700,00	-	300,00	235.045.498,87	160.648.700,00	27.111.000,00	187.759.700,00	47.285.798,87	47.285.798,87	-
TOTAL		848.697.301,94	3.049.105,00	851.746.406,94	8.979.355.976,00	19.916.659,00	853.672,00	9.851.872.713,94	7.229.463.936,00	1.739.779.965,00	8.969.243.901,00	882.628.812,94	878.678.446,94	3.950.366,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Lampiran 5

KAS DI BENDAHARA BOK

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL	REALISASI PENDAPATAN BOK	REALISASI BELANJA BOK	SALDO KAS	SALDO BANK PER 31 DES 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PUSKESMAS WEEKAROU	-	796.319.300,00	727.068.908,00	69.250.392,00	69.250.392,00
2	PUSKESMAS TANARARA	-	568.860.600,00	456.292.774,00	112.567.826,00	112.567.826,00
3	PUSKESMAS PADEDIWATU	-	557.257.400,00	348.230.804,00	209.026.596,00	209.026.596,00
4	PUSKESMAS PUUWERI	-	1.190.792.400,00	933.431.656,00	257.360.744,00	257.360.744,00
5	PUSKESMAS LAHIHURUK	-	655.809.700,00	497.474.652,00	158.335.048,00	158.335.048,00
6	PUSKESMAS KAREKA NDUKU	-	480.841.900,00	330.104.926,00	150.736.974,00	150.736.974,00
7	PUSKESMAS KABUKARUDI	-	1.031.849.000,00	769.447.737,00	262.401.263,00	262.401.263,00
8	PUSKESMAS MALATA	-	624.139.600,00	511.876.849,00	112.262.751,00	112.262.751,00
9	PUSKESMAS GAURA	-	632.484.300,00	450.517.589,00	181.966.711,00	181.966.711,00
10	PUSKESMAS LOLOWANO	-	577.585.400,00	437.733.873,00	139.851.527,00	139.851.527,00
	JUMLAH TOTAL	-	7.115.939.600,00	5.462.179.768,00	1.653.759.832,00	1.653.759.832,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Lampiran 6

PERHITUNGAN PIUTANG PAJAK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH PIUTANG PER 1 JANUARI 2022	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG	
I	PIUTANG LANCAR	737.918.663,00	-	-	737.918.663,00	81.307.696,33	109.422.560,00	709.803.799,33
1	PAJAK REKLAME	500,00	-	-	500,00	3.874.125,00	-	3.874.625,00
2	PAJAK HOTEL	-	-	-	-	67.880.627,91	-	67.880.627,91
3	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	8,00	-	-	8,00	1.943,42	-	1.951,42
4	RESTORAN	-	-	-	-	515.850,00	-	515.850,00
5	WARUNG MAKAN	-	-	-	-	-	-	-
6	TENDA BAKSO	-	-	-	-	-	-	-
7	MAKAN MINUM RAPAT-RAPAT PELATIHAN	-	-	-	-	-	-	-
8	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2	557.455.045,00	-	-	557.455.045,00	-	71.422.560,00	486.032.485,00
9	BPHTB	180.463.110,00	-	-	180.463.110,00	9.035.150,00	38.000.000,00	151.498.260,00
II	PIUTANG KURANG LANCAR	316.400.618,00	-	-	316.400.618,00	-	96.372.461,00	220.028.157,00
1	PAJAK HOTEL	45.104.432,00	-	-	45.104.432,00	-	45.104.432,00	-
2	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	-	-	-	-	-	-
3	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2	271.296.186,00	-	-	271.296.186,00	-	51.268.029,00	220.028.157,00
III	PIUTANG DIRAGUKAN	487.807.665,00	-	-	487.807.665,00	263.506.996,00	9.621.835,00	741.692.826,00
1	PAJAK HOTEL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.640.000,00	-	2.640.000,00
2	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	9.621.835,00	-	-	9.621.835,00	-	9.621.835,00	-
3	PAJAK RESTORAN	172.400,00	-	-	172.400,00	-	-	172.400,00
4	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2	477.013.430,00	-	-	477.013.430,00	261.866.996,00	-	738.880.426,00
	BPHTB	-	-	-	-	-	-	-
IV	PIUTANG MACET	1.619.925.519,00	-	-	1.619.925.519,00	295.817.579,00	-	1.915.743.098,00

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH PIUTANG PER 1 JANUARI 2022	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG	
1	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	764.302,00	-	-	764.302,00	9.621.835	-	10.386.137,00
2	PAJAK REKLAME	824.950,00	-	-	824.950,00		-	824.950,00
3	PAJAK HOTEL	75.982.750,00	-	-	75.982.750,00	250.000,00	-	76.232.750,00
4	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2	1.534.258.517,00	-	-	1.534.258.517,00	285.945.744,00	-	1.820.204.261,00
	BPHTB	8.095.000,00	-	-	8.095.000,00		-	8.095.000,00
	JUMLAH TOTAL	3.162.052.465,00	-	-	3.162.052.465,00	640.632.271,33	215.416.856,00	3.587.267.880,33



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Lampiran 7

PERHITUNGAN PIUTANG RETRIBUSI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		SALDO PER 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG	
1	2	Rp 3	4	5	6	7	8	9
	PIUTANG RETRIBUSI	Rp 5.156.200.590	Rp -	Rp -	Rp 5.156.200.590	Rp 908.117.000	Rp 688.917.600	Rp 5.375.399.990
1	DINAS KESEHATAN	Rp 14.156.600			Rp 14.156.600		14.156.600	Rp -
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 155.720.990		-	Rp 155.720.990			Rp 155.720.990
3	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 4.197.600.000			Rp 4.197.600.000	412.800.000,00	146.400.000,00	Rp 4.464.000.000
4	DINAS KOPERINDAG	Rp 477.833.000			Rp 477.833.000	183.170.000,00	216.430.000,00	Rp 444.573.000
5	DINAS PERTANIAN	Rp 302.890.000			Rp 302.890.000	268.186.000,00	268.186.000,00	Rp 302.890.000
6	DINAS PERIKANAN	Rp 8.000.000			Rp 8.000.000	-		Rp 8.000.000
7	DINAS PETERNAKAN	Rp -			Rp -	43.961.000,00	43.745.000,00	Rp 216.000
	TOTAL	Rp 5.156.200.590	-	-	5.156.200.590,00	908.117.000,00	688.917.600,00	5.375.399.990,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Lampiran 8

PERHITUNGAN PIUTANG TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		SALDO PER 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PIUTANG TRANSFER	6.637.639.077,00	-	-	6.637.639.077,00	5.247.953.262,00	6.637.639.077,00	5.247.953.262,00	
1	BKAPD	6.637.639.077,00	-	-	6.637.639.077,00	5.247.953.262,00	6.637.639.077,00	5.247.953.262,00	
	PKB	1.680.940.605,00			1.680.940.605,00	1.898.958.205,00	1.680.940.605,00	1.898.958.205,00	
	BBNKB	1.324.986.344,00			1.324.986.344,00	833.301.519,00	1.324.986.344,00	833.301.519,00	
	PBB-KB	3.629.998.863,00			3.629.998.863,00	2.514.794.628,00	3.629.998.863,00	2.514.794.628,00	
	AIR BAWAH TANAH	1.713.265,00			1.713.265,00	898.910,00	1.713.265,00	898.910,00	
	TOTAL	6.637.639.077,00	-	-	6.637.639.077,00	5.247.953.262,00	6.637.639.077,00	5.247.953.262,00	



PERHITUNGAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		SALDO PER 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	64.058.104,00	-	-	64.058.104,00	-	-	64.058.104,00	
a	DENDA PAJAK DAERAH	55.927.024,00	-	-	55.927.024,00	-	-	55.927.024,00	
	Pajak Hotel dan Restoran	4.846.800,00	-	-	4.846.800,00	-	-	4.846.800,00	
	Denda PBB - P2	49.917.915,00	-	-	49.917.915,00	-	-	49.917.915,00	
	Denda Pajak Reklame	352.809,00	-	-	352.809,00	-	-	352.809,00	
	Denda Pajak BPHTB	809.500,00	-	-	809.500,00	-	-	809.500,00	
b	DENDA RETRIBUSI DAERAH	8.131.080,00	-	-	8.131.080,00	-	-	8.131.080,00	
	Sewa Rumah Dinas	8.131.080,00	-	-	8.131.080,00	-	-	8.131.080,00	
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.104.412,00	-	-	10.104.412,00	7.192.444,78	-	17.296.856,78	
	Piutang Gaji	9.844.900,00			9.844.900,00			9.844.900,00	
	DBH Non Tunai melalui TDF	259.512,00			259.512,00			259.512,00	
	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan					7.192.444,78		7.192.444,78	
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	4.712.270.400,00		-	4.712.270.400,00	2.713.301.831,00	4.712.270.400,00	2.713.301.831,00	
	Klaim BPJS (RSUD)	4.712.270.400,00			4.712.270.400,00	2.713.301.831,00	4.712.270.400,00	2.713.301.831,00	
	JUMLAH TOTAL	4.786.432.916,00	-	-	4.786.432.916,00	2.720.494.275,78	4.712.270.400,00	2.794.656.791,78	



PIUTANG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PU DAN PERTAMBANGAN	288.430.156,23	-	-	288.430.156,23	-	-	288.430.156,23	
1	PIUTANG PLTS	202.065.000,00	-	-	202.065.000,00	-	-	202.065.000,00	
	DESA SOBAWAWI :								
	- Wada Rato	690.000			690.000,00			690.000,00	
	- Djawu Bera	660.000			660.000,00			660.000,00	
	- Raga Maru	690.000			690.000,00			690.000,00	
	- Djodi Poro Tana	690.000			690.000,00			690.000,00	
	- Laiya Sabba	675.000			675.000,00			675.000,00	
	- Keba Moto	705.000			705.000,00			705.000,00	
	- Markus B. Ruwa	690.000			690.000,00			690.000,00	
	- N. Djaga Wali	705.000			705.000,00			705.000,00	
	- Kebe Mota Leba	675.000			675.000,00			675.000,00	
	- Dj. Lango Lali	675.000			675.000,00			675.000,00	
	DESA KAREKA NDUKU :				-			-	
	- S. K. Bili	360.000			360.000,00			360.000,00	
	- Agus Dappa	510.000			510.000,00			510.000,00	
	- Ruben B. Bili	405.000			405.000,00			405.000,00	
	- D. T. A. Bili	600.000			600.000,00			600.000,00	
	- Bernabas D. Kallu	690.000			690.000,00			690.000,00	
					-			-	
					-			-	
	DESA LINGU LANGO :				-			-	
	- Yusuf Malo	570.000			570.000,00			570.000,00	
	- Yulius U. Robaka	660.000			660.000,00			660.000,00	
	- Frans B. Lende	705.000			705.000,00			705.000,00	
	- A. L. Awa	660.000			660.000,00			660.000,00	

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- D. Tamo Ama	705.000			705.000,00			705.000,00	
					-			-	
	KELURAHAN WEE KEROU :								
	- Alfred Ng. Leba	600.000			600.000,00			600.000,00	
	- Kuri Taggu	740.000			740.000,00			740.000,00	
	- Kuri Bili	740.000			740.000,00			740.000,00	
	- Ngila Mota	740.000			740.000,00			740.000,00	
	- D. Soli Ama Sairo	740.000			740.000,00			740.000,00	
					-			-	
	DESA UBU PEDE :								
	- Kering Wolu	645.000			645.000,00			645.000,00	
	- Lede Yane	690.000			690.000,00			690.000,00	
	- B. Peka Mila	705.000			705.000,00			705.000,00	
	- Y. Gollu Wola	645.000			645.000,00			645.000,00	
	- A. Sogar Bani	705.000			705.000,00			705.000,00	
					-			-	
	DESA ZALA KADU :								
	- Melki Bulu	885.000			885.000,00			885.000,00	
	- D. Bulu Bili	420.000			420.000,00			420.000,00	
	- A. Yanus Bora	345.000			345.000,00			345.000,00	
	- B. Bili Nono	345.000			345.000,00			345.000,00	
	- Y. Baiyo Bili	345.000			345.000,00			345.000,00	
					-			-	
	DESA LOLO WANNO :								
	- Agus Dappa	705.000			705.000,00			705.000,00	
	- S. U. Dasa	705.000			705.000,00			705.000,00	
	- Y. T. A. Bili	705.000			705.000,00			705.000,00	
	- Dominggus Baiyo	705.000			705.000,00			705.000,00	
	- Agus Lamba	705.000			705.000,00			705.000,00	
					-			-	
	DESA UBU PEDE :								
	- Yohanes Jala Mesa	405.000			405.000,00			405.000,00	
	- Y. Bani Mude	615.000			615.000,00			615.000,00	
	- Vato Mesa	735.000			735.000,00			735.000,00	
	- Dangi Loja	660.000			660.000,00			660.000,00	
	- Bora Bere	660.000			660.000,00			660.000,00	
					-			-	

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KEL. WEE KEROU :				-			-	
	- Bora Bili	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Bora Wola	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Kuri Taggu	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- R. Lidda	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- B. Bulu	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
					-			-	
	DESA WANOKAZA :				-			-	
					-			-	
	- M. M. Nono	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- D. Rene	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Piet Bora Bani	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Ande Bili	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Ande R. Bani	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA WEE PATOLA :				-			-	
					-			-	
	- Yohanes Lende	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Yoh. N. Bulu	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- A. Nono Daku	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Y. Umbu Dassa	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Duka Bulu	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA BERADOLU :				-			-	
					-			-	
	- Taggu Lausa	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- R. K. Rouna	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- S. S. Mete	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Ruangu Galla	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Kaboka Jangi	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA DEDEKADU :				-			-	
					-			-	
	- Billi Malli	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Djewa Lango	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- L. Dj. Awang	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- B. N. Ng. Awang	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Soke Sairo	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DESA SOBARADE :				-			-	
	- R. Dangu Magi	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- K. Bili. A. Jala	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Imanuel N. Wedo	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Frans Woleka	990.000			990.000,00			990.000,00	
	- Bongo Mete	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Bili Piddu Wattu	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Pati Louru	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- R. Masang	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Rato Sabba	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Raga Woleka	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Nono Umar	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Rato Bongo	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Moto A. Pigge	885.000			885.000,00			885.000,00	
	- Lingu A. Wini	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Bora A. Piter	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Gopa A. Rina	950.000			950.000,00			950.000,00	
	- R. Dangu Lidda	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Seingu W. Magi	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- B. Ama Taggu	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- R. Ama Aris	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	DESA LAPALE :				-			-	
	- Manu Rara	900.000			900.000,00			900.000,00	
	- Paulus Pala Mesa	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Kadangi Touwa	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- N. Mete Rato	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Jodi Para	945.000			945.000,00			945.000,00	
					-			-	
	DESA UBU PEDE :				-			-	
	- Louru	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Bewa S. Soga	950.000			950.000,00			950.000,00	
	- Djowa B. A. Dega	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Soke Lali	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Bulu A. Nono	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Nono A. Soga	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Lede Ama Soli	900.000			900.000,00			900.000,00	
	- Seingu A. Lede	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Bulu A. Domi	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Toda A. Lede	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
					-			-	
	KEL. WEE KEROU :				-			-	
	- Tagu A. Galu	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Beni U. Raya	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Touwa A. Bela	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Bulu A. Lali	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- W. Ama Dada	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	KEL. SOBA WAWI :				-			-	
	- Lodja T. A. Rade	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- A. Nono L	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- A. Nono Bawo	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Jawu B. Endi	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Toda L. Ensi	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA TARA MANU :				-			-	
	- A. Muda	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Mawu I. Kering	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Heingu K. Gei	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Mont T. Pogo	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Christ K. Hida	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA WEE TANA :				-			-	
	- Ote Dario	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- H. W. Hoga	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- W. T. Roki	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Marga Bela	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Delo Kole Talo	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA HARONA KALLA :				-			-	
	- Yunus R. Nanga	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- B. B. Nanga	795.000			795.000,00			795.000,00	
	-- Jhon R. Galla	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- R. D. Tallo	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- S. B. Nduka	795.000			795.000,00			795.000,00	

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					-			-	
	DESA WATU KARERE :				-			-	
	- S. K. Lere	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- A. D. Mangoba	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Ng. P. A. Malo	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- T. T. Loda	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- K. Wawa Toro	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA MANU KUKU :				-			-	
	- Lani P. Ngongo	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Ch. C. Pandango	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Th. Ng. Lalu	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Daud M. Zogara	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- M. B. U. Pige	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA BONDO TERA :				-			-	
	- Daki Bere	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- C. B. Pati	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- A. T. A. Ngongo	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Y. L. Bani	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Samuel Buma	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA LAPALE :				-			-	
	- Kantor Desa	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Kantor Kop. Desa	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Pati W. Tagu	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Rowa D. Lali	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Mete N. Lali	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Leisu Dj. Dongu	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Togu Dangu	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- B. B. Yuli	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Yoh. B. Ngedo	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Yoh. B. Ngedo	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Routa Kariam	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Lede Bobo	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Ng. Tibi A. Emen	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Dona Bili	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dj. P. Leda	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Yunus . M. D	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- S. D. Lede	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Yudas M. Dimun	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Soke Sairo	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Dato Mesa	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
					-			-	
	DESA UBU PEDE :				-			-	
					-			-	
	- Bulu A. Loja	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Bora I. Louru	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Dj. Lidda	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Dato M. Beko	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Leisu Dj. Seingu	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Mete N. Lali	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Cor Amo	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Leko D. Bani	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- Raga Lali	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
	- B. A. Dangu	1.050.000			1.050.000,00			1.050.000,00	
					-			-	
	KEL. WEE KEROU :				-			-	
					-			-	
	- Lius Awang	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Magi I. Rimu	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Dani Gallu	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- R. Maru	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- R. A. Saba	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- R. A. Bate	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Joh. Riga	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Yanto Toda	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Herman Riga	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- M. Nono	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA TARA MANU :				-			-	
					-			-	
	- Kering Bende	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Ng. Dappa	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Y. A. Mida	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Y. M. Payonggang	795.000			795.000,00			795.000,00	

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- M. Pahalang	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- M. K. K. Bei	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Jawu Didu	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- St. Ng. Jowa	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Ekson Dappa	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- K. Hama	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA MAMODU :				-			-	
	- Hendrik H. Gara	825.000			825.000,00			825.000,00	
	- Markus D. Bera	825.000			825.000,00			825.000,00	
	- Jhon B. Pajaga	825.000			825.000,00			825.000,00	
	- Johanis Ng. Djowa	825.000			825.000,00			825.000,00	
	- Muana Wadda	825.000			825.000,00			825.000,00	
	- Kering Budi	825.000			825.000,00			825.000,00	
	- Buta Delo	825.000			825.000,00			825.000,00	
	- Jhon Dj. Loru	825.000			825.000,00			825.000,00	
	- Ngongo Bongo	825.000			825.000,00			825.000,00	
	- Goling Laka	825.000			825.000,00			825.000,00	
					-			-	
	DESA GAURA :				-			-	
	- Niko Laya	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Mati Egerara	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Teda Y. Toro	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Daniel K. Togu	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Jh. H. Joro	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Karinus Anta	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Laka Nija	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Okta Jarang R	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Wuraka L. Bora	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- P. Pati Kaba	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- M. Napang	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Silvester R	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- M. Dedo	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- L. W. Taba	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- D. K. Talo	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Ole D. P	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- T. Y. Doki	795.000			795.000,00			795.000,00	

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- C. M. Lobu	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- B. B. Nunu	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- GKS. Pst	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
	DESA WEE PATOLA :				-			-	
	- B. B. Delo	675.000			675.000,00			675.000,00	
	- Soleman Bulu	675.000			675.000,00			675.000,00	
	- Matius B. Dede	675.000			675.000,00			675.000,00	
	- Yulius Pala	675.000			675.000,00			675.000,00	
	- Yoh. Ng. Lala	675.000			675.000,00			675.000,00	
	- Dowa Dappa	675.000			675.000,00			675.000,00	
	- A. Seingu	675.000			675.000,00			675.000,00	
	- A. T. A. Bora	675.000			675.000,00			675.000,00	
	- Pede Sada	675.000			675.000,00			675.000,00	
	- Dowa Ngailu	675.000			675.000,00			675.000,00	
					-			-	
	DESA ZALA KADU :				-			-	
	- Markus L. Dj	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Agus Nanga	660.000			660.000,00			660.000,00	
	- Tamo A. Bili	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Bili Deke	690.000			690.000,00			690.000,00	
	- D. Dj. Ngailu	645.000			645.000,00			645.000,00	
					-			-	
	DESA BONDO TERA :				-			-	
	- S. L. Lado	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Y. Ng. Lalu	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Marten S. Bani	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Dona Ng. B	795.000			795.000,00			795.000,00	
	- Yoh. Suma	795.000			795.000,00			795.000,00	
					-			-	
2	Pembayaran Biaya Uang Muka 30% Atas Pekerjaan Pembangunan Layanan Air Minum SPAM Manukuku	86.365.156,23			86.365.156,23			86.365.156,23	
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	119.820.000,00			119.820.000,00			119.820.000,00	
		69.820.000,00	-	-	69.820.000,00	-	-	69.820.000,00	
	KPJM Mitra Karya Abadi	64.820.000,00	-	-	64.820.000,00	-	-	64.820.000,00	

NO	JENIS PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	MUTASI		TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KPJM Luna Lele	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	
		50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	
	LUEP Sartika Jaya (Dominggus Dinga Leba)	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	
	LUEP Dwi Tunggal (Yohana L.Gaga)	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	
	SATUAN POL PP	13.532.000,00	-	-	13.532.000,00	-	-	13.532.000,00	
	CV ROSE								
	Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tahun 2012	13.532.000,00	-	-	13.532.000,00	-	-	13.532.000,00	
	JUMLAH TOTAL	421.782.156,23	-	-	421.782.156,23	-	-	421.782.156,23	



PENYISIHAN PIUTANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PAJAK	SALDO AWAL	KOREKSI		MUTASI BEBAN PENYISIHAN		TOTAL PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
1	PAJAK DAERAH	2.137.044.814,56			26.033.199,15	-	2.163.078.013,71	
	Badan Pendapatan Daerah	2.137.044.814,56			26.033.199,15	-	2.163.078.013,71	
2	RETRIBUSI DAERAH	4.755.524.656,00		-	468.784.920,00	10.669.586,00	5.213.639.990,00	
	Badan Pendapatan Daerah	140.287.870,00			15.433.120,00	-	155.720.990,00	
	Dinas Kesehatan	10.669.586,00		-	-	10.669.586,00	-	-
	Dinas Perhubungan	3.892.560.000,00			409.680.000,00		4.302.240.000,00	-
	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	-				-	-	-
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	302.890.000,00		-	-		302.890.000,00	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.000.000,00		-			8.000.000,00	
	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	401.117.200,00			43.455.800,00	-	444.573.000,00	
	Dinas Peternakan	-			216.000,00		216.000,00	
3	LAIN-LAIN PAD	64.058.104,00			1.297,56	-	64.059.401,56	
	Badan Pendapatan Daerah	64.058.104,00				-	64.058.104,00	
	BKAD				1.297,56		1.297,56	
4	PIUTANG LAINNYA	335.417.000,00			-	-	335.417.000,00	
	Satuan Pol PP	13.532.000,00					13.532.000,00	
	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan	119.820.000,00		-	-	-	119.820.000,00	
	Dinas PU dan Penataan Ruang	202.065.000,00				-	202.065.000,00	
5	PIUTANG BAGI HASIL PROVINSI	33.188.195,39		-	-	33.188.195,39	-	
	Badan Pendapatan Daerah	33.188.195,39				33.188.195,39	-	
	JUMLAH TOTAL	7.325.232.769,95		-	494.819.416,71	43.857.781,39	7.776.194.405,27	



DAFTAR PERSEDIAAN

No	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI		MUTASI		MUTASI ANTAR PD		JUMLAH
			TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	
	DINAS - DINAS								
1	Dinas Pendidikan	792.042.658,00			6.369.392.935,00	7.161.385.593,00			50.000,00
2	Dinas Kesehatan	8.471.404.502,66			9.654.762.726,42	10.033.551.439,22			8.092.615.789,86
	Puskesmas Puuweri	-							-
	Puskesmas Malata	-							-
	Puskesmas Karekanduku	-							-
	Puskesmas Lahihuruk	-							-
	Puskesmas Gaura	-							-
	Puskesmas Kabukarudi	-							-
	Puskesmas Padediwatu	-							-
	Puskesmas Tanarara	-							-
	Puskesmas Weekarou	-							-
	Puskesmas Lolowano	-							-
3	Dinas PU dan Penataan Ruang	2.685.379.195,00			6.645.907.400,00	8.568.597.400,00			762.689.195,00
4	Dinas Perhubungan	40.057.780,00			868.213.400,00	794.609.500,00			113.661.680,00
5	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	242.000,00			134.783.250,00	134.659.750,00			365.500,00
6	Dinas Kependudukan dan Capil	96.756.500,00			275.538.335,00	286.222.435,00			86.072.400,00
7	Dinas Sosial	209.715.000,00			703.814.482,00	626.955.982,00			286.573.500,00
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	32.990.200,00			7.036.081.246,20	502.575.555,20			6.566.495.891,00
9	Dinas Peternakan	401.050.937,00			1.053.907.956,25	409.943.055,86			1.045.015.837,39
10	Dinas Perikanan	48.860.985,00			1.497.939.305,00	689.892.418,50			856.907.871,50
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.234.500,00			897.301.500,00	896.567.800,00			1.968.200,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	375.211.600,00			108.652.000,00	408.021.200,00			75.842.400,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	851.500,00			127.276.200,00	127.829.400,00			298.300,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	693.500,00			96.678.500,00	97.372.000,00			-
15	Dinas Lingkungan Hidup	29.580.100,00			489.728.599,58	519.308.699,58			-
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200.329.453,00			2.293.361.813,00	2.016.689.718,00			477.001.548,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	447.600,00			274.519.400,00	108.380.700,00			166.586.300,00
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.089.000,00			131.001.800,00	130.422.800,00			1.668.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-			169.574.200,07	169.574.200,07			-

No	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI		MUTASI		MUTASI ANTAR PD		JUMLAH
			TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	
20	RSUD	1.686.429.554,79			9.854.990.777,41	9.274.871.894,19			2.266.548.438,01
21	RS Pratama Hobakalla	421.647.017,00			909.821.826,58	698.911.632,96			632.557.210,62
22	Inspektorat	3.974.300,00			165.380.600,00	167.718.700,00			1.636.200,00
23	Sekretariat DPRD	926.100,00			91.887.000,00	90.044.200,00			2.768.900,00
	BADAN/KANTOR	-							-
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	228.000,00			119.210.400,00	119.219.100,00			219.300,00
25	Badan Kesbangpol	1.319.900,00			29.563.300,00	29.214.800,00			1.668.400
26	Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia	-			149.599.500,00	149.599.500,00			-
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	310.564.445,00			185.374.600,00	386.722.065,00			109.216.980,00
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	242.180.590,00			634.496.525,00	635.443.025,00			241.234.090,00
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	-							-
30	Badan Pendapatan Daerah	1.094.400,00			236.984.000,00	187.362.200,00			50.716.200,00
31	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	315.800,00			23.442.700,00	23.014.000,00			744.500,00
32	SEKRETARIAT DAERAH	23.026.000,00			1.774.950.716,30	1.778.726.716,30			19.250.000,00
	Bagian Umum	-							-
	Bagian Humas dan Protokol	-							-
	Bagian Kesra	-							-
	Bagian Hukum	-							-
	Bagian Administrasi Pembangunan	-							-
	Bagian Tata Pemerintahan	-							-
	Bagian Ekonomi	-							-
	Bagian Organisasi	-							-
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-							-
	Bagian Pelaporan dan Keuangan	-							-
	KECAMATAN	-							-
33	Kecamatan Tanarighu	293.500,00			157.593.800,00	157.887.300,00			-
34	Kecamatan Loli	940.300,00			340.095.500,00	339.809.400,00			1.226.400,00
	Kelurahan Weekarou	-							-
	Kelurahan Sobawawi	-							-
	Kelurahan Weedabo	-							-
	Kelurahan Lodapare	-							-
	Kelurahan Diratana	-							-
35	Kecamatan Kota Waikabubak	484.000,00			80.157.900,00	80.056.700,00			585.200,00
	Kelurahan Komerda	-							-
	Kelurahan Wailiang	-							-
	Kelurahan Maliti	-							-
	Kelurahan Kampung Sawah	-							-
	Kelurahan Kampung Baru	-							-
	Kelurahan Padaeweta	-							-
36	Kecamatan Wanukaka	-			80.170.370,00	80.170.370,00			-
37	Kecamatan Lamboya	-			163.707.700,00	163.707.700,00			-
38	Kecamatan Lamboya Barat	-			24.026.300,00	24.026.300,00			-

No	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI		MUTASI		MUTASI ANTAR PD		JUMLAH
			TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	
		-							-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	16.081.360.917,45	-	-	53.849.888.563,81	48.069.065.249,88	-	-	21.862.184.231,38

No	URAIAN	ATK	ADMINISTRASI TENDER	ALAT LISTRIK	BBM	MATERAI	BAHAN PEMBERSIH	ALKES PAKAI HABIS	BARANG CETAKAN	JUMLAH
23	Sekretariat DPRD	2.768.900,00								2.768.900,00
	BADAN/KANTOR									
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	219.300,00								219.300,00
25	Badan Kesbangpol	1.668.400,00								1.668.400,00
26	Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia									-
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									-
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.283.900,00						223.950.190,00		241.234.090,00
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah									
30	Badan Pendapatan Daerah	4.172.300,00					100.300,00	46.443.600,00		50.716.200,00
31	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	744.500,00								744.500,00
32	SEKRETARIAT DAERAH									
	Bagian Umum									
	Bagian Humas dan Protokol									
	Bagian Kesra									
	Bagian Hukum									
	Bagian Administrasi Pembangunan									
	Bagian Tata Pemerintahan									
	Bagian Ekonomi									
	Bagian Organisasi									
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa									
	Bagian Pelaporan dan Keuangan									
	KECAMATAN									
33	Kecamatan Tanarighu									-
34	Kecamatan Loli	1.126.400,00				100.000,00				1.226.400,00
	Kelurahan Weekarou									
	Kelurahan Sobawawi									
	Kelurahan Weedabo									
	Kelurahan Lodapare									
	Kelurahan Diratana									
35	Kecamatan Kota Waikabubak	585.200,00								585.200,00
	Kelurahan Komerda									
	Kelurahan Wailiang									
	Kelurahan Maliti									
	Kelurahan Kampung Sawah									
	Kelurahan Kampung Baru									
	Kelurahan Padaeweta									
36	Kecamatan Wanukaka									-
37	Kecamatan Lamboya									-
38	Kecamatan Lamboya Barat									-
		100.948.800,00	-	-	-	150.000,00	123.140.580,00	929.610.770,14	584.831.920,00	1.738.682.070,14

No	URAIAN	OBAT DAN BMHP KESEHATAN	BIBIT TANAMAN	BIBIT TERNAK	OBAT-OBATAN	BAHAN PROMOSI	PERALATAN OLAHRAGA	MAKANAN TERNAK	BAHAN MAKANAN PASIEN	PERALATAN RUMAH TANGGA	BARANG LAINNYA	SUKU CADANG	BARANG YANG DISERAHKAN PADA MASYARAKAT / BANSOS	JUMLAH
	Bagian Ekonomi													-
	Bagian Organisasi													-
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa													-
	Bagian Pelaporan dan Keuangan													-
	KECAMATAN													-
33	Kecamatan Tanarighu													-
34	Kecamatan Loli													-
	Kelurahan Weekarou													-
	Kelurahan Sobawawi													-
	Kelurahan Weedabo													-
	Kelurahan Lodapare													-
	Kelurahan Diratana													-
35	Kecamatan Kota Waikabubak													-
	Kelurahan Komerda													-
	Kelurahan Wailiang													-
	Kelurahan Malli													-
	Kelurahan Kampung Sawah													-
	Kelurahan Kampung Baru													-
	Kelurahan Padaeweta													-
36	Kecamatan Wanukaka													-
37	Kecamatan Lamboya													-
38	Kecamatan Lamboya Barat													-
		8.092.615,789,86	1.434.472.060,00	46.504.000,00	2.660.059.947,38	-	-	194.158.894,00	11.316.375,00	-	19.250.000,00	-	7.665.125.095,00	20.123.502.161,24

21.862.184.231,38



DAFTAR ASET TETAP TANAH

NO	SKPD	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		REALISASI BELANJA MODAL	REALISASI BELANJA BARANG JASA	REKLAS ANTAR AKUN	HIBAH	HASIL INVENTARISASI		REKLAS KE ASET LAIN-LAIN	ASET LAINNYA KEMITRAAN	JUMLAH
			TAMBAH	KURANG					TAMBAH	KURANG			
	DINAS - DINAS												
1	Dinas Pendidikan	11.674.499.258,00											11.674.499.258,00
2	Dinas Kesehatan	2.343.743.329,00											2.343.743.329,00
	Puskesmas Puuweri	-											-
	Puskesmas Malata	-											-
	Puskesmas Karekanduku	-											-
	Puskesmas Lahihuruk	-											-
	Puskesmas Gaura	-											-
	Puskesmas Kabukarudi	-											-
	Puskesmas Padediwatu	-											-
	Puskesmas Tanarara	-											-
	Puskesmas Weekarou	-											-
	Puskesmas Lolowano	-											-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.830.506.436,00									157.897.800,00		37.672.608.636,00
4	Dinas Perhubungan	2.912.708.785,00											2.912.708.785,00
5	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	2.502.146.800,00											2.502.146.800,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-											-
7	Dinas Sosial	303.150.000,00									242.050.000,00		61.100.000,00
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.228.987.460,00											3.228.987.460,00
9	Dinas Peternakan	494.357.000,00											494.357.000,00
10	Dinas Perikanan	371.987.000,00											371.987.000,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	945.000.000,00											945.000.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-											-
13	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	97.160.000,00											97.160.000,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-											-
15	Dinas Lingkungan Hidup	1.261.425.000,00											1.261.425.000,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.524.000,00											16.524.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	76.426.000,00											76.426.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32.960.000,00											32.960.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.167.520,00											13.167.520,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah	1.032.896.200,00											1.032.896.200,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		REALISASI BELANJA MODAL	REALISASI BELANJA BARANG JASA	REKLAS ANTAR AKUN	HIBAH	HASIL INVENTARISASI		REKLAS KE	ASET LAINNYA		JUMLAH
			TAMBAH	KURANG					TAMBAH	KURANG		ASET LAIN-LAIN	KEMITRAAN	
36	Kecamatan Wanukaka	305.815.740,00												305.815.740,00
37	Kecamatan Lamboya	621.277.160,00												621.277.160,00
38	Kecamatan Lamboya Barat	416.769.300,00												416.769.300,00
	Jumlah	87.614.078.838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	399.947.800,00	-	-	87.214.131.038,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA	REKLAS DARI ATL	REKLAS DARI PERSEDIAAN	REKLAS DARI GEDUNG DAN BANGUNAN	REKLAS DARI ASET LAIN-LAIN	HIBAH DAN BTT	REKLAS DARI ASET JU	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE ASET LAIN-LAIN	BELANJA MODAL DIBAWAH 1 JUTA	PERSEDIAAN	DIBAWAH KAPITALISASI	DISERANKAN KEPADA MASYARAKAT	HIBAH	SALDO AKHIR
											GEDUNG DAN BANGUNAN	ATL							
	Kelurahan Diratana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Kota Waikabubak	1.257.737.785,60	88.277.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.814.000,00	-	-	-	-	1.333.201.585,60
	Kelurahan Komerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kelurahan Wailang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kelurahan Masi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kelurahan Kampung Sawah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kelurahan Kamoun Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kelurahan Padaweta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Wanukaka	660.075.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.075.089,00
37	Kecamatan Lambaya	617.538.454,00	29.203.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646.761.954,00
38	Kecamatan Lambaya Barat	577.073.463,00	18.316.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595.389.963,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		448.889.061.558,90	26.628.288.453,00	1.865.786.730,00	38.484.713,00	4.173.000,00	681.808.599,55	146.200.000,00	18.923.597.000,00	18.163.525,00	20.000.000,00	89.893.600,00	3.740.388.275,00	1.396.150.148,55	37.794.500,00	105.306.100,00	400.000.000,00	468.861.925,00	490.937.169.030,90

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI ANTAR PD		MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG					KURANG VOLUME PEKERJAAN KELEBIHAN PEKERJAAN	SALDO AKHIR	
			TAMBAH	KURANG	REALISASI BELANJA MODAL	REALISASI BARANG JASA	HIBAH	REKLAS DARI AKUN LAIN	HIBAH/PEMBONGKARAN	REKLAS KE AKUN LAIN	REKLAS KE PERSEDIAAN	GEDUNG DAN BANGUNAN DIBAWAH KAPITALISASI			REKLAS KE ASET LAIN-LAIN
26	Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia	5.639.146.000,00													5.639.146.000,00
27	BPPD	3.135.150.000,00													3.135.150.000,00
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.996.276.206,00	99.195.000,00		35.000.000,00	272.262.600,00			74.600.000,00						17.477.333.806,00
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	7.943.531.700,00													7.943.531.700,00
30	Badan Pendapatan Daerah	-													-
31	Satuan PP dan Pemadam Kebakaran	1.051.623.675,00	141.142.500,00		-										1.192.766.175,00
32	SEKRETARIAT DAERAH	61.877.765.767,13	2.647.105.500,00		722.548.000,00					99.972.000,00				2.496.000,00	59.850.740.267,13
	Bagian Umum														-
	Bagian Humas dan Protokol	-													-
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-													-
	Bagian Hukum	-													-
	Bagian Pembangunan	-													-
	Bagian Tata Pemerintahan	-													-
	Bagian Ekonomi	-													-
	Bagian Organisasi	-													-
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-													-
	Bagian Pelaporan dan Keuangan	-													-
	KECAMATAN	-													-
33	Kecamatan Tanarighu	2.306.507.100,00													2.306.507.100,00
34	Kecamatan Loli	5.126.968.000,00													5.126.968.000,00
	Kelurahan Weekarou	-													-
	Kelurahan Sobawawi	-													-
	Kelurahan Weedabo	-													-
	Kelurahan Lodapare	-													-
	Kelurahan Diratana	-													-
35	Kecamatan Kota Waikabubak	2.728.014.750,00													2.728.014.750,00
	Kelurahan Komerda	-													-
	Kelurahan Wailiang	-													-
	Kelurahan Mailiti	-													-
	Kelurahan Kampung Sawah	-													-
	Kelurahan Kampung Baru	-													-
	Kelurahan Padaeweta	-													-
36	Kecamatan Wanukaka	2.253.397.000,00													2.253.397.000,00
37	Kecamatan Lamboya	2.561.009.560,00			768.114.000,00				125.842.000,00						3.454.965.560,00
38	Kecamatan Lamboya Barat	2.226.819.000,00													2.226.819.000,00
		728.727.994.817,79	2.647.105.500,00	2.647.105.500,00	47.685.204.516,00	622.527.124,00	654.500.000,00	460.921.372,00	1.084.220.500,00	1.431.914.653,55	191.845.066,00	20.000.000,00	56.000.000,00	87.747.170,83	775.279.420.439,41

NO	SKPD	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG			KURANG VOLUME PEKERJAAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
				REALISASI BARANG DAN JASA	REKLAS DARI AKUN LAIN	REKLAS KE AKUN LAIN / PM	REKLAS KE AKUN LAIN / ATL	REKLAS KE AKUN LAIN / KDP		
33	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	-								-
34	SEKRETARIAT DAERAH	1.416.265.625,50								1.416.265.625,50
	Bagian Umum									
	Bagian Humas dan Protokol	-								-
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-								-
	Bagian Hukum	-								-
	Bagian Pembangunan	-								-
	Bagian Tata Pemerintahan	-								-
	Bagian Ekonomi	-								-
	Bagian Organisasi	-								-
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-								-
	Bagian Pelaporan dan Keuangan	-								-
	KECAMATAN	-								-
35	Kecamatan Tanarighu	-								-
36	Kecamatan Loli	32.300.000,00								32.300.000,00
	Kelurahan Weekarou	-								-
	Kelurahan Sobawawi	-								-
	Kelurahan Weedabo	-								-
	Kelurahan Lodapare	-								-
	Kelurahan Diratana	-								-
	Kecamatan Kota Waikabubak	10.370.000,00								10.370.000,00
	Kelurahan Komerda	-								-
	Kelurahan Wailiang	-								-
	Kelurahan Maliti	-								-
	Kelurahan Kampung Sawah	-								-
	Kelurahan Kampung Baru	-								-
	Kelurahan Padaeweta	-								-
37	Kecamatan Wanukaka	-								-
38	Kecamatan Lamboya	-								-
39	Kecamatan Lamboya Barat	34.700.000,00								34.700.000,00
		1.238.141.181.562,31	137.251.355.339,00	257.518.139,86	465.992.885,00	18.163.525,00	300.000.000,00	1.472.397.594,98	101.827.420,51	1.374.223.659.385,68



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Lampiran 17

DAFTAR ASET TETAP LAINNYA

NO	SKPD	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		SALDO AKHIR
					REKLAS DARI AKUN LAIN	HIBAH	REKLAS KE AKUN LAIN	REKLAS KE ALL	
	DINAS - DINAS								
1	Dinas Pendidikan	42.728.611.384,09	820.380.333,00		89.893.600,00		38.484.713,00		43.600.400.604,09
2	Dinas Kesehatan	745.773.000,00							745.773.000,00
	Puskesmas Puuweri	-							-
	Puskesmas Malata	-							-
	Puskesmas Karekanduku	-							-
	Puskesmas Lahihuruk	-							-
	Puskesmas Gaura	-							-
	Puskesmas Kabukarudi	-							-
	Puskesmas Padediwatu	-							-
	Puskesmas Tanarara	-							-
	Puskesmas Weekarou	-							-
	Puskesmas Lolowano	-							-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.039.295.700,00			599.111.700,00				1.638.407.400,00
4	Dinas Perhubungan	31.880.000,00							31.880.000,00
5	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	23.385.000,00							23.385.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	633.853.000,00							633.853.000,00
7	Dinas Sosial	1.060.000,00							1.060.000,00
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.455.420,00							20.455.420,00
9	Dinas Peternakan	416.159.490,00	134.998.020,00						551.157.510,00
10	Dinas Perikanan	-		44.955.000,00					44.955.000,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	317.850.000,00							317.850.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-							-
13	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-							-
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-							-
15	Dinas Lingkungan Hidup	-							-

NO	SKPD	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		SALDO AKHIR
					REKLAS DARI AKUN LAIN	HIBAH	REKLAS KE AKUN LAIN	REKLAS KE ALL	
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87.000.000,00							87.000.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.140.000,00							20.140.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.807.900,00							2.807.900,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.040.937.738,00	214.025.000,00						1.254.962.738,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah	6.240.000,00							6.240.000,00
21	Rs Pratama Hobakalla				185.000.000,00				185.000.000,00
22	Inspektorat	25.418.020,00							25.418.020,00
23	Sekretariat DPRD	30.000.000,00							30.000.000,00
	BADAN/KANTOR	-							-
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	2.456.798.000,00							2.456.798.000,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-							-
26	Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia	-							-
27	BPBD	3.020.000,00							3.020.000,00
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.150.000,00							3.150.000,00
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	-							-
30	Badan Pendapatan Daerah	-							-
31	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	-							-
32	SEKRETARIAT DAERAH	82.981.100,00							82.981.100,00
	Bagian Umum	-							-
	Bagian Humas dan Protokol	-							-
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-							-
	Bagian Hukum	-							-
	Bagian Pembangunan	-							-
	Bagian Tata Pemerintahan	-							-
	Bagian Ekonomi	-							-
	Bagian Organisasi	-							-
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-							-
	Bagian Pelaporan dan Keuangan	-							-
	KECAMATAN	-							-
33	Kecamatan Tanarighu	-							-
34	Kecamatan Loli	1.080.000,00							1.080.000,00
	Kelurahan Weekarou	-							-

NO	SKPD	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG		SALDO AKHIR
					REKLAS DARI AKUN LAIN	HIBAH	REKLAS KE AKUN LAIN	REKLAS KE ALL	
	Kelurahan Sobawawi	-							-
	Kelurahan Weedabo	-							-
	Kelurahan Lodapare	-							-
	Kelurahan Diratana	-							-
35	Kecamatan Kota Waikabubak	480.000,00							480.000,00
	Kelurahan Komerda	-							-
	Kelurahan Wailiang	-							-
	Kelurahan Maliti	-							-
	Kelurahan Kampung Sawah	-							-
	Kelurahan Kampung Baru	-							-
	Kelurahan Padaeweta	-							-
36	Kecamatan Wanukaka	-							-
37	Kecamatan Lamboya	137.885.000,00							137.885.000,00
38	Kecamatan Lamboya Barat	-							-
									-
									-
		49.856.260.752,09	1.169.403.353,00	44.955.000,00	874.005.300,00	-	38.484.713,00	-	51.906.139.692,09

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH					MUTASI KURANG				SALDO AKHIR
			Belanja JII	Bel Modal Gedung Bangunan	Belanja Barang Jasa	ATL	KEWAJIBAN	ATL	GB	JII	KURANG VOLUME PEKERJAAN/ KELEBIHAN PEKERJAAN	
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	-										-
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-										-
26	Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia	-										-
27	BPBD	19.900.000,00										19.900.000,00
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	74.600.000,00							74.600.000,00			-
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	-										-
30	Badan Pendapatan Daerah	-										-
31	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	-										-
32	SEKRETARIAT DAERAH	2.519.668.782,58		99.972.000,00							2.850.000,00	2.616.790.782,58
	KECAMATAN	-										-
33	Kecamatan Tanarighu	34.900.000,00										34.900.000,00
34	Kecamatan Loli	-										-
35	Kecamatan Kota Waikabubak	-										-
36	Kecamatan Wanukaka	-										-
37	Kecamatan Lamboya	-										-
38	Kecamatan Lamboya Barat	134.587.591,92										134.587.591,92
		17.891.442.227,73	1.472.397.594,98	565.106.054,00	395.998.150,00	-	799.501.849,00	299.111.700,00	315.079.372,00	465.992.885,00	43.605.750,80	20.000.656.167,91



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Lampiran 19

RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN 2023

NO	SKPD	SALDO 31 DESEMBER 2022	KOREKSI SALDO AWAL				REKLAS ANTAR PD	SALDO 01 JAN 2023
			TAMBAH					
			PERALATAN DAN MESIN PENAMBAHAN NILAI	GEDUNG DAN BANGUNAN ANTAR AKUN/KAPITALISASI/P ENAMBAHAN NILAI	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN ANTAR AKUN/KAPITALISASI	ASET TETAP LAINNYA		
	DINAS - DINAS							
1	Dinas Pendidikan	91.518.096.843,7000		916.722.253,10				92.434.819.096,800
2	Dinas Kesehatan	112.100.102.276,3200						112.100.102.276,320
3	Dinas PU dan Penataan Ruang	956.811.763.664,8400			15.649.027.235,47			972.460.790.900,310
4	Dinas Perhubungan	11.716.408.795,6600						11.716.408.795,660
5	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	8.092.453.685,2240						8.092.453.685,224
6	Dinas Kependudukan dan Capil	2.034.402.327,5000						2.034.402.327,500
7	Dinas Sosial	1.716.106.545,6500						1.716.106.545,650
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.212.296.214,0500		53.534.775,51				26.265.830.989,560
9	Dinas Peternakan	6.262.419.323,7600						6.262.419.323,760
10	Dinas Perikanan	3.831.531.449,9235		20.784.620,00				3.852.316.069,924
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.560.182.180,3600						1.560.182.180,360
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.233.386.828,4994						4.233.386.828,499
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.061.757.089,7400						1.061.757.089,740
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	902.781.850,0000						902.781.850,000
15	Dinas Lingkungan Hidup	7.559.831.262,7500						7.559.831.262,750
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlind. Anak	3.095.649.241,5700						3.095.649.241,570
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.541.943.800,0000		2.258.450,00				1.544.202.250,000
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.088.552.979,4600						1.088.552.979,460
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.499.940.927,5767						1.499.940.927,577
20	RSUD	124.060.406.232,5900	7.779.308.566,67	34.305.920,73				131.874.020.719,990
21	RS PRATAMA HOBAKALA	13.396.500,0000						13.396.500,000
22	Inspektorat	1.775.973.965,0000						1.775.973.965,000
23	Sekretariat DPRD	8.731.669.893,8800		58.227.428,58				8.789.897.322,460
	BADAN/KANTOR	-						-
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	2.551.355.103,7000						2.551.355.103,700
25	Badan Kesbangpol	755.562.900,7000						755.562.900,700
26	Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia	3.245.830.264,0000						3.245.830.264,000
27	BPBD	4.363.131.599,0000						4.363.131.599,000
28	Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	8.959.055.686,5800						8.959.055.686,580
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	5.001.057.780,0000						5.001.057.780,000
30	Badan Pendapatan Daerah	578.526.300,4200						578.526.300,420
31	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	1.662.777.707,9200						1.662.777.707,920

NO	SKPD	SALDO 31 DESEMBER 2022	KOREKSI SALDO AWAL				REKLAS ANTAR PD	SALDO 01 JAN 2023
			TAMBAH					
			PERALATAN DAN MESIN PENAMBAHAN NILAI	GEDUNG DAN BANGUNAN ANTAR AKUN/KAPITALISASI/P ENAMBAHAN NILAI	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN ANTAR AKUN/KAPITALISASI	ASET TETAP LAINNYA		
32	SEKRETARIAT DAERAH	40.672.798.435,8500		10.215.491,33				40.683.013.927,180
	KECAMATAN	-						-
33	Kecamatan Tanarighu	768.411.217,7000						768.411.217,700
34	Kecamatan Loli	2.293.565.988,5010						2.293.565.988,501
35	Kecamatan Kota	1.866.732.990,9499						1.866.732.990,950
36	Kecamatan Wanukaka	1.152.626.978,2600						1.152.626.978,260
37	Kecamatan Lamboya	1.229.748.214,8000		71.128.086,96				1.300.876.301,760
38	Kecamatan Lamboya Barat	994.239.116,4000						994.239.116,400
		-						-
	TOTAL	1.453.516.474.162,8400	7.779.308.566,67	1.167.177.026,21	15.649.027.235,47	-	-	1.478.111.986.991,190



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Lampiran 20

DAFTAR PROPERTI INVESTASI

NO	PERANGKAT DAERAH	TANAH	PERALATAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
1	DINAS PERHUBUNGAN		7.952.247.175,00		
2	DINAS PERIKANAN	20.181.000,00		1.799.680.156,56	246.229.062,97
3	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			776.487.676,95	
	TOTAL	20.181.000,00	7.952.247.175,00	2.576.167.833,51	246.229.062,97



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

lampiran 20

DAFTAR AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

NO	URAIAN	NILAI	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	TANAH	20.181.000,00			20.181.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	7.952.247.175,00	618.163.217,50	6.446.195.160,00	887.888.797,50
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.576.167.833,51	51.423.240,03	553.175.284,48	1.971.569.309,00
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	246.229.062,97	12.311.453,15	158.631.579,28	75.286.030,54
	TOTAL	10.794.825.071,48	681.897.910,68	7.158.002.023,76	2.954.925.137,04



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	Badan Keuangan,Aset dan Pendapatan D	-	-	-	-
2	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	389.000.000,00	131.250.000,00	-	520.250.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.560.000	-	-	43.560.000,00
4	BKPP	654.820.000	-	-	654.820.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Capil	131.030.000	-	-	131.030.000,00
6	Dinas Sosial	10.000.000	-	-	10.000.000,00
7	Bappeda	244.505.000	-	-	244.505.000,00
8	Dinas Pendidikan	1.785.315.990	-	-	1.785.315.990,00
9	Dinas Perhubungan	90.750.000	-	-	90.750.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika,Persandi	13.300.000	-	-	13.300.000,00
11	Badan Pendapatan Daerah	1.030.860.645	-	-	1.030.860.645,00
		4.393.141.635,00	131.250.000,00	-	4.524.391.635,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	KOREKSI KURANG	MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG		REKLAS DARI	REKLAS DARI	SALDO AKHIR
				TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pencatatan Pendapatan Transfer DBH Non Tunai melalui TDF Tahun 2023	REKLAS KE AKUN LAIN	Pencatatan Pendapatan Transfer DBH Non Tunai melalui TDF Tahun 2022	ASET LAIN-LAIN LAINNYA	AKUMULASI PENYUSUTAN DARI KIB	
26	Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia	17.738.941,00			184.400.000,00						184.400.000,00	17.738.941,00
27	BPBD	212.953.120,00										212.953.120,00
28	Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	1.219.053.199,61			222.518.600,00		478.626.000,00				199.438.900,00	1.242.132.899,61
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah											
30	Badan Pendapatan Daerah	1.107.116.478,00							1.070.018.977,00			37.097.501,00
31	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	2.000.000,00										2.000.000,00
32	SEKRETARIAT DAERAH	3.259.357.747,51			3.179.607.750,00			-		5.346.000,00	2.860.832.650,00	3.583.478.847,51
	Bagian Umum	-										-
	Bagian Humas dan Protokol	-										-
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-										-
	Bagian Hukum	-										-
	Bagian Pembangunan	-										-
	Bagian Tata Pemerintahan	-										-
	Bagian Ekonomi	-										-
	Bagian Organisasi	-										-
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-										-
	Bagian Pelaporan dan Keuangan	-										-
	KECAMATAN	-										-
33	Kecamatan Tanarighu	159.408.059,66										159.408.059,66
34	Kecamatan Loli	575.210.650,61										575.210.650,61
	Kelurahan Weekarou	-										-
	Kelurahan Sobawawi	-										-
	Kelurahan Weedabo	-										-
	Kelurahan Lodapare	-										-
	Kelurahan Diratana	-										-
35	Kecamatan Kota Waikabubak	980.551.350,27										980.551.350,27
	Kelurahan Komerda	-										-
	Kelurahan Wailiang	-										-
	Kelurahan Maliti	-										-
	Kelurahan Kampung Sawah	-										-
	Kelurahan Kampung Baru	-										-
	Kelurahan Padaeweta	-										-
36	Kecamatan Wanukaka	105.252.146,79										105.252.146,79
37	Kecamatan Lamboya	305.924.640,99						84.884.130,43				221.040.510,56
38	Kecamatan Lamboya Barat	126.017.228,00										126.017.228,00
		-										-
		74.065.869.441,22	55.000.000,00	399.947.800,00	3.740.388.275,00	56.000.000,00	478.626.000,00	84.884.130,43	1.070.018.977,00	233.180.342,14	3.424.293.475,00	74.339.815.275,93



RINCIAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
KABUPATEN SUMBA BARAT
Tahun Anggaran : 2023

Lampiran 23

No	OPD	Nama Barang	Klasifikasi ATB	Jumlah	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Umur Barang	Nilai Perolehan (NERACA)	Akumulasi Amortisasi 2022	Nilai Buku 2022	Beban Amortisasi 2023	Akumulasi Amortisasi 2023	Nilai Buku 2023	Keterangan	
1	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Website DINAS PENDIDIKAN	software	1	2019	4	5	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 15.000.000,00	Rp -	Masih Terpakai	
372	Bapenda	Aplikasi SIM PBB P2 terdiri dari : 1. Operating System (OS) 2. Oracle 11g License 25 client 3. Windows server 2008 25 C1 4. Map Info V.12 5. Antivirus	software	1	2013	5	10	Rp 387.150.645,00	Rp 387.150.645,00	Rp -	Rp -	Rp 387.150.645,00	Rp -	Tidak terpakai	
373	Bapenda	Pengembangan Aplikasi SIM PBB-P2	software	1	2019	4	5	Rp 643.710.000,00	Rp 643.710.000,00	Rp -	Rp -	Rp 643.710.000,00	Rp -	Masih Terpakai (ASET KAPITALISASI)	
								Total	Rp 4.524.391.635,00	Rp 4.249.170.385,00	Rp 137.321.250,00	Rp 173.458.750,00	Rp 4.422.629.135,00	Rp 101.762.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Lampiran 24

RINCIAN UTANG BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	SUB KEGIATAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KOREKSI		JUMLAH SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	PELUNASAN KEWAJIBAN	TOTAL UTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2023
				TAMBAH	KURANG				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA PEGAWAI		2.453.503.133,00	-	-	2.453.503.133,00	1.917.536.011,00	1.552.000.000,00	2.819.039.144,00
	RSUD	Honorarium jasa pelayan	2.383.500.000,00			2.383.500.000,00	1.917.000.000,00	1.552.000.000,00	2.748.500.000,00
	Dinas Pendidikan (BOS)	Honor guru dan tenaga pendidik	67.959.250,00			67.959.250,00			67.959.250,00
	Dinas Kominfo	BPJS Kesehatan	2.043.883,00			2.043.883,00			2.043.883,00
	Kecamatan Tana Righu	Kewajiban JKK dan JKM					536.011,00		536.011,00
	BELANJA BARANG		8.485.693.506,00	156.610.328,00	-	8.642.303.834,00	2.818.935.894,00	4.444.058.038,00	7.017.181.690,00
	RSUD	Belanja Barang BLUD	8.410.965.506,00	156.610.328	-	8.567.575.834,00	2.818.935.894,00	4.429.058.038,00	6.957.453.690,00
	Dinas Pertanian	Makan minum kegiatan pencaanangan kelor dan transportasi akomodasi manbun	20.000.000,00		-	20.000.000,00			20.000.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat & Pemukiman	perencanaan DED Penataan Bangunan kawasan cagar budaya	39.728.000,00		-	39.728.000,00			39.728.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hadiah Lomba Antar Kelurahan/Desa	15.000.000,00		-	15.000.000,00		15.000.000,00	-
	BELANJA JASA		1.593.750.188,00	-	-	1.593.750.188,00	50.437.915,92	-	1.644.188.103,92
	RSUD	insentif covid 2021	1.593.750.188,00		-	1.593.750.188,00			1.593.750.188,00
	Dinas Kesehatan	- Jasa Pelayanan kesehatan Puskesmas					49.032.222,84		49.032.222,84
	RSU Hobakalla	- Jasa Pelayanan kesehatan	-			-	1.405.693,08	-	1.405.693,08
	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		14.272.948,20	-	-	14.272.948,20	-	-	14.272.948,20
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	pengawasan dan pembangunan gedung kantor	14.272.948,20		-	14.272.948,20			14.272.948,20
	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		712.764.842,00	-	-	712.764.842,00	799.501.849,00	-	1.512.266.691,00
	Dinas PUPR	pembangunan sumur air tanah SPAM 2022	173.645.907,00			173.645.907,00			173.645.907,00
		Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan 2022	366.439.295,00			366.439.295,00			366.439.295,00
		Jembatan 2022	172.679.640,00			172.679.640,00			172.679.640,00
		pembangunan sumur air tanah SPAM 2023				-	799.501.849,00		799.501.849,00
	JUMLAH TOTAL		13.259.984.617,20	156.610.328,00	-	13.416.594.945,20	5.586.411.669,92	5.996.058.038,00	13.006.948.577,12

13.259.984.617,20



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BAR
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 DESEMBER 2023

Lampiran 25

RINCIAN KOREKSI EKUITAS AUDITED 2023

No	OPD	AKUN INDUK	AKUN	URAIAN	NILAI	D/K	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN DARI KAPITALISASI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	(916.722.253,10)	D	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ASET TETAP	AT-GEDUNG DAN BANGUNAN	PENGHAPUSAN AT GB (RUANG KELAS I-III DAN WC SDN PUU MAGHO)	(887.400.000,00)	D	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	PENGHAPUSAN AT GB (RUANG KELAS I-III DAN WC SDN PUU MAGHO)	283.968.000,00	K	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN AKIBAT PENYESUAIAN MASA MANFAAT SESUAI KEBIJAKAN AKUNTANSI	1.908.200,00	K	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN AT-L YANG DIREKLASIFIKASI KE AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	(9.174.356,50)	D	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	Koreksi atas akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya berupa gong atau alat kesenian lainnya yang dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	39.684.760,00	K	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	Koreksi atas akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya berupa gong atau alat kesenian lainnya yang dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(52.307.266,67)	D	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ASET TETAP	AT-GEDUNG DAN BANGUNAN	PENGHAPUSAN AT GB (RUANG KELAS I-III DAN WC SDN PUU MAGHO)	603.432.000,00	K	
	2	DINAS KESEHATAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN AKIBAT PENYESUAIAN MASA MANFAAT SESUAI KEBIJAKAN AKUNTANSI	1.998.000,00	D
		RSUD WAIKABUBAK	KEWAJIBAN	UTANG BELANJA	KOREKSI PENAMBAHAN UTANG 2022 BERDASARKAN HASIL KONFIRMASI	(63.278.634,00)	D
RSUD WAIKABUBAK		KEWAJIBAN	UTANG BELANJA	KOREKSI PENAMBAHAN UTANG 2022 BERDASARKAN HASIL KONFIRMASI	(93.331.694,00)	D	
RSUD WAIKABUBAK		ASET TETAP	AT-PERALATAN DAN MESIN	HIBAH BMN TAHUN 2021	18.407.097.000,00	K	
RSUD WAIKABUBAK		ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	HIBAH BMN TAHUN 2021	(7.779.308.566,67)	D	
RSUD WAIKABUBAK		ASET TETAP	AT-PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP PM DIBAWAH NILAI KAPITALISASI	(99.621.000,00)	D	
RSUD WAIKABUBAK		ASET TETAP	AT-GEDUNG DAN BANGUNAN	HIBAH BMN GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN 2021	654.500.000,00	K	
RSUD WAIKABUBAK		ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	HIBAH BMN GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN 2021	(26.180.000,00)	D	
RSUD WAIKABUBAK		ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN DARI KAPITALISASI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	(8.125.920,72)	D	
RSUD WAIKABUBAK		ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	KAPITALISASI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	(8.125.920,72)	D	
4	DINAS PUPR	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	KOREKSI KAPITALISASI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(15.649.027.235,47)	D	
	DINAS PUPR	ASET LANCAR	PERSEDIAAN	KOREKSI PERSEDIAAN YANG TELAH DISERAHKAN KE MASYARAKAT TAHUN 2020	(359.070.000,00)	D	
	DPMD	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN DARI KAPITALISASI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	(2.258.450,00)	D	
	DP5A	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN AKIBAT PENYESUAIAN MASA MANFAAT SESUAI KEBIJAKAN AKUNTANSI	10.871.696,00	K	
	DPMTSP	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN AKIBAT PENYESUAIAN MASA MANFAAT SESUAI KEBIJAKAN AKUNTANSI		D	
	DINAS KOPERINDAG	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	KOREKSI ATAS PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA YANG DIPEROLEH SEBELUM TAHUN 2023 TERDIRI ATAS GONG, ALAT KESENIAN, MAKET DAN FOTO DOKUMEN	(1.413.500,00)	D	
	DINAS PERPUSTAKAAN	ASET TETAP	AT-GEDUNG DAN BANGUNAN	PENGHAPUSAN SK GEDUNG KANTOR DIBUDPAR	(196.820.500,00)	D	
	DINAS PERPUSTAKAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	PENGHAPUSAN SK GEDUNG KANTOR DISBUDPAR	91.784.668,75	K	
	DINAS PERPUSTAKAAN	ASET TETAP	AT-GEDUNG DAN BANGUNAN	PENGHAPUSAN SK GEDUNG KANTOR DIBUDPAR	105.035.831,25	K	
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	KOREKSI ATAS PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA YANG DIPEROLEH SEBELUM TAHUN 2023 TERDIRI ATAS GONG, ALAT KESENIAN, MAKET DAN FOTO DOKUMEN	(299.521.000,00)	D	
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	ASET LAINNYA	ASET LAIN-LAIN	KOREKSI ATAS PENDOBELAN PENCATATAN MOBIL TOYOTA KIJANG KF 50 ED 151 B DENGAN KIB PENGELOLA	(55.000.000,00)	D	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN DARI KAPITALISASI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	(20.784.620,00)	D	
	DINAS PERTANIAN	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN DARI KAPITALISASI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	(53.534.775,51)	D	
	DINAS PERTANIAN	ASET LANCAR	PERSEDIAAN	Hibah Persediaan dari Kementerian PDT 2018 dan 2019	4.669.594.887,00	K	
	SEKRETARIAT DAERAH	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN DARI KAPITALISASI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	(10.215.491,33)	D	
	SEKRETARIAT DAERAH	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	Hibah kendaraan ke Kejaksaan (Pemindahtanganan) Tahun 2023	157.500.000,00	K	
	BKAD	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	HIBAH KE KEJAKSAAN Tahun 2023	153.861.925,00	K	
	PPKD	ASET LANCAR	KAS DI KAS DAERAH	KOREKSI KAS 2022 YAITU PFK YANG TELAH DIBAYARKAN	20.000,00	K	
	SEKRETARIAT DPRD	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN DARI KAPITALISASI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	(58.227.428,58)	D	
	KEC LAMBOYA	ASET TETAP	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN DARI KAPITALISASI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	(71.128.086,96)	D	
KEC LAMBOYA	ASET TETAP	AT-GEDUNG DAN BANGUNAN	REKLAS DARI ALL KE GB	40.957.869,57	K		
TOTAL					(1.490.235.941,94)	-	

ASE

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
RSUD WAIKABUBAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Japendi Rizall Pavliando Saragih, Sp.A.M.Biomed
Jabatan : Direktur RSUD Waikabubak
NIK : 3573031311760001
Alamat Kantor : Jl. Adhyaksa KM 3, Kel. Dira Tana, Kota Waikabubak
Nomor Telepon : 0811 3039 976

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan laporan keuangan yang telah dilaksanakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai di **RSUD Waikabubak**.
2. Laporan keuangan **RSUD Waikabubak** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan **RSUD Waikabubak** telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan **RSUD Waikabubak** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam **RSUD Waikabubak**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Waikabubak, tgl. 01 April 2024

Atas Nama dan mewakili
RSUD WAIKABUBAK
Direktur



Dr. JAPENDI RIZALL PAVLIANDO SARAGIH, Sp.A.M.Biomed
NIP. 19761113 200501 1 005

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK
KABUPATEN SUMBA BARAT**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direktur	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
1 Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 dan 2022	1
2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023 dan 2022	2
3 Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022	3
4 Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	4
5 Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	5
6 Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 22
1 Gambaran Umum	
2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	
3 Penjelasan Pos-Pos Realisasi Anggaran	
4 Penjelasan Pos-Pos Neraca	
5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
PENDAPATAN				
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	27.000.000.000	31.029.280.930	114,92%	26.854.423.817
Pendapatan Hibah	-	-	0,00%	4.913.724.500
Pendapatan APBD / APBN	43.967.160.063	43.533.262.782	99,01%	27.408.480.119
Jumlah Pendapatan	70.967.160.063	74.562.543.712	105,07%	59.176.628.436
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	12.308.568.094	11.902.573.856	96,70%	12.753.520.738
Belanja Barang	40.754.844.659	42.135.980.479	100,00%	43.186.313.679
BELANJA MODAL				
Belanja Peralatan dan Medis	7.608.249.869	7.211.616.834	94,79%	5.339.347.333
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.588.158.750	10.588.158.750	100,00%	-
Jumlah Belanja	71.259.821.373	71.838.329.919	100,81%	61.279.181.750
31 Desember 2023 dan 2022	(292.661.310)	2.724.213.793	-930,84%	(2.102.553.314)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN				
Penggunaan SILPA BLUD Tahun Lalu	292.661.310	292.661.310	100,00%	2.395.214.623
Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-
Penerimaan dari Divestasi	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Pihak Lain	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	292.661.310	292.661.310	100,00%	2.395.214.623
PENGELUARAN				
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	292.661.310	292.661.310	100,00%	2.395.214.623
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA / SIKPA)	0	3.016.875.102	0,00%	292.661.310

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mengetahui,
Direktur RSUD Waikabubak,



Dr. JEPENDI RIZALL PAVLIANDO SARAGIH, Sp.A.M.Biomed

NIP. 19761113 200501 1 005

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	292.661.310	2.395.214.623
Penggunaan SAL	-	-
Sub Total	292.661.310	2.395.214.623
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2.724.213.793	(2.102.553.314)
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN:		
Pendapatan Alokasi APBN	-	-
Penyetoran PNBK Ke Kas Negara	-	-
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2.724.213.793	(2.102.553.314)
Jumlah	3.016.875.102	292.661.310
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir	3.016.875.102	292.661.310

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mengetahui,
Direktur RSUD Waikabubak,



Dr. JEPENDI RIZALL PAVLIANDO SARAGIH, Sp.A.M.Biomed

NIP. 19761113 200501 1 005

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

ASET	Catatan	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	1	3.016.875.102	292.661.310
Piutang usaha	2	2.713.301.831	4.265.399.575
Persediaan barang	3	2.266.548.438	1.686.429.555
Jumlah aset lancar		7.996.725.371	6.244.490.439
ASET TIDAK LANCAR			
Nilai Buku Aset Tetap	4	94.384.085.049	82.399.170.719
Nilai Buku Aset Lain-Lain	5	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		94.384.085.049	82.399.170.719
TOTAL ASET		102.380.810.420	88.643.661.158
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Belanja Barang & Jasa	6	13.209.532.838	12.451.494.328
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		13.209.532.838	12.451.494.328
TOTAL KEWAJIBAN		13.209.532.838	12.451.494.328
EKUITAS			
Ekuitas		89.171.277.582	76.192.166.830
Jumlah Ekuitas		89.171.277.582	76.192.166.830
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		102.380.810.420	88.643.661.158

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mengetahui,
Direktur RSUD Waikabubak,



Dr. JEPENDI RIZALL PAVLIANDO SARAGIH, Sp.A.M.Biomed

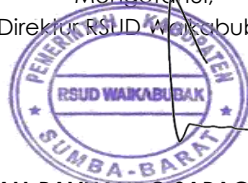
NIP. 19761113 200501 1 005

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	<u>Catatan</u>	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
		<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Jasa Layanan BLUD		31.015.728.889	27.556.446.438
Pendapatan Lain-Lain		13.552.041	15.681.354
Pendapatan dari APBD		43.720.754.982	27.408.480.119
Pendapatan Pihak Ketiga		-	-
Pendapatan Hibah		-	6.149.724.500
Jumlah Pendapatan Operasional		74.750.035.912	61.130.332.411
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		12.267.573.856	13.359.520.738
Beban Persediaan		-	-
Beban Barang Dan Jasa		42.154.094.680	40.715.395.888
Beban Pemeliharaan		-	-
Beban Penyusutan Dan Amortisasi		16.299.768.900	24.441.941.242
Beban Lain Lain		-	-
Jumlah Beban Operasional		70.721.437.436	78.516.857.868
Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		4.028.598.476	(17.386.525.457)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TYL		-	-
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/ (DEFISIT) LO		4.028.598.476	(17.386.525.457)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mengetahui,
Direktur RSUD Waikabubak,



Dr. JEPENDI RIZALL PAVLIANDO SARAGIH, Sp.A.M.Biomed

NIP. 19761113 200501 1 005

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Keterangan	Ekuitas Awal	Saldo Surplus (Defisit)	Total Ekuitas
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	61.304.657.898	37.027.552.011	98.332.209.909
Penyesuaian Ekuitas Awal :			(1.909.140.982)
Surplus (Defisit) Tahun 2022	-	(17.386.525.457)	(17.386.525.457)
Hibah Aset Tetap Peralatan Medis	1.267.520.614	-	1.267.520.614
Koreksi Utang Obat	(63.278.634)	-	(63.278.634)
Koreksi Aset Lain-lain	-	(3.999.245.455)	(3.999.245.455)
Koreksi Aset Tetap	(49.373.165)	-	(49.373.165)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasi	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	62.459.526.713	15.641.781.099	76.192.166.830
Penyesuaian Ekuitas Awal :			
Surplus (Defisit) Tahun 2023		4.028.598.476	4.028.598.476
Koreksi Ekuitas Awal	5.281.532.766	-	5.281.532.766
Koreksi Aset Tetap	2.687.121.457	-	2.687.121.457
Koreksi Aset Lain-lain	4.486.725.384	-	4.486.725.384
Koreksi Kewajiban Jasa Reguler	(1.830.467.168)	-	(1.830.467.168)
Koreksi Aset Tetap	(1.674.400.164)	-	(1.674.400.164)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	71.410.038.988	19.670.379.575	89.171.277.582

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mengetahui,
Direktur RSUD Waikabubak,



Dr. JEPENDI RIZALL PAVLIANDO SARAGIH, Sp.A.M.Biomed

NIP. 19761113 200501 1 005

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

Catatan	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	31.029.280.930	26.854.423.817
Pendapatan Hibah	-	4.913.724.500
Pendapatan APBD	43.533.262.782	27.408.480.119
Pendapatan Usaha Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	74.562.543.712	59.176.628.436
Arus Keluar Kas		
Beban Pegawai	11.902.573.856	12.753.520.738
Beban Barang dan Jasa	42.135.980.479	43.186.313.679
Pembayaran Utang Usaha	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	54.038.554.335	55.939.834.417
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	20.523.989.377	3.236.794.019
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap	-	-
Arus Keluar Kas		
Perolehan Aset Tetap (Peralatan Medis)	7.211.616.834	5.339.347.333
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.588.158.750	-
Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(17.799.775.584)	(5.339.347.333)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan :		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Setoran Sisa Dana BLUD	-	-
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Setoran ke APBD	-	-
Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	2.724.213.793	(2.102.553.314)
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	292.661.310	2.395.214.623
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	3.016.875.102	292.661.310

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)**

1. UMUM

a. Latar Belakang

Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.05/2007 tentang administrasi Pengusulan dan Penetapan satuan kerja Instansi pemerintah untuk menerapkan PPK-BLU, maka Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat melakukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai BLU,dengan harapan akan lebih mampu bersaing dan lebih luwes dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis untuk memenuhi tuntutan layanan prima bagi masyarakat.

Pelayanan RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta berubahnya pengelola keuangan menjadi BLUD kini berorientasi kepada fungsi pelayanan-pelayanan sosial ekonomi (social economic oriented).Untuk mencapai nilai ekonomi yang besar dituntut agar dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai sehingga dapat menunjang kelangsungan jalannya organisasi yang pada saatnya dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan kegiatan baik manajemen maupun pemberi dana/ pemerintah perlu mengetahui seberapa jauh alokasi dana yang sudah maupun yang belum terserap pada tahun sebelumnya maka RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat diwajibkan untuk membuat laporan triwulan dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Standar Akuntansi Keuangan).

Laporan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat disusun berdasarkan peraturan Menteri Nomor 76/PMK.05/2008 tentang pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum yang terdiri dari neraca,Laporan Operasional,Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan Basis Accrual.

Pihak manajemen memerlukan informasi keuangan berupa Laporan Keuangan yang disajikan secara wajar dan digunakan dalam pengambil keputusan untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan masyarakat,sementara pihak pemerintah dan pihak lainnya dengan melalui laporan keuangan dapat menilai apakah pertanggung jawaban manajemen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dana - dana yang diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Sumba Barat telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b. Dasar Hukum Pendirian

Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak merupakan salah satu lembaga teknis di Kabupaten Sumba Barat yang didirikan tahun 1983 dan mulai beroperasi sejak 5 Juli 1995 sebagai rumah sakit Tipe D. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 519/Menkes/SK/VIII/2009 sampai sekarang sebagai Rumah Sakit Tipe C. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Sumba Barat berdomisili dan berkedudukan di pinggiran kota Waikabubak dengan Alamat Jln.Adhyaksa Km.3 Kelurahan Diratana Kecamatan Loli.

Sejalan dengan itu Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak (RSUD Waikabubak) merupakan rumah sakit rujukan dari 4 (empat) rumah sakit dan puskesmas yang berada di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang badan layanan umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dapat mengubah statusnya dan lembaga birokratis menjadi Badan Layanan Umum yang merupakan Badan yang memiliki otonomi atau semi otonomi dalam pengelolaan keuangannya.

Terkait dengan adanya PP nomor 23 dan Mendagri Nomor 79 tahun 2018 sebagai perubahan dari Permendagri nomor 61 tahun 2007,maka dalam upaya untuk pengusulan dan penetapan SKPD untuk menerapkan PPK-BLUD telah dikeluarkan keputusan Bupati Sumba Barat Nomor:KEP/HK/220/2014 tanggal 10 April 2014 yang menetapkan RSUD Waikabubak sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan Status penuh.

Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat, RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat merupakan perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pimpinan Pemerintah Kabupaten dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit
- Penyusunan program kerja tahunan,jangka menengah dan jangka panjang
- Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan
- Pelayanan Medis,penunjang medis dan non medis
- Penyelenggaraan Usaha Keperawatan
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan, dan
- Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)**

c. Susunan Dewan Pengawas dan Direktur BLUD RSUD Waikabubak Sumba Barat

Susunan Dewan Pengawas dan Direktur BLUD RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut:

		Tahun 2023	Tahun 2022
Susunan Dewan Pengawas			
Ketua Dewan Pengawas	:	Drs. Martha Bili Lalo,SH	-
Sekretaris Dewan Pengawas	:	Gustigab Karabi, SE	-
Anggota Dewan Pengawas	:	Agustinus Rabilla, A.Md Kep	Drs.Daniel B. Pabala
Anggota Dewan Pengawas	:	Drg.Bonar B.Sinaga,M.Kes.	Drs. Daniel B.S. Baninema, SE
Susunan Direktur			
Direktur	:	dr.J.R.P.Saragih,Sp.A.Biomed	dr.J.R.P.Saragih,Sp.A.Biomed

Pembentukan Dewan Pengawas BLUD RSUD Waikabubak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/268/2022 tanggal 19 April 2022 dengan masa jabatan berlaku 5 tahun.

Pengangkatan Direktur BLUD RSUD Waikabubak berdasarkan surat keputusan Bupati Sumba Barat No. BKPP.821.2/100/53.12/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019. Pelantikan dilaksanakan oleh Bupati Sumba Barat tanggal 18 Nopember 2019 sesuai surat pernyataan pelantikan nomor : B.566/BKPP/821.2/53.12/11/2019.

d. Jumlah tenaga Sumber Daya Manusia BLUD RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut

No	Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis	Tahun 2023		Tahun 2022	
		PNS	Non PNS*)	PNS	Non PNS*)
1	Tenaga Medis				
-	Dokter Spesialis	13	1	9	7
-	Dokter Umum	9	3	8	14
-	Dokter Residen	0	4	0	3
-	Dokter Gigi	2	0	2	0
-	Patologi Klinik	1	0	0	0
-	Mikrobiologi Klinik	1	0		
-	Paramedis Non Perawatan	54	20	30	50
-	Perawat	154	65	77	127
-	Bidan	41	6	14	28
	Jumlah Tenaga Medis	275	99	140	229
2	Tenaga Non Medis	42	127	55	143
	Jumlah Karyawan	317	226	195	372

*) Non PNS termasuk di dalamnya PTTS, Part Timer, Honorer, Kontrak dan Bakti

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh BLUD RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat untuk Penyusunan Laporan Keuangan :

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

- Laporan Keuangan BLUD Rumah sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 76/PMK.05/2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU yang terdiri dari Neraca ,laporan operasional,laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan basis akrual.
- Laporan Aus kas disusun atas dasar kas dengan metode langsung yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi,aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- Periode akuntansi adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

b. Kas dan Setara Kas

kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan BLU. Kas terdiri atas saldo kas (Cash on hand) dan rekening giro. Setara kas (cash equivalent) merupakan deposito berjangka pendek yang dapat dicairkan dalam waktu paling lama 3 bulan tanpa risiko penurunan nilai secara signifikan.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)**

c. Piutang Pelayanan

Piutang disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Besarnya penyisihan kerugian piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut :

Jenis Piutang	Umur Piutang	Tarif
Piutang Pelayanan dan Piutang Lainnya	< 1 Tahun	0%
	> 1 - 2 Tahun	10%
	> 2 - 3 Tahun	50%
	> 3 Tahun	100%

Biaya Penyisihan Piutang dibebankan ke dalam biaya umum dan administrasi. Penyisihan Piutang yang sudah dihapus dari pembukuan tetapi harus dicatat secara ekstra komptabel, sampai ada persetujuan penghapusannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Persediaan

Persediaan merupakan aset yang diperoleh dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan diakui saat barang diterima atau dihasilkan. Persediaan berkurang pada saat pemakaian, dijual, kadaluarsa atau rusak.

Pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual dan dinilai dengan menggunakan biaya perolehan dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (Fifo method).

e. Aset Tetap

Aset yang digunakan oleh BLUD RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat yang diperoleh dari dana APBD maupun

Kelompok Aset	Masa Manfaat	
Alat - alat Bantu	5	Tahun
Alat Angkutan Darat Bermotor	10	Tahun
Alat Bengkel Bermesin	10	Tahun
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	Tahun
Alat Ukur	5	Tahun
Alat Kantor	5	Tahun
Alat Rumah Tangga	5	Tahun
Peralatan Komputer	5	Tahun
Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5 - 10	Tahun
Alat Studio	5	Tahun
Alat Komunikasi	5	Tahun
Peralatan Pemancar	10	Tahun
Alat Kedokteran	5	Tahun
Alat Kesehatan	5	Tahun
Unit-Unit Laboratorium	8	Tahun
Alat Peraga/ Praktek Sekolah	10	Tahun
Alat Keamanan dan	5	Tahun
Gedung Dan Bangunan		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	Tahun
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	Tahun
Jalan, Jembatan dan Irigasi		
Jalan	10	Tahun
Bangunan Selokan Air	20	Tahun
Bangunan Perkembangan Sumber Air dan Air Tanah	20	Tahun
Instalasi Air Bersih	10	Tahun
Instalasi Listrik	10	Tahun
Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	10	Tahun
- Instalasi Gas	10	Tahun
- Jaringan Pipa Air	20	Tahun
- Jaringan TV Kabel/SIM RS	10	Tahun
- Jaringan Telepon	10	Tahun

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)**

Pengeluaran untuk perbaikan dan perawatan aset tetap dibebankan pada laporan operasional pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi pada jumlah tercatat aset tetap yang bersangkutan. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan keuntungan atau kerugian yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan oprasional tahun berjalan. Apabila manfaat ke-ekonomian aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tetap tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian, Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan operasional.

f. Ekuitas

- Ekuitas adalah hak residual atas aset BLUD setelah dikurangi seluruh kewajiban.
- Ekuitas BLUD RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat tidak terbagi dalam bentuk saham.
- Ekuitas BLUD RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Donasi yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan donasi lain diluar APBD dicatat sebagai ekuitas donasi.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- Sumbangan dari pihak lain diluar pemerintah dan subsidi pemerintah diakui berdasarkan penerimaan kas atau aset non kas.
- Pendapatan jasa layanan diakui pada saat jasa pelayanan selesai dilaksanakan.
- Pendapatan dari obat-obatan, bahan dan alat kesehatan yang digunakan untu kegiatan pelayanan diakui pada saat barang diserahkan atau dikonsumsi pasien atau pembeli.
- Pendapatan dari obat-obatan, bahan dan alat kesehatan yang dilakukan apotek diakui pada saat barang diserahkan atau dikonsumsi pasien atau pembeli.
- Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (dasar akrual).

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode palaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang di estimasi.

i. Perpajakan

Kewajiban Perpajakan bagi BLUD RSUD Waikabubak yang merupakan SKPD Kabupaten Sumba Barat adalah Wajib pungut/potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya menyetor ke kas negara dan melaporkan ke kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak penghasilan badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)**

3. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Penjelasan Pos - Pos Pendapatan

Jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.60.379.443.642 atau 112% dari anggaran sebesar Rp.54.149.922.076,-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.59.176.628.436,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan dari Jasa Pelayanan				
- Pendapatan Pasien Umum		1.264.947.930	100%	1.700.033.659
- Pendapatan Pasien BPJS	-	29.089.467.346	100%	25.070.000.338
- Pendapatan Pasien STKM SBD	-	-	-	-
- Pendapatan BLUD	27.000.000.000	-	100%	-
- Pendapatan Hibah	-	-	0%	4.913.724.500
- Pendapatan APBD/APBN	43.967.160.063	43.720.754.982	99%	27.408.480.119
- Pendapatan Pasien Covid	-	-	-	-
- Pendapatan Jasa Raharja	-	185.311.225	100%	84.389.820
Jumlah Pendapatan Jasa Pelayanan	70.967.160.063	74.260.481.483	105%	59.176.628.436
Pendapatan Lain-lain :				
Pendapatan Non Usaha :				
- Pendapatan Jasa Giro	-	13.552.041	100%	15.681.354
- Pendapatan Denda BPJS - BRI	-	-	-	-
- Claim Covid 19	-	313.487.000	-	-
- Penerimaan kembali -PJK uang muka	-	-	-	-
- Setoran Lain-Lain	-	162.515.388	100%	17.503.440
Jumlah Pendapatan Non Usaha	-	489.554.429	100%	33.184.794
Pendapatan Lainnya				
- Sumbangan Pihak ke Tiga				-
Jumlah	70.967.160.063	74.750.035.912	105%	59.209.813.231

B. Penjelasan Pos - Pos Belanja

Jumlah realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.750.035.912,- Atau 105% dari anggaran sebesar Rp70.967.160.063,-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp60.412.628.437,- dengan rincian sebagai berikut :

a Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.10.902.884.655,00 atau 98 % dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.11.112.918.094,-. Belanja pegawai dapat dirincikan sebagai berikut :

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)**

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai dan Tunjangan :				
Gaji Pokok	8.559.106.533	8.407.354.160	98%	8.112.250.648
Tunjangan Keluarga	695.067.258	672.344.516	97%	651.643.592
Tunjangan Jabatan	141.313.000	137.620.000	97%	138.060.000
Tunjangan Fungsional	588.751.625	573.025.000	97%	549.648.000
Tunjangan Fungsional Umum	184.744.000	184.140.000	100%	184.410.000
Tunjangan Beras	520.516.940	507.084.840	97%	499.625.580
Tunjangan PPH	3.626.986	3.622.306	100%	2.721.018
Pembulatan Gaji	130.209	127.354	98%	125.607
Iuran Jaminan Kesehatan	349.138.995	347.396.963	100%	335.161.583
Iuran Kesehatan JKK	17.630.673	17.542.413	0%	16.905.502
Iuran Kesehatan JKM	52.891.875	52.627.103	0%	50.716.605
Jumlah	11.112.918.094	10.902.884.655	98%	10.541.268.135
Belanja Honorarium PNS :				
Tim Pengadaan barang dan Jasa			-	-
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	-	-	-	-
Pegawai BLUD	1.195.650.000	999.689.201	84%	2.212.252.603
Tunjangan Kerja PNS	-	-	-	-
Jumlah	1.195.650.000	999.689.201	84%	2.212.252.603
Belanja Honorarium Non PNS				
Pegawai Honorarier/tidak tetap			-	-
Tunjangan Kerja Non PNS				
Jumlah	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa				
Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
Transportasi dan Akomodasi	-	-	-	-
Premi Asuransi Kesehatan	195.876.350	152.222.832	78%	191.847.530
Makanan dan Minuman rapat	-	-	-	-
Alat Listrik	-	-	-	-
Perlengkapan Dinas	-	-	-	-
Alat Bahan Kegiatan Kantor	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Belanja Obat Obatan	3.000.000.000	2.997.014.796	100%	2.484.935.773
Belanja Jasa Kantor	12.074.560.000	11.897.334.880	99%	14.190.428.681
Barang dan Jasa BLUD	25.484.408.309	27.089.407.971	106%	26.319.101.695
Jumlah	40.754.844.659	42.135.980.479	103%	43.186.313.679

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)**

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.588.158.750	10.588.158.750		-
Belanja Modal Perlatan dan Mesin :				5.339.347.333
Alat Kantor				
Modal Alat Angkutan				
Alat Rumah Tangga-Mebelair				
Peralatan Jaringan Komputer				
Alat Kedokteran Umum	6.995.646.869	6.995.646.869	100%	4.913.724.500
Alat Kedokteran Radiologi				-
Alat Kesehatan Perawatan				-
Unit Laboratorium				-
Komputer				-
Peralatan dan Mesin BLUD	612.603.000	215.969.965	35%	425.622.833
Jumlah	18.196.408.619	17.799.775.584	98%	10.678.694.666
TOTAL BELANJA	71.259.821.372	71.838.329.919	101%	66.618.529.083

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1 PENDAPATAN

Anggaran , Laporan Realisasi Anggaran RSUD WAIKABUBAK per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.70.967.160.063,- Dan Realisasi sebesar Rp.74.750.035.912,-.

	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Prosentase
	Rp	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah			
- Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	27.000.000.000	31.029.280.930	114,92%
- Pendapatan Hibah	-	-	0,00%
- Pendapatan APBD / APBN	43.967.160.063	43.533.262.782	99,01%
Jumlah Pendapatan	70.967.160.063	74.562.543.712	105,07%

2 BELANJA

A. APBD

Anggaran Belanja Laporan Realisasi Anggaran RSUD WAIKABUBAK per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.43.967.160.063 33,- Dan Realisasi APBD tahun 2023 sebesar Rp.43.533.262.782,-.

	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Prosentase
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai			
- Belanja Gaji Pokok ASN	8.559.106.533	8.407.354.215	98,23%
- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	695.067.258	672.344.516	96,73%
- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141.313.000	137.620.000	97,39%
- Belanja Tunjangan Fungsional ASN	588.751.625	573.025.000	97,33%
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	184.744.000	184.140.000	99,67%
- Belanja Tunjangan Beras ASN	520.516.940	507.084.840	97,42%
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.626.986	3.622.306	99,87%
- Belanja Pembulatan Gaji ASN	130.209	127.299	97,77%
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	349.138.995	347.396.963	99,50%
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	17.630.673	17.542.413	99,50%
- Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	52.891.875	52.627.103	99,50%
Jumlah Belanja Pegawai	11.112.918.094	10.902.884.655	98,11%
Belanja Barang dan Jasa			
- Belanja Barang			
Belanja Barang Pakai Habis			
Belanja Obat-Obatan-Obat	3.000.000.000	2.997.014.796	99,90%
- Belanja Jasa			
Belanja Jasa Kantor			
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.074.560.000	11.897.334.880	98,53%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	195.876.350	152.222.832	77,71%
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	15.270.436.350	15.046.572.508	98,53%
Jumlah Belanja Operasi	26.383.354.444	25.949.457.163	98,36%
Belanja Modal			
- Belanja Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.995.646.869	6.995.646.869	100,00%
Belanja Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Bangunan Gedung			
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.588.158.750	10.588.158.750	100,00%
Jumlah Belanja Modal	17.583.805.619	17.583.805.619	100,00%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

B. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Anggaran Belanja Laporan Realisasi Anggaran RSUD WAIKABUBAK per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 27.292.661.309,- Dan realisasi sebesar Rp. 28.305.067.137,-.

	ANGGARAN 2023	REALISASI 2022	Prosentase
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi			
- Belanja Pegawai BLUD			
- Gaji Pegawai BLUD Tidak Tetap	1.195.650.000	999.689.201	83,61%
- Insentif Tenaga Kesehatan	-	-	
- Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	-	-	
- Honor Pengeloa Keuangan, Pengeloa Barang dan Pelaksana Kegiatan	-	-	
- Biaya Lembur Pegawai	-	-	
- Honorarium Dewan Pengawas	-	-	
Jumlah Belanja Pegawai	1.195.650.000	999.689.201	83,61%
Belanja Barang dan Jasa BLUD			
- Belanja Barang dan Jasa BLUD			
- Belanja Obat-Obatan	2.396.545.653	2.548.347.774	106,33%
- Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	4.845.065.000	6.400.901.521	132,11%
- Belanja Bahan dan Alat Laboratorium	50.000.000	4.500.000	9,00%
- Belanja Bahan Makanan Pasien (makanan basah & kering)	1.294.972.500	1.099.022.559	84,87%
- Belanja Jasa Pelayanan/Remunerasi	7.145.307.657	9.212.015.454	128,92%
- Belanja Kalibrasi Alat RS	50.000.000	-	0,00%
- Belanja Pemeliharaan Alat Medis & Non Medis	533.565.000	36.878.976	6,91%
- Belanja Linen	50.000.000	24.818.741	100,00%
- Belanja Lembur Pegawai	55.687.729	70.108.000	100,00%
- Belanja Honorarium Dewan Pengawas	78.456.804	74.750.183	95,28%
- Belanja Cetakan Rekam Medis	768.792.806	885.363.659	115,16%
- Belanja Insentif Tenaga Kesehatan	1.995.000.000	1.255.500.000	62,93%
- Belanja Benda Pos dan Pengiriman	25.000.000	23.659.140	94,64%
- Belanja ATK	350.000.000	443.039.891	126,58%
- Belanja Penggandaan	93.724.160	54.369.000	58,01%
- Belanja Makan Minum Non Pasien	150.000.000	254.133.497	169,42%
- Belanja Langganan Listrik / Air / Telp / Internet, dll	570.000.000	541.572.140	95,01%
- Belanja Langganan Zoom	909.000	-	100,00%
- Belanja Langganan Media / Surat Kabar / Majalah	-	-	100,00%
- Belanja Perjalanan Dinas	315.000.000	494.905.072	157,11%
- Jasa Pelaksana Kegiatan	1.054.800.000	690.674.147	65,48%
- Belanja Keanggotaan Persi	10.000.000	-	0,00%
- Belanja Akomodasi dan Transportasi	50.000.000	53.570.947	107,14%
- Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas & Gedung Kantor	150.000.000	81.221.107	54,15%
- Belanja Pemeliharaan Instalasi / Jaringan	50.000.000	56.345.556	112,69%
- Belanja Pemeliharaan Alat Transportasi	112.000.000	185.793.650	165,89%
- Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi	20.000.000	1.410.000	7,05%
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan RT	150.000.000	147.982.250	98,65%
- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	30.000.000	23.313.000	77,71%
- Belanja Bahan dan Alat Sanitasi	25.000.000	3.500.000	14,00%
- Belanja Pembersih dan Alat Kebersihan	500.000.000	612.140.687	122,43%
- Belanja Bahan Bakar	250.000.000	186.637.356	74,65%
- Belanja Bahan Gas (O2, CO, N2O)	892.000.000	950.869.900	106,60%
- Belanja Bahan dan Alat Dapur / Pantry	50.000.000	59.176.500	118,35%
- Belanja Peralatan Listrik / Elektronik / Kedokteran	275.000.000	226.786.590	82,47%
- Belanja Peralatan Kerja/ Bahan Kerja	30.000.000	31.831.258	100,00%
- Belanja Peralatan Kantor dan RT	200.000.000	102.379.916	51,19%
- Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000	-	100,00%
- Belanja Peningkatan Mutu SDM	100.000.000	115.660.000	115,66%
- Belanja Sewa	100.000.000	2.300.000	2,30%
- Belanja Jasa Sampah/Pemeriksaan Air, Udara, Gas	15.000.000	-	100,00%
- Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Infeksius	12.000.000	-	100,00%
- Belanja Kerja Tenaga Tidak Tetap	30.000.000	25.650.000	85,50%
- Belanja Promosi dan Publikasi	30.000.000	13.734.000	100,00%
- Belanja Biaya Studi Kelayakan	400.000.000	-	100,00%
- Belanja Pakaian Dinas Harian	5.582.000	7.532.000	100,00%
- Belanja Sosial / Bencana Alam	75.000.000	87.013.500	116,02%
Jumlah Belanja Barang & Jasa	25.484.408.309	27.089.407.971	106,30%
Jumlah Belanja Operasi	26.680.058.309	28.089.097.172	105,28%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Belanja Modal			
- Belanja Peralatan dan Mesin			
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	
- Peralatan Kedokteran/Kesehatan	-	-	
- Peralatan Kantor	-	-	
- Peralatan RT	-	-	
- Pengembangan SIM RS	612.603.000	215.969.965	35,25%
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	612.603.000	215.969.965	35,25%
Jumlah Belanja Modal	612.603.000	215.969.965	35,25%

LANJUT PENJELASAN POS-POS NERACA

B. PENJELASAN POS - POS NERACA

1 KAS DAN SETARA KAS

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
Kas Tunai		
- Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
- Kas Bendahara Penerimaan	-	-
- Kas BLUD	-	-
Bank		
- PT Bank Republik Indonesia Tbk Rek. 023501001769307	2.556.054.920	285.870.370
- Bank Pembangunan Daerah - NTT Rek. 00905001067-5	460.820.182	6.790.940
- Bank Pembangunan Daerah - NTT Rek. 00901050005061 (APBD)	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	3.016.875.102	292.661.310

2 PIUTANG USAHA

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
- Piutang BPJS	2.713.301.831	4.265.399.575
- Piutang Covid - Kemenkes	-	-
Jumlah Piutang Pendapatan	2.713.301.831	4.265.399.575
- Penyisihan Penghapusan Piutang	-	-
Jumlah Piutang Pendapatan Bersih	2.713.301.831	4.265.399.575

3 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
- Barang Habis Pakai	544.869.617	15.116.450
- Kebersihan	123.040.280	28.769.100
- Makanan Pasien	11.316.375	81.502.000
- Cetak Rekam Medik	38.954.450	39.462.100
- Obat-Obatan Dana DAU	1.298.251.770	1.149.424.054
- Obat-Obatan Dana BLUD	14.364.068	26.801.896
- Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai	219.838.478	345.353.955
- Alat Tulis Kantor	15.913.400	-
Jumlah Persediaan Barang	2.266.548.438	1.686.429.555

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

4 ASET TETAP

Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

	Tahun 2022	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2023
	Rp	Rp	Rp	Rp
Tahun 2023				
HARGA PEROLEHAN				
Tanah	1.032.896.200	-	-	1.032.896.200
Gedung dan Bangunan	49.188.546.480	22.215.596.401	-	71.404.142.881
Peralatan dan Mesin	142.445.989.935	24.932.981.027	17.524.232.391	149.854.738.571
Kendaraan	6.373.198.400	-	-	6.373.198.400
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.894.528.324	467.671.000	-	5.362.199.324
Aset Tetap Lainnya	6.240.000	-	-	6.240.000
Konstruksi dalam Pembangunan	531.552.132	-	132.723.372	398.828.760
Jumlah Biaya Perolehan	204.472.951.471	47.616.248.428	17.656.955.763	234.432.244.136
AKUMULASI PENYUSUTAN				
Gedung dan Bangunan	6.613.245.162	2.979.947.841	-	9.593.193.003
Peralatan dan Mesin	107.620.504.506	14.066.671.020	-	121.687.175.526
Kendaraan	4.039.542.930	415.166.182	19.008.940	4.435.700.173
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.800.488.154	531.602.232	-	4.332.090.386
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi dalam Pembangunan	-	-	-	-
Jumlah Akm. Penyusutan	122.073.780.752	17.993.387.275	19.008.940	140.048.159.087
Nilai Buku Aset Tetap	82.399.170.719	29.622.861.153	17.637.946.824	94.384.085.049
	Tahun 2021	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
Tahun 2022				
HARGA PEROLEHAN				
Tanah	1.032.896.200	-	-	1.032.896.200
Gedung dan Bangunan	48.919.233.902	269.312.578	-	49.188.546.480
Peralatan dan Mesin	134.730.982.902	7.743.062.033	28.055.000	142.445.989.935
Kendaraan	6.373.198.400	-	-	6.373.198.400
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.894.528.324	-	-	4.894.528.324
Aset Tetap Lainnya	6.240.000	-	-	6.240.000
Konstruksi dalam Pembangunan	531.552.132	-	-	531.552.132
Jumlah Biaya Perolehan	196.488.631.860	8.012.374.611	28.055.000	204.472.951.471
AKUMULASI PENYUSUTAN				
Gedung dan Bangunan	(5.616.637.340)	996.607.822	-	(6.613.245.162)
Peralatan dan Mesin , Kendaraan	(85.026.643.895)	22.621.915.610	28.055.000	(107.620.504.506)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(3.636.465.688)	403.077.243	-	(4.039.542.931)
Aset Tetap Lainnya	(3.376.022.587)	424.465.567	-	(3.800.488.154)
Konstruksi dalam Pembangunan	-	-	-	-
Jumlah Akm. Penyusutan	(97.655.769.510)	24.446.066.242	28.055.000	(122.073.780.752)
Nilai Buku Aset Tetap	98.832.862.350	(16.433.691.631)	-	82.399.170.719

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

5 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain RSUD WAIKABUBAK per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2022	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2023
	Rp	Rp	Rp	Rp
BIAYA PEROLEHAN				
Aset Lain-lain	3.999.245.455	-	(385.158.929)	4.384.404.384
Pengerjaan Dalam Proses	-	-	-	-
Konstruksi dalam Pembangunan	-	-	-	-
Jumlah Biaya Perolehan	3.999.245.455	-	(385.158.929)	4.384.404.384
AKUMULASI PENYUSUTAN				
Aset Lain-lain	(3.999.245.455)	-	385.158.929	(4.384.404.384)
Pengerjaan Dalam Proses	-	-	-	-
Konstruksi dalam Pembangunan	-	-	-	-
Jumlah Akm. Penyusutan	(3.999.245.455)	-	385.158.929	(4.384.404.384)
Nilai Buku Aset Lain-Lain	-	-	-	-

6 UTANG JANGKA PENDEK

Saldo Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
a Belanja Pegawai	2.748.500.000	2.383.500.000
b Belanja Barang dan Jasa	5.997.444.521	5.592.485.791
c Belanja Obat dan Barang Medis Habis Pakai	4.463.588.317	4.475.508.537
Jumlah Utang Belanja Barang & Jasa	13.209.532.838	12.451.494.328
a Penjelasan Belanja Pegawai		
- Insentif Perawat	2.748.500.000	
- Honor Tenaga BLUD	-	
Jumlah Belanja Pegawai	2.748.500.000	
b Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
- Jasa Pelayanan Reguler	1.830.467.168	
- Jasa Pelayanan Non Reguler	1.466.414.565	
- Linen dan Sprei	24.375.600	
- Pengembangan SIM RS	80.475.000	
- Honor Pj Laporan Malaria	24.000.000	
- Perencanaan RAM Kebidanan	-	
- Insentif Covid 19 - Tenaga Kesehatan	1.593.750.188	
- Oksigen (O2)	742.900.000	
- Fotocopy Rekam Medis	235.062.000	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	5.997.444.521	
c Belanja Obat dan Barang Medis Habis Pakai		
- Apotik Sinar	256.421.560	
- Sinar Mentari Sumba (SMS)	183.361.937	
- Putra Nunsui Jaya (PNJ)	373.995.645	
- Anugrah Argon Medika (AAM)	269.822.026	
- PT Anna Putra Mandiri	304.338.210	
- PT Artha Pratama Wibawa	100.901.220	
- Anugrah Bintang Cendana (ABC)	852.226.104	
- PT Indofarma Global Medika	276.783.750	
- PT Afortunado	230.759.960	
- PT Rian Pharma Lab	354.382.450	
- PT Milenium Pharmacon Internasional	333.829.052	
- CV Karya Sukses	212.080.000	
- Apotik Ezri	237.512.000	
- PT Merapi Pharma Utama	41.370.138	
- PT Nusa Tri Utama	171.032.265	
- Apotik Sumba Medika Farma/Simpang	92.373.000	
- PT Gelora Gempita Farma	71.775.000	
- PT Rukun Putera Bersama	17.970.900	
- CV Karya Indah Manulai	80.211.100	
- PT Karya putra andalan	2.442.000	
Jumlah Belanja Obat dan Barang Medis Habis Pakai	4.463.588.317	

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

7 EKUITAS

Ekuitas RSUD Waikabubak per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
Ekuitas Awal Tahun	76.192.166.830	98.332.209.909
Selisih Revaluasi	4.571.716.418	-
Hibah Aset Tetap	-	1.267.520.614
Koreksi		
- Koreksi Awal Ekuitas	219.838.478	(1.909.140.981)
- Koreksi Utang Obat	489.977.871	(63.278.634)
- Koreksi Aset Tetap	2.687.121.457	(49.373.165)
- Koreksi Aset Lain-lain	4.486.725.384	(3.999.245.455)
- Koreksi Kewajiban Jasa Reguler	(1.830.467.168)	
- Penyesuaian Aset Tetap	(1.674.400.164)	
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	4.028.598.476	(17.386.525.457)
	89.171.277.582	76.192.166.830

Dapat Kami terangkan Saldo Akhir Ekuitas Audit 2023 sebesar Rp.88.831.264.983,- dan tahun 2022 Surplus sebesar Rp.4.028.598.476,-

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Jumlah Pendapatan pada tahun 2022 dan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

		Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp	Rp
a Pendapatan Jasa Layanan BLUD		31.029.280.930	27.572.127.792
- Pendapatan Pasien Umum	1.264.947.930		1.700.033.659
- Pendapatan Pasien BPJS	29.089.467.346		25.036.815.544
- Pendapatan Jasa Raharja	185.311.225		84.389.820
- Pendapatan Pasien Covid	313.487.000		-
- Pendapatan Jasa Giro	13.552.041		15.681.354
- Pendapatan Setoran Lain	162.515.388		17.503.440
- Pendapatan Acrual untuk piutang	-		717.703.975
Jumlah Pendapatan BLUD	31.029.280.930		27.572.127.792
b Pendapatan dari APBD			
Pendapatan Operasional :			
Belanja Langsung			
- Tambahan Penghasilan PNS	-		
- Honorarium Pegawai Non PNS	-		
- Belanja Langsung	43.720.754.982		27.408.480.119
Jumlah Belanja Langsung	43.720.754.982		27.408.480.119
- Belanja Tidak Langsung			
- Beban Gaji Tunjangan Lainnya	-		-
Jumlah Belanja Tidak Langsung	-		-
c Pendapatan Investasi			
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-		-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-		-
- Pendapatan Hibah	-		6.149.724.500
Jumlah Pendapatan Investasi	-		6.149.724.500
Total Pendapatan dari APBD		43.720.754.982	33.558.204.619
Total Pendapatan RSUD		74.750.035.912	61.130.332.411

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Operasional tahun 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Terdiri dari :	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
- Gaji Pokok dan Uang Represtasi	8.407.354.215	8.112.250.648
- Tunjangan Keluarga - LO	672.344.516	651.643.592
- Tunjangan Jabatan - LO	137.620.000	138.060.000
- Tunjangan Fungsional - LO	573.025.000	549.648.000
- Tunjangan Fungsional Umum - LO	184.140.000	184.410.000
- Tunjangan Beras - LO	507.084.840	499.625.580
- Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	3.622.306	2.721.018
- Pembulatan Gaji	127.299	125.607
- Iuran jaminan kesehatan	347.396.963	335.161.583
- Iuran kesehatan JKK	17.542.413	16.905.502
- Iuran kesehatan JKM	52.627.103	50.716.605
- Beban Pegawai - BLUD	1.364.689.201	2.818.252.603
Jumlah Beban Pegawai	12.267.573.856	13.359.520.738

3 BEBAN PERSEDIAAN

Terdiri dari :

Terdiri dari :	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
- Beban Persediaan Konsumsi	-	-
- Beban Persediaan Amunisi	-	-
- Beban Persediaan Bahan Baku	-	-
- Beban Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah Beban Persediaan	-	-

4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Terdiri dari :	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
Beban Barang dan Jasa APBD		
- Belanja Barang dan Jasa 2021	-	26.557.422.548
- Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor/Kegiatan Kantor Lainnya	2.997.014.796	(1.670.319.755)
- Honorarium Pegawai Honoror / Tidak tetap	11.897.334.880	1.425.940.000
- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ANS	152.222.832	187.166.000
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	2.080.680
- Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	2.600.850
- Belanja ATK	-	-
- Belanja Transportasi	-	-
- Belanja Dokumentasi	-	-
- Belanja Obat - Obatan	-	4.482.681.134
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-
- Jasa Tenaga Kesehatan	-	9.836.631.319
- Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid - 19	-	3.057.678.869
Jumlah Beban Barang dan Jasa APBD	15.046.572.508	17.324.459.097

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Beban Barang dan Jasa BLUD

- Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.548.347.774	2.220.605.252
- Belanja Obat	6.400.901.521	4.784.245.637
- Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	4.500.000	155.858.424
- Belanja Bahan dan Alat Laboratorium	1.099.022.559	917.252.513
- Belanja Bahan Makanan Pasien (makanan basah & kering)	9.212.015.454	7.753.807.145
- Belanja Jasa Pelayanan/Remunerasi	1.255.500.000	-
- Insentif Tenaga Kesehatan	74.750.183	-
- Honorarium Dewan Pengawas	70.108.000	-
- Beban Lembur Pegawai	-	99.199.257
- Belanja Kalibrasi Alat RS	-	15.963.900
- Belanja Pemeliharaan Alat Medis & Non Medis	36.878.976	-
- Biaya pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS	24.818.741	20.418.106
- Belanja Linen	7.532.000	-
- Belanja Pakaian Dinas Harian	885.363.659	117.552.436
- Belanja Cetakan	23.659.140	19.570.500
- Belanja Benda Pos dan Pengiriman	443.039.891	790.255.460
- Belanja ATK	54.369.000	497.899.558
- Belanja Penggandaan	254.133.497	467.474.236
- Belanja Makan Minum Non Pasien	541.572.140	527.088.475
- Belanja Langganan Listrik / Air / Telp / Internet, dll	-	-
- Belanja Langganan Media / Surat Kabar / Majalah	494.905.072	430.214.850
- Belanja Perjalanan Dinas	708.788.348	389.480.000
- Jasa Pelaksana Kegiatan	-	-
- Belanja Keanggotaan Persi	53.570.947	132.018.571
- Belanja Akomodasi dan Transportasi	81.221.107	185.135.675
- Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas & Gedung Kantor	56.345.556	27.585.050
- Belanja Pemeliharaan Instalasi / Jaringan	185.793.650	259.402.968
- Belanja Pemeliharaan Alat Transportasi	1.410.000	-
- Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi	147.982.250	139.830.766
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan RT	23.313.000	-
- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.500.000	920.000
- Belanja Bahan dan Alat Sanitasi	612.140.687	836.763.541
- Belanja Pembersih dan Alat Kebersihan	186.637.356	294.392.402
- Belanja Bahan Bakar	950.869.900	1.394.035.000
- Belanja Bahan Gas (O2, CO, N2O)	59.176.500	74.818.377
- Belanja Bahan dan Alat Dapur / Pantry	226.786.590	228.158.312
- Belanja Peralatan Listrik / Elektronik / Kedokteran	31.831.258	65.079.635
- Belanja Peralatan Kerja/ Bahan Kerja	102.379.916	248.618.244
- Belanja Peralatan Kantor dan RT	-	4.500.000
- Belanja Jasa Konsultansi	115.660.000	28.947.306
- Belanja Peningkatan Mutu SDM	2.300.000	75.407.107
- Belanja Sewa	-	2.228.750
- Belanja Jasa Sampah/Pemeriksaan Air, Udara, Gas	-	900.000
- Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Infeksius	25.650.000	97.969.629
- Belanja Kerja Tenaga Tidak Tetap	13.734.000	11.024.100
- Belanja Promosi dan Publikasi	87.013.500	76.315.609
- Belanja Sosial / Bencana Alam	-	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa BULD	27.107.522.172	23.390.936.791
Jumlah Beban Barang dan Jasa	42.154.094.680	40.715.395.888

5 BEBAN PEMELIHARAAN

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
- Beban Pemeliharaan	-	-
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-
- Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
- Beban Persediaan Suku Cadang	-	-
- Beban Pemeliharaan	-	-
Jumlah Beban Pemeliharaan	-	-

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

6 BEBAN PENYUSUTAN

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.417.649.455	996.607.822
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.070.796.020	22.617.790.611
- Beban Penyusutan Kendaraan	396.157.243	403.077.243
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	415.166.182	424.465.567
	<u>16.299.768.900</u>	<u>24.441.941.242</u>

7 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp	Rp
- Pendapatan Lain-Lain	-	-
- Beban Lain-lain	-	-
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	<u>-</u>	<u>-</u>

8 TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direktur BLUD RSUD Waikabubak Sumba Barat bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang disusun dan diselesaikan pada tanggal 04 April 2024.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si., Ak & REKAN
Ijin Menkeu: No Kep. 109/KM.5/2005

Nomor : 00033/2.0664/AU.5/11/1197-1/1/IV/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Direksi dan Dewan Pengawas
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD WAIKABUBAK

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD WAIKABUBAK yang terdiri neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD WAIKABUBAK tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dalam laporannya nomor:00129/3.0420/AU.5/11/0388-1/1/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang menyatakan opini wajar atas laporan keuangan tersebut.

Office: 1. Jl. Gubeng Kertajaya III F/10 Surabaya 60281
2. Regus Pakuwon Centre 23rd Floor
Jalan Embong Malang No. 1 - 5 Surabaya 60261
Telp / Fax : 031 - 5055789 / 5046348
Email : kapbasridanrekan@yahoo.co.id
www.kapbasrisurabaya.com



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD WAIKABUBAK dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD WAIKABUBAK atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD WAIKABUBAK.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap resiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis opini bagi kami. Resiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD WAIKABUBAK.

Office: 1. Jl. Cubeng Kertajaya III F/10 Surabaya 60281
2. Regus Pakuwon Centre 23rd Floor
Jalan Embong Malang No.1 - 5 Surabaya 60261
Telp / Fax : 031 - 5055789 / 5046348
Email : kapbasridanrekan@yahoo.co.id
www.kapbasrisurabaya.com



- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD WAIKABUBAK untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & REKAN
Partner

Drs. Subyakto.,MM.,Ak, CA,
CPA.NRAP : AP. 1197

Surabaya, 04 April 2024



Office: 1. Jl. Gubeng Kertajaya III F/ 10 Surabaya 60261
2. Regus Pakuwon Centre 23rd Floor
Jalan Embong Malang No.1 - 5 Surabaya 60261
Telp / Fax : 031 - 5055789 / 5046348
Email : kapbasridanrekan@yahoo.co.id
www.kapbasrisurabaya.com

